

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2025



**PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
LAMONGAN - JAWA TIMUR**

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
					No. SK	Tanggal SK		

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Komisaris Independen
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Keanggotaan Komite

Komite Audit

Komite Pemantauan
Risiko

Komite Remunerasi
dan Nominasi

Komite Manajemen
Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Pemegang Saham						Ultimate Shareholders
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	111
Tanggal akta pendirian	29-09-1989
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	19
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	12-10-2022
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	C2-10272 HT.01.01-TH.89
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	08-11-1989
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	17-02-1990
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	-Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu -Menyalurkannya dan memberikan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Tempat kedudukan	Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan

Riwayat Pendirian BPR

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Rekening	Jumlah
---------------	--------

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga						
Penempatan pada bank lain						
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR						
b. Kepada Bank Umum						
c. Kepada non bank - pihak terkait						
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait						
Penyertaan Modal						
Jumlah Aset Produktif						

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
----------------	-----------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Pada tahun 2025, rasio NPL gross mengalami peningkatan sebesar 491 bps secara yoy, dengan rasio NPL gross meningkat menjadi 24,12% dari 19,21% pada tahun sebelumnya. Sedangkan NPL net juga meningkat 359 bps menjadi 17,38% dari 13,79% pada tahun sebelumnya. Total Kredit Bermasalah sebesar Rp. 25,39 milyar. Peningkatan ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam pengelolaan kualitas kredit, khususnya pada segmen pembiayaan UMKM yang merupakan fokus utama Perseroan. Berikut porsi penurunan kualitas kredit dari total kredit yang disalurkan pada posisi DeS 2025 untuk porsi kualitas kredit kurang lancar sebesar 1,52%, rasio ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,54%. Untuk kualitas diragukan sebesar 2,66%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,35%, sedangkan untuk kualitas macet tercatat sebesar 19,94%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,33%. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya akumulasi penyelesaian kredit bermasalah existing serta masuknya kredit bermasalah baru selama tahun berjalan. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan risiko kredit terjadi pada seluruh jenis penggunaan baik kredit produktif maupun konsumtif. Rasio NPL Kredit Investasi yang meningkat menjadi 28,51% dari 20,44% pada tahun sebelumnya, kemudian disusul oleh Kredit Modal Kerja meningkat menjadi 28,36% dari 23,91% pada tahun sebelumnya, sedangkan untuk rasio NPL Kredit Konsumsi juga mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 8,22% menjadi 11,08%. Sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan NPL terjadi pada sebagian besar sektor pembiayaan. Kenaikan rasio tertinggi pada sektor Perdagangan yang meningkat jadi 36,60% dari 28,50% pada tahun sebelumnya. Sektor Jasa meningkat jadi 33,68% dari 17,49%, sektor Pertanian meningkat menjadi 16,89% dari 13,04%, sementara sektor Industri relatif stabil di kisaran 23,142% dibandingkan 24,43% pada tahun sebelumnya, dan sektor lainnya meningkat jadi 11,34% dari 8,57% pada tahun sebelumnya.
Penyebab Utama	Beberapa faktor internal yang menyebabkan memburuknya kualitas kredit pada tahun 2025 antara lain adalah meningkatnya pembentukan kredit bermasalah baru, dimana sepanjang tahun 2025 tercatat mutasi NPL baru sebesar Rp7,7 milyar, sementara realisasi penyelesaian melalui penagihan hanya sebesar Rp3,2 milyar, sehingga terjadi kenaikan bersih NPL selama tahun berjalan sebesar Rp. 4,5 milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian kualitas kredit masih perlu terus diperkuat, terutama dalam proses analisa kelayakan kredit serta pemilihan sektor usaha debitur yang memiliki ketahanan usaha yang baik. Selain itu, monitoring pasca-penyalaran kredit masih perlu ditingkatkan agar potensi penurunan kualitas kredit dapat terdeteksi lebih dini dan segera dilakukan langkah penanganan yang tepat. Disamping itu, proses penyelesaian kredit bermasalah eksisting masih memerlukan waktu, baik melalui upaya penagihan intensif, restrukturisasi kredit maupun penyelesaian melalui agunan, sehingga turut mempengaruhi akumulasi kredit bermasalah pada tahun berjalan. Sementara itu dari sisi faktor eksternal, peningkatan risiko kredit juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan mayoritas debitur Perseroan. Perlambatan aktivitas usaha pada beberapa sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa dan pertanian berdampak pada penurunan omzet usaha debitur sehingga mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban kredit secara tepat waktu. Selain itu, pada sektor pertanian juga terdapat beberapa faktor alam yang mempengaruhi kinerja usaha debitur, antara lain kondisi gagal panen akibat banjir serta serangan hama tikus pada sebagian wilayah pertanian, yang berdampak pada penurunan hasil produksi dan pendapatan petani. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kemampuan pembayaran kredit debitur pada sektor pertanian serta berkontribusi terhadap peningkatan risiko kredit secara keseluruhan.
Langkah Penyelesaian	Dalam rangka mengendalikan peningkatan kredit bermasalah serta memperbaiki kualitas portofolio kredit, Perseroan telah melakukan berbagai langkah strategis antara lain dengan meningkatkan intensitas penagihan dan monitoring terhadap debitur bermasalah, baik melalui desk collection maupun kunjungan langsung kepada debitur. Selain itu, Perseroan juga melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar, guna menjaga keberlangsungan usaha debitur serta meminimalkan potensi peningkatan NPL. Upaya lainnya yang dilakukan adalah mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan agunan maupun pengambilalihan agunan (AYDA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan juga terus memperkuat proses analisa kredit (underwriting) serta meningkatkan kualitas monitoring pasca-penyalaran kredit, sehingga potensi penurunan kualitas kredit dapat diantisipasi lebih dini. Melalui berbagai langkah tersebut, Perseroan berharap dapat menekan pertumbuhan kredit bermasalah serta secara bertahap memperbaiki kualitas aset produktif pada periode yang akan datang.

Form A.03.04
Penjelasan Mengenai NPL

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Form A.03.05

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Brondong

Posisi Laporan : 2025

Selama tahun 2025, PT BPR Nusamba Brondong menghadapi beberapa perkembangan usaha serta peristiwa penting yang memberikan pengaruh terhadap kinerja Perseroan, baik dari sisi kualitas aset, kebijakan akuntansi, maupun strategi penguatan kelembagaan Perseroan. Perkembangan kondisi ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi fokus pembiayaan Perseroan turut mempengaruhi dinamika usaha sepanjang tahun berjalan.

Beberapa perkembangan usaha yang dinilai berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Perseroan selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan Kualitas Kredit (Non-Performing Loan / NPL)

Pada tahun 2025 kualitas kredit Perseroan masih menghadapi tekanan yang tercermin dari meningkatnya rasio Non-Performing Loan (NPL). Pada posisi 31 Desember 2025 rasio NPL bruto tercatat sebesar **24,12%** dan rasio NPL neto sebesar **17,38%**, dengan total kredit bermasalah mencapai sekitar **Rp25,39 miliar**. Peningkatan rasio tersebut antara lain dipengaruhi oleh terbentuknya kredit bermasalah baru selama tahun berjalan serta adanya **penurunan total kredit yang diberikan secara year-on-year sebesar Rp3,59 miliar atau sekitar 3,3%**, sehingga secara rasio turut memperbesar porsi kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan. Selain itu, sebagian debitur Perseroan yang bergerak di sektor perdagangan, pertanian, dan usaha mikro mengalami tekanan usaha akibat menurunnya daya beli masyarakat serta gangguan produksi di sektor pertanian yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, banjir di beberapa wilayah, serta adanya serangan hama tikus yang menyebabkan penurunan hasil panen. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan sebagian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Penerapan SAK EP)

Pada tahun 2025 Perseroan mulai menerapkan **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)** yang menggantikan **SAK ETAP** dalam penyusunan laporan keuangan BPR. Penerapan standar akuntansi tersebut membawa beberapa penyesuaian dalam metode pencatatan dan penyajian laporan keuangan, khususnya

terkait dengan pengakuan pendapatan bunga dan pengukuran aset keuangan. Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan standar akuntansi yang berlaku guna meningkatkan kualitas dan transparansi penyajian laporan keuangan Perseroan. Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap sistem pencatatan serta meningkatkan pemahaman sumber daya manusia agar implementasi standar akuntansi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Rencana Penggabungan BPR dalam Kelompok Usaha Nusamba

Pada tahun 2025 terdapat perkembangan penting terkait rencana konsolidasi melalui penggabungan beberapa BPR dalam kelompok usaha Nusamba di wilayah Jawa Timur, yaitu **PT BPR Nusamba Ngunut, PT BPR Nusamba Brondong, PT BPR Nusamba Rambipuji, dan PT BPR Nusamba Genteng**. Proses penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** serta persetujuan pemegang saham melalui **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)** dan dituangkan dalam **Akta Penggabungan no 32 tanggal 24 Desember 2025**. Konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing Perseroan dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Form A.04.01

Strategi dan Kebijakan Manajemen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : **PT. BPR Nusamba Brondong**

Posisi Laporan : **2025**

Dalam menghadapi perkembangan kondisi perekonomian serta dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif, manajemen PT BPR Nusamba Brondong senantiasa melakukan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas usaha serta meningkatkan kinerja Perseroan secara berkelanjutan. Strategi yang dijalankan difokuskan pada penguatan kualitas aset produktif, penerapan manajemen risiko secara lebih efektif, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta pengembangan usaha yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Beberapa strategi dan kebijakan manajemen yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Kredit dan Manajemen Risiko

Perseroan terus meningkatkan pengelolaan risiko kredit melalui penyempurnaan proses analisa kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, serta peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap debitur setelah pencairan kredit.

Selain itu, Perseroan juga melakukan berbagai langkah dalam penanganan kredit bermasalah melalui kegiatan penagihan secara intensif, restrukturisasi kredit kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha, serta penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga kualitas portofolio kredit, Perseroan juga menerapkan kebijakan internal terkait penyaluran kredit tambahan (top up) kepada debitur eksisting dengan tetap mempertimbangkan riwayat pembayaran, kemampuan usaha debitur, serta kecukupan nilai agunan.

2. Strategi Pengembangan dan Pendalaman Segmen UMKM

Sebagai lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Perseroan terus melakukan upaya penguatan basis data serta pemetaan potensi usaha di wilayah kerja Perseroan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan pendataan dan pemetaan pelaku UMKM yang berada di wilayah operasional Perseroan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik usaha, kebutuhan pembiayaan, serta potensi pengembangan usaha masyarakat sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

3. Penguatan Permodalan dan Struktur Usaha

Dalam rangka memperkuat struktur usaha dan meningkatkan kapasitas bisnis Perseroan, manajemen mendukung kebijakan konsolidasi melalui rencana penggabungan beberapa BPR dalam kelompok usaha Nusamba di wilayah Jawa Timur.

Melalui penggabungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat struktur permodalan, serta meningkatkan daya saing Perseroan dalam menghadapi dinamika industri perbankan, khususnya di sektor BPR.

4. Peningkatan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan terus berupaya meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) melalui penguatan fungsi pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan regulator, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

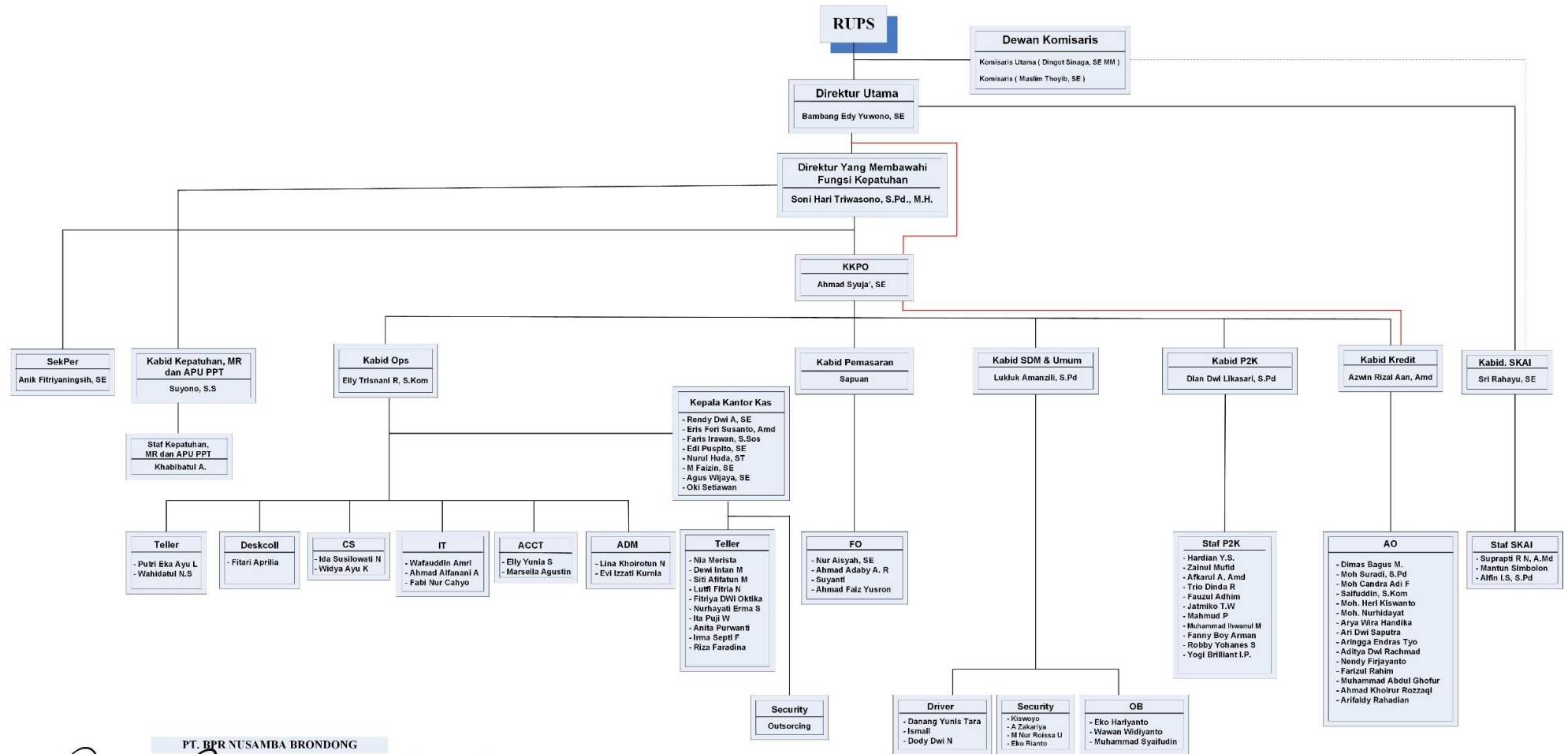
Dengan penerapan tata kelola yang baik, diharapkan seluruh kegiatan operasional Perseroan dapat berjalan secara sehat, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

5. Pengembangan Operasional dan Sumber Daya Manusia

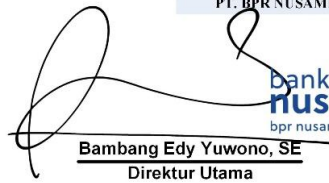
Perseroan juga terus melakukan upaya peningkatan kualitas operasional dan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan, peningkatan pemahaman terhadap regulasi perbankan, serta penguatan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, diharapkan pelayanan kepada nasabah dapat terus ditingkatkan serta mampu mendukung pencapaian kinerja Perseroan secara optimal.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT OPERASIONAL PT BPR NUSAMBA BRONDONG



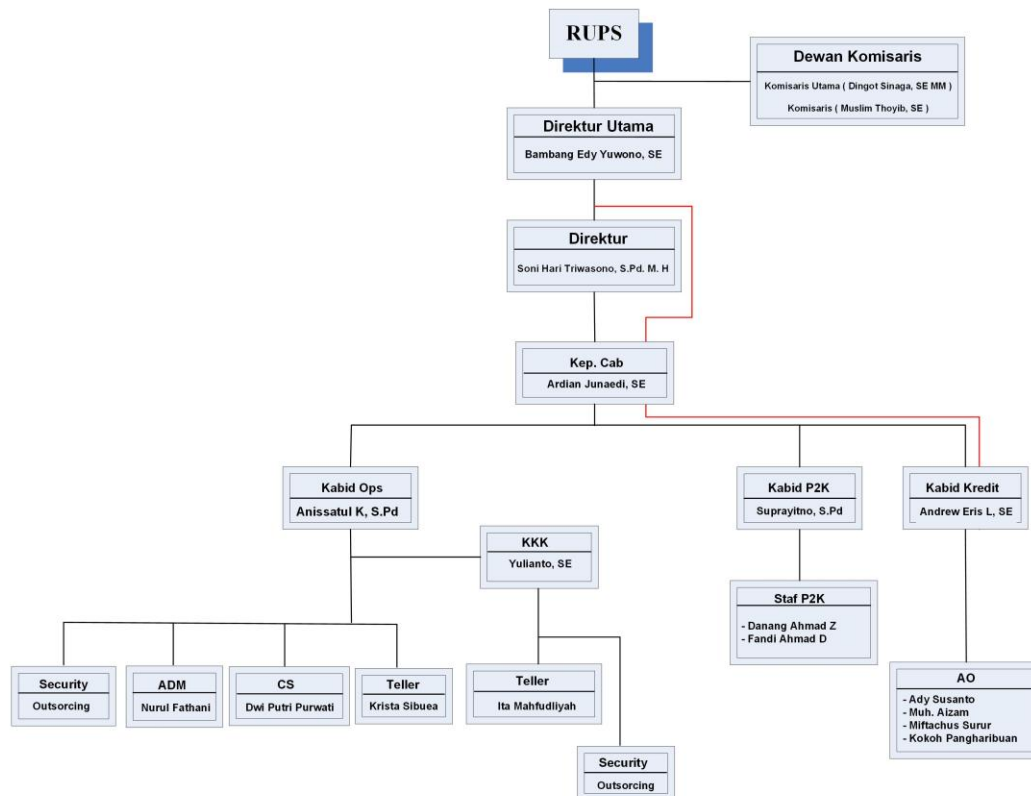
PT. BPR NUSAMBA BRONDONG


Bambang Edy Yuwono, SE
Direktur Utama

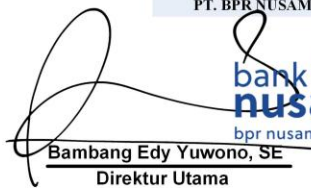

Soni Hari Triwasono, S.Pd., M.H
Direktur



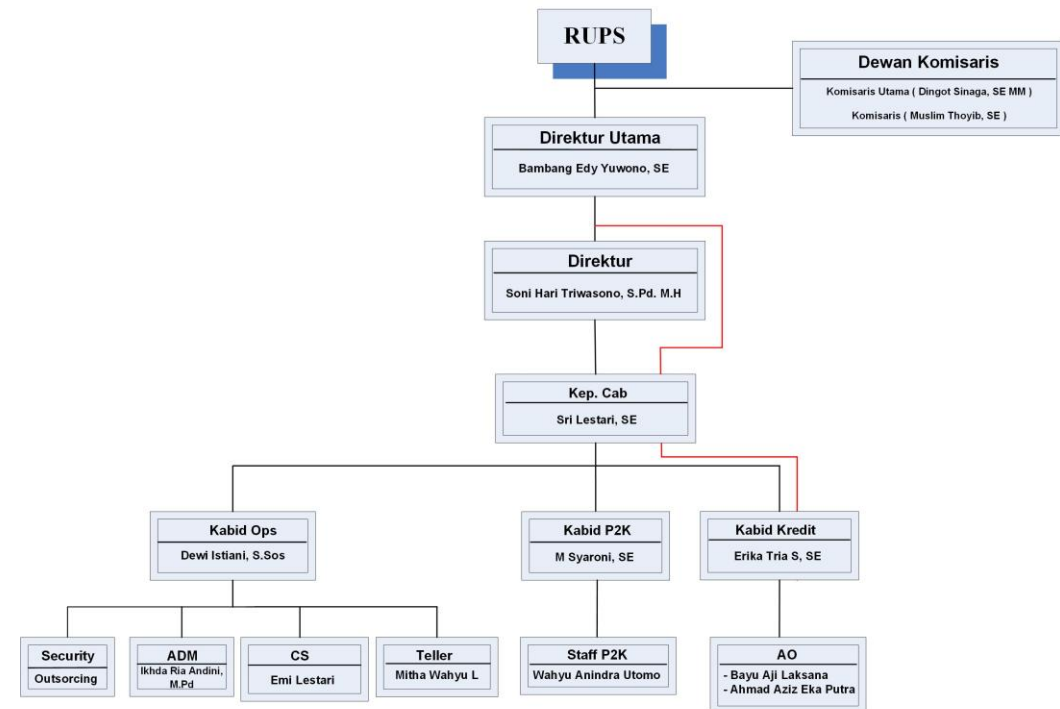
**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CABANG GRESIK
PT BPR NUSAMBA BRONDONG**



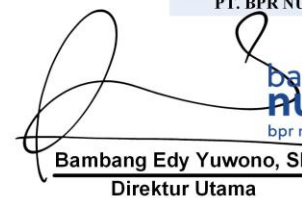
PT. BPR NUSAMBA BRONDONG

  
Bambang Edy Yuwono, SE
Direktur Utama
Soni Hari Triwasono, S.Pd. M. H
Direktur

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CABANG TUBAN
PT BPR NUSAMBA BRONDONG**



PT. BPR NUSAMBA BRONDONG

  
Bambang Edy Yuwono, SE
Direktur Utama
Soni Hari Triwasono, S.Pd. M. H
Direktur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Tabungan	Ada 5 produk tabungan yang telah dioperasionalkan yaitu: (1). Tabunganku Nusamba : sasarannya bagi penabung kecil karena setorannya dimulai dengan nominal Rp. 10.000,- dan tanpa potongan administrasi, perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah perbulan. (2). Tabungan Sihastor: sasarannya bagi nasabah dengan tabungan rutin dan bersifat harian,- keunggulannya dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo harian,- Pembukaan awal tabungan nominal Rp. 50.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-,- Biaya administrasi Rp. 2.000,- per bulan. (3). Tabungan Harmoni Plus : adalah produk tabungan bersama BPR Nusamba Group dimana terdapat undian berhadiah setiap tahun sekali, dengan hadiah utama mobil Xpander yang diundi disetiap wilayah, sepeda motor dan beberapa barang elektronik untuk diundi di masing masing BPR. Ketentuan Tabungan :- Setoran awal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya sebesar Rp. 50.000,-. - Setiap kelipatan Rp. 100.000,- untuk saldo tabungan yang sudah mengendap satu bulan akan mendapatkan 1 point yang akan diundi. - Rekening tabungan dengan saldo lebih dari sama dengan Rp. 100.000,- saat undian hadiah, yang berhak diikutkan undian. - Biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,- perbulan,- Ketentuan lainnya sesuai dengan SOP Tabungan Harmoni Plus. (4). Tabungan Harmoni Premium : Sasarannya bagi masyarakat menengah karna terdapat keunggulan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan yang lain, dengan ketentuan :- Pembukaan dengan setoran minimal Rp. 5.000.000,-,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000.000,-,- Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,-,- Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian. (5). Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar). Tabungan Simpel merupakan produk dari OJK yang sasarannya bagi nasabah siswa/pelajar sampai dengan usia 17 tahun, dengan ketentuan :- Pembukaan dengan setoran minimal Rp. 5.000,-, - Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,- , - Tanpa Biaya administrasi, - Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah.
01	01	Deposito	Ada 2 (dua) Produk Deposito berjangka di PT. BPR NUSAMBA BRONDONG yaitu : (1). Deposito Nusamba: Deposito berjangka, minimal penempatan Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu tertentu mulai 1 bulan dan maksimal 12 bulan dengan suku bunga tertinggi sesuai ketentuan LPS diperuntukkan perorangan maupun badan. (2). Deposito Super Plus: Deposito berjangka penempatan dengan nominal minimal Rp. 5.000.000,- jangka waktu minimal 3 bulan dan maksimal 60 bulan dengan keuntungan berhadiah langsung berupa barang elektronik, sepeda motor dan lainnya dan masih mendapatkan bunga setiap bulannya. Setiap Rp. 5.000.000,- mendapatkan 1 Poin dan berlaku kelipatan. Setiap Poin mendapatkan nilai Rp. 20.000,- dikurangi pajak hadiah deposito (20%). Ketentuan Lainnya sesuai dengan SOP Deposito Superplus

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
02	01	Kredit	Ada 2 jenis kredit berdasarkan jenis angsuran adalah : a) Kredit Instalment: Yaitu kredit yang diberikan yang sejak awal sudah diketahui untuk pembiayaan modal kerja, investasi ataupun konsumsi yang pengembaliannya baik angsuran pokok maupun bunga dibayar setiap bulan sesuai dengan yang diperjanjikan. b) Kredit Reguler: Yaitu kredit yang pembayarannya diberikan untuk pembiayaan kredit produktif (Modal Kerja dan Investasi) yang pengembalian angsuran pokok dibayar saat jatuh tempo kredit dan bunga dibayar setiap bulan. Ada 3 jenis kredit berdasarkan jenis penggunaan adalah : a) Kredit Modal kerja : Kredit dengan tujuan penggunaannya untuk membantu masyarakat dalam memperlancar usahanya dengan penambahan modal kerja. Pembiayaan ini bagi semua sektor perdagangan, sektor usaha jasa, perikanan, perindustrian ataupun sektor pertanian yang penggunaannya untuk perputaran modal usaha. Contoh Kredit untuk tambahan modal pembelian stok barang dagangan untuk pertokoan. b) Kredit Investasi: Kredit dengan tujuan penggunaannya untuk masyarakat yang ingin berinvestasi maka Bank akan memberikan penambahan dana bagi investasi usahanya, Contoh Kredit ini adalah pembelian mesin penggilingan padi, pembelian perahu nelayan. c) Kredit Konsumsi: Kredit dengan tujuan penggunaannya untuk konsumsi Masyarakat, tetapi dalam hal ini debitur harus tetap memiliki penghasilan yang tetap sehingga repayment capacity memenuhi, dibutuhkan suatu analisa yang menunjang dalam rangka untuk prudential banking. Contoh Kredit ini adalah Kredit dengan tujuan untuk pernikahan anak, kredit untuk biaya sekolah anak, kredit untuk pembelian rumah dan lainnya.
99	04	Jasa Lainnya	Disamping produk inti yang dipasarkan oleh BPR Nusamba Brondong, sebagai media perantara antara kreditur dan debitur maka produk lain yang ikut dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada nasabah adalah dengan jasa PPOB (Payment Point On line Bank) yaitu pembayaran jasa telekomunikasi (Jastel), pembayaran listrik, pembayaran BPJS dan pembayaran OVO, layanan uang elektronik BPR E-Cash



Nomor : 823/BRD/DIR/XII/2025

Lamongan, 30 Desember 2025

Kepada Yth :

**Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Jawa Timur**

Jl. Gubernur Suryo No. 28-30

Surabaya 60271

031-99210100

Perihal : **Penyampaian Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan Teknologi
Informasi Tahun 2025**

Dengan hormat,

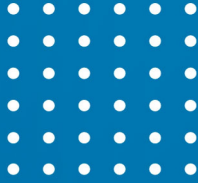
Menunjuk Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan ini kami sampaikan Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan Teknologi Informasi Data PT. BPR Nusamba Brondong Tahun 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Nusamba Brondong

**bank
nusamba**
bpr nusamba brondong

Bambang Edy Yuwono, SE
Direktur Utama



LAPORAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

BPR NUSAMBA BRONDONG



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan ridloNya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga PT. BPR Nusamba Brondong dapat menjalankan tugas yang telah diberikan. Kami percaya hal tersebut tidak lepas dari kerjasama semua pihak, untuk itu kami tak lupa mengucapkan banyak terima kasih sehingga Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan Teknologi Informasi ini dapat tersusun dengan baik.

PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong yang berkantor pusat di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sangat berkeinginan untuk terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang ada serta turut berperan aktif meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dalam bentuk mobilisasi dana serta menyalurkan kembali dalam bentuk Kredit. untuk itu manajemen PT. BPR Nusamba Brondong masih tetap mengharapkan bantuan dan kerja sama serta dukungan seluruh pihak untuk menciptakan kondisi bank yang sehat baik segi kuantitatif maupun kualitatif.

Demikian Laporan Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 ini kami sampaikan dan selaku manajemen PT. BPR Nusamba Brondong, kami tetap akan berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras untuk mengembangkan Teknologi Informasi dengan sebaik mungkin.

Lamongan, 29 Desember 2025

PT. Bank Perekonomian Rakyat
Nusamba Brondong – Lamongan

bank
nusamba
bpr nusamba brondong

BAMBANG EDY YUWONO, SE

Direktur Utama

SONI HARI TRIWASONO, S.Pd, M.H

Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : LAPORAN KONDISI TERKINI PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI BPR DAN BPRS	1
A. SUMBER DAYA MANUSIA TERKAIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	1
B. PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK	2
C. AKTIVITAS OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI	3
D. JARINGAN KOMUNIKASI	4
E. PENGAMANAN INFORMASI	4
F. RENCANA PEMULIHAN BENCANA	6
G. AUDIT INTERN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	7
H. KERJASAMA DENGAN PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI	9
I. PERUBAHAN MENDASAR	10
BAB II : LAPORAN KEJADIAN KRITIS, PENYALAHGUNAAN DAN/ ATAU KEJAHATAN PENYELENGGARAAN	11
BAB III : LAPORAN REALISASI KERJASAMA DENGAN PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI	12
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I
LAPORAN KONDISI TERKINI PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
INFORMASI BAGI BPR

Nama BPR : PT. BPR Nusamba Brondong
Alamat Kantor Pusat BPR : Jl. Raya No. 77 Brondong Lamongan
Nomor Telepon : (0322) 661688
Nama Penanggung Jawab : Ahmad Syuja', SE
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pusat Operasional
Tanggal Laporan : 29 Desember 2025

A. SUMBER DAYA MANUSIA TERKAIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
INFORMASI

1. Struktur organisasi BPR yang menunjukkan posisi satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

2. Deskripsi kerja (job description) satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

3. Pelatihan dan/atau sertifikasi di bidang Teknologi Informasi yang pernah diikuti oleh anggota satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap Teknologi Informasi.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

B. PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK

1. Kebijakan dan prosedur pengembangan dan pengadaan sistem elektronik BPR.

☐	Terlampir	Tidak Terlampir	☒
--------------------------	-----------	-----------------	-------------------------------------

2. Daftar Sistem Elektronik*) yang sudah diimplementasikan.

- a) Dikembangkan sendiri.

☐	Terlampir	Tidak Terlampir	☒
--------------------------	-----------	-----------------	-------------------------------------

- b) Dikembangkan penyedia jasa Teknologi Informasi.

☒	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
-------------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

3. Arsitektur Aplikasi

☒	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
-------------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

4. Daftar Sistem Elektronik*) dalam proses pengembangan dan pengadaan.

- a) Dikembangkan sendiri.

☐	Terlampir	Tidak Terlampir	☒
--------------------------	-----------	-----------------	-------------------------------------

- b) Dikembangkan penyedia jasa Teknologi Informasi.

☒	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
-------------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

5. BPR melaksanakan fungsi manajemen proyek untuk sistem elektronik yang sedang dalam pengembangan dan pengadaan.

☐	Ya	Tidak	☒
--------------------------	----	-------	-------------------------------------

6. BPR memisahkan lingkungan untuk pengembangan, uji coba, dan operasional.

☒	Ya	Tidak	☐
-------------------------------------	----	-------	--------------------------

C. AKTIVITAS OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI*)

1. Informasi mengenai Pusat Data BPR :

- a) Alamat : - Pusat data (Data center) Sigma di Surabaya – Jawa Timur
- DRC Sigma Serpong - Banten

b) Status kepemilikan

☐	Milik Sendiri	Milik Penyedia Jasa Teknologi Informasi	☒
--------------------------	---------------	---	-------------------------------------

c) Spesifikasi peladen utama dan perangkat keras lainnya.

☒	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
-------------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

d) Kelengkapan pengamanan fisik pada Pusat Data.

☒	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
-------------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

2. Terdapat peladen yang ditempatkan di luar Pusat Data.

☐	Ada	Tidak Ada	☒
--------------------------	-----	-----------	-------------------------------------

3. Aplikasi khusus untuk pengamanan informasi (access control software).

☒	Ada	Tidak Ada	☐
-------------------------------------	-----	-----------	--------------------------

4. Prosedur Penanganan Masalah (*Problem Handling* termasuk *Helpdesk*).

☒	Ada	Tidak Ada	☐
-------------------------------------	-----	-----------	--------------------------

5. Kebijakan dan prosedur manajemen perubahan.

☐	Ada	Tidak Ada	☒
--------------------------	-----	-----------	-------------------------------------

6. Kebijakan dan prosedur pengelolaan hak akses pengguna sistem dan aplikasi.

☒	Ada	Tidak Ada	☐
-------------------------------------	-----	-----------	--------------------------

7. Penetapan sistem & data sensitivity.

☐	Ada	Tidak Ada	☒
--------------------------	-----	-----------	-------------------------------------

8. Ketersediaan jejak audit pada sistem dan data.

☒	Ada	Tidak Ada	☐
-------------------------------------	-----	-----------	--------------------------

9. Kebijakan dan prosedur rekam cadang data.

☒	Ada	Tidak Ada	☐
-------------------------------------	-----	-----------	--------------------------

D. JARINGAN KOMUNIKASI

1. Struktur/topologi Jaringan Komunikasi data (utama dan rekam cadang).

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

2. Kebijakan dan prosedur pengamanan Jaringan Komunikasi.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

3. Daftar perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk Jaringan Komunikasi.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

4. Sistem pemantauan Jaringan Komunikasi (*network monitoring system*).

	Ada	Tidak Ada	✓
--	-----	-----------	---

5. Kebijakan dan prosedur untuk pengaturan pengamanan Jaringan Komunikasi data (misalnya *firewall*).

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

E. PENGAMANAN INFORMASI *)

1. Kebijakan dan prosedur pengamanan informasi, mencakup antara lain :

- a) Pemberian, perubahan dan penghapusan akses pengguna.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

- b) *Security Awareness Program*.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

- c) Tim penanganan insiden dalam pengamanan informasi (*Incident Response Team*).

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

- d) Klasifikasi data.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

- e) Penggunaan *emergency user id*.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

- f) Pencegahan penggunaan perangkat lunak ilegal.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

2. Pengelolaan aset

- a) Pengelolaan aset terkait informasi meliputi identifikasi, penentuan kepemilikan dan tanggung jawab serta inventarisasi daftar aset.

☐	Terlampir	Tidak Terlampir	☒
--------------------------	-----------	-----------------	-------------------------------------

- b) Klasifikasi informasi (misalnya rahasia, internal, biasa) dan prosedur pengamanannya.

☐	Terlampir	Tidak Terlampir	☒
--------------------------	-----------	-----------------	-------------------------------------

- c) Pengamanan fisik termasuk penggunaan alat pengamanan (*access control card*, PIN, dan lain-lain) terhadap fasilitas pemrosesan informasi.

☒	Ada	Tidak Ada	☐
-------------------------------------	-----	-----------	--------------------------

3. Pengamanan Akses

- a) Penerapan pengamanan password pada aplikasi, misalnya aplikasi telah memaksa pengguna untuk mengubah password secara berkala.

☒	Ada	Tidak Ada	☐
-------------------------------------	-----	-----------	--------------------------

- b) Pengelompokan hak akses yang diberikan kepada masing-masing pengguna untuk setiap aplikasi yang dimiliki BPR.

☒	Ada	Tidak Ada	☐
-------------------------------------	-----	-----------	--------------------------

- c) Terdapat fungsi audit (*audit log/jejak audit*) untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan dilakukan analisis terhadap *audit log/jejak audit* tersebut.

- d) Evaluasi secara berkala terhadap hak akses yang diberikan oleh pihak yang independen.

☒	Ada	Tidak Ada	☐
☐	Ada	Tidak Ada	☒

4. Sumber Daya Manusia

- a) Pencantuman ketentuan mengenai pengamanan informasi di dalam perjanjian dengan pegawai BPR, pegawai kontrak, dan pihak ketiga.

☐	Ada	Tidak Ada	☒
--------------------------	-----	-----------	-------------------------------------

- b) Adanya ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur pengamanan informasi.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

- c) Prosedur pengembalian atau perubahan hak akses terhadap aset terkait informasi saat terjadi mutasi atau selesainya perjanjian kerja atau masa tugas.

	Ada	Tidak Ada	✓
--	-----	-----------	---

5. Operasional Teknologi Informasi

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

6. Penanganan Insiden Pengamanan Informasi

- a) Ketentuan mengenai keharusan untuk melaporkan terjadinya insiden pengamanan informasi.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

- b) Prosedur mengenai pelaporan, penanganan, pendokumentasian, dan tindak lanjut terjadinya insiden pengamanan informasi.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

F. RENCANA PEMULIHAN BENCANA

1. BPR memiliki Rencana Pemulihan Bencana.

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

2. Pusat Pemulihan Bencana

- a) Alamat : Gedung Telkomsigma – BSD – Banten

- b) Spesifikasi rekam cadang peladen dan perangkat keras lainnya.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

- c) Kelengkapan pengamanan fisik pada Pusat Pemulihan Bencana.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

- d) Konfigurasi Pusat Pemulihan Bencana (topologi jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan pendukung lainnya)

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

- e) Rekam cadang data (*hot, warm, cold back up*) untuk masing-masing aplikasi yang tersedia di Pusat Pemulihan Bencana.

	Terlampir	Tidak Terlampir	✓
--	-----------	-----------------	---

3. Uji Coba Rencana Pemulihan Bencana.

- a) Kebijakan dan prosedur uji coba

✓	Ada	Tidak Ada	
---	-----	-----------	--

- b) Pengujian menyeluruh (*overall testing*) untuk seluruh sistem/aplikasi kritikal dilakukan terakhir kali

✓	Pernah Tanggal : 24 November 2018	Belum Pernah	
---	---	--------------	--

- c) Pengujian parsial atas sistem/aplikasi dalam 1 (satu) tahun terakhir

Aplikasi Wilayah Operasional	Tgl. Tgl.
---	--------------------------------

G. AUDIT INTERN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI *)

1. BPR memiliki organ pelaksana fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

✓	Ya	Tidak	
---	----	-------	--

Jika ya, lampirkan struktur organ pelaksana fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dan lengkapi dengan riwayat hidup (*curriculum vitae*)? auditor intern.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

2. BPR menggunakan auditor ekstern untuk melakukan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

☐	Ya	Tidak	☒
--------------------------	----	-------	-------------------------------------

Jika ya, lampirkan perjanjian kerja terkini.

☐	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

3. BPR memiliki pedoman audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

☒	Ada	Tidak Ada	☐
-------------------------------------	-----	-----------	--------------------------

4. Audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

☒	Ya	Tidak	☐
-------------------------------------	----	-------	--------------------------

Sebutkan dua tanggal audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi terakhir.

Tanggal : 26 Januari 2023

Tanggal : 29 Januari 2024

Audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi tersebut di atas telah mencakup Aplikasi Inti Perbankan serta wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

☒	Ya	Tidak	☐
-------------------------------------	----	-------	--------------------------

5. Laporan audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit apabila ada, dan ditembuskan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

☒	Ya	Tidak	☐
-------------------------------------	----	-------	--------------------------

H. KERJASAMA DENGAN PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Tanggal mulai implementasi kerja sama Teknologi Informasi BPR: 01 April 2014.

2. Uraikan nama dan alamat penyedia jasa Teknologi Informasi

Nama : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Alamat : Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133

Lokasi Pusat Data : Surabaya Jawa Timur

Lokasi Pemulihan Bencana : Gedung Telkomsigma – BSD – Banten

3. Daftar jasa Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi.

☒	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
-------------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

4. Jaringan Komunikasi data yang digunakan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi BPR.

☐	Terlampir	Tidak Terlampir	☒
--------------------------	-----------	-----------------	-------------------------------------

5. Salinan perjanjian kerja sama antara BPR dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

☒	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
-------------------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

6. Hasil evaluasi terkini mengenai analisis biaya dan manfaat penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh penyedia jasa Teknologi Informasi

☐	Ada	Tidak Ada	☒
--------------------------	-----	-----------	-------------------------------------

7. Analisis BPR mengenai kecukupan Rencana Pemulihan Bencana milik penyedia jasa Teknologi Informasi.

☐	Ada	Tidak Ada	☒
--------------------------	-----	-----------	-------------------------------------

I. PERUBAHAN MENDASAR

Huruf ini hanya diisi apabila BPR menyampaikan laporan kondisi terkini setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak POJK SPTI diterbitkan dan terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi. Dalam hal terjadi perubahan mendasar BPR harus menyampaikan laporan kondisi terkini sebagaimana Bab I huruf A sampai dengan huruf I untuk menyampaikan keterangan dan alasan dari perubahan mendasar.

1. Tanggal efektif beroperasi sejak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi *).
2. Jenis perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.

No	Perubahan Mendasar **)	Keterangan dan Alasan ***)
1		
2		
3		

*) Perubahan dalam penyelenggaraan TI dilaporkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan mendasar efektif beroperasi sebagaimana dipersyaratkan pada POJK dan SE OJK.

**) Yang dimaksud dengan perubahan mendasar antara lain perubahan terhadap konfigurasi Teknologi Informasi atau Aplikasi Inti Perbankan, pengadaan Aplikasi Inti Perbankan, kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi, serta pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR.

***) Keterangan harus disertai dengan informasi lebih lanjut antara lain berupa alasan dilakukannya perubahan mendasar dan teknis perubahan mendasar yang dilakukan oleh BPR. Disertai dengan lampiran dokumen.

BAB II
LAPORAN KEJADIAN KRITIS, PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU KEJAHATAN
DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI *)

Nama BPR : BPR Nusamba Brondong
Alamat Kantor Pusat BPR : Jalan Raya No. 77 Brondong, Lamongan
Nomor Telepon : 0322-661688
Nama Penanggungjawab : Ahmad Syuja', SE
Jabatan Penanggungjawab : Kepala Kantor Pusat Operasional
Tanggal Laporan : 29 Desember 2025

1. Tanggal Kejadian : -

2. Kronologis dan evaluasi penyebab kejadian

☐	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

3. Terdapat unsur kesengajaan

☐	Ya	Tidak	☐
--------------------------	----	-------	--------------------------

4. Satuan kerja terkait atau pegawai yang dapat dihubungi lebih lanjut:

.....

5. Dampak/akibat yang ditimbulkan

a. Kerugian keuangan signifikan

☐	Ya	Tidak	☐
--------------------------	----	-------	--------------------------

b. Gangguan operasional

☐	Ya	Tidak	☐
--------------------------	----	-------	--------------------------

Jika jawaban "Ya", lampirkan bentuk gangguan operasional yang terjadi dan *contingency plan* yang telah diterapkan.

c. Tidak terjaminnya kerahasiaan dan integritas data

☐	Ya	Tidak	☐
--------------------------	----	-------	--------------------------

Jika jawaban "Ya", lampirkan bentuk ancaman terhadap kerahasiaan dan integritas data.

6. Rencana tindak lanjut BPR

☐	Terlampir	Tidak Terlampir	☐
--------------------------	-----------	-----------------	--------------------------

BAB III
LAPORAN REALISASI KERJA SAMA DENGAN
PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : BPR Nusamba Brondong
Alamat Kantor Pusat BPR : Jalan Raya No. 77 Brondong, Lamongan
Nomor Telepon : 0322-661688
Nama Penanggungjawab : Ahmad Syuja', SE
Jabatan Penanggungjawab : Kepala Kantor Pusat Operasional
Tanggal Laporan : 29 Desember 2025

1. Tanggal mulai implementasi kerja sama Teknologi Informasi BPR : 01 April 2014

2. Uraikan nama dan alamat penyedia jasa Teknologi Informasi

Nama : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Alamat : Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133
Lokasi Pusat Data : Surabaya Jawa Timur
Lokasi Pemulihan Bencana : Gedung Telkomsigma – BSD – Banten

3. Daftar jasa Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

4. Nilai nominal perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

5. Jangka waktu perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

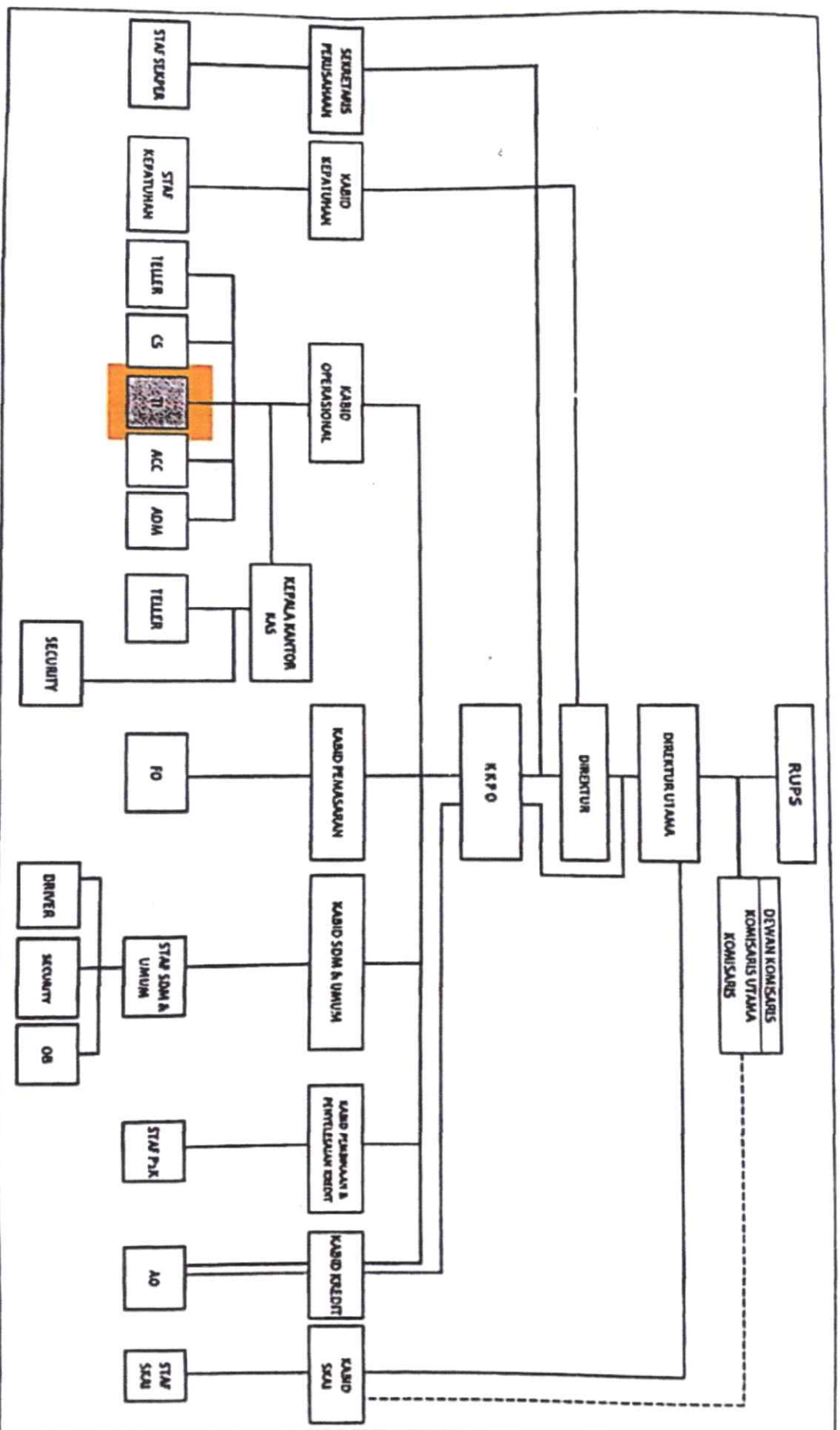
✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

6. Fotocopy perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

✓	Terlampir	Tidak Terlampir	
---	-----------	-----------------	--

Lampiran-Lampiran

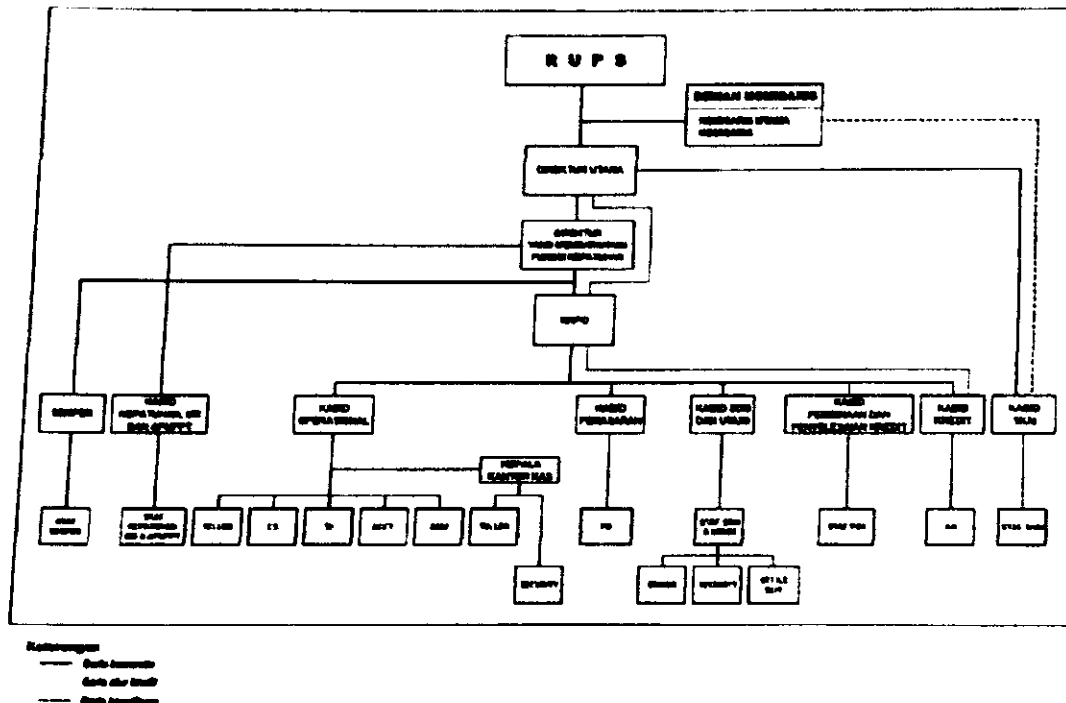
Lampiran I.A.1. Struktur Organisasi



Lampiran I.A.2. Job Description

JOB DESCRIPTION URAIAN PEKERJAAN

- ❖ NAMA JABATAN : TEKNOLOGI DAN INFORMASI (TI)
- ❖ FUNGSI JABATAN : Mengelola terlaksananya pelayanan dan pelaporan seluruh informasi dan Teknologi BPR secara optimal.
- ❖ KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI



TANGGUNG JAWAB

1. Mengelola, merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi system informasi dan pengolahan data elektronik dan Pengembangan Teknologi.
2. Memastikan teknologi diakses dan dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak berikut kegiatan utama masalah hardware, software, dan system operasi jaringan.
3. Memonitor dan memelihara teknologi untuk optimalisasi system informasi manajemen khususnya core banking dapat berjalan dengan baik.
4. Menyediakan akses jaringan untuk semua bagian.
5. Menyediakan account jaringan dan password sesuai kebutuhan.
6. Terlaksananya data dan informasi yang disampaikan dalam laporan System Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
7. Menjaga dan bertanggungjawab atas kerahasiaan password dan user-id masing-masing.
8. Terlaksananya pelaporan seluruh informasi debitur kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
9. Pengelolaan Website, multimedia Perusahaan.
10. Melaksanakan penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud.

Lampiran I.A.2. Job Description

TUGAS

1. Install, perbaikan, pemeliharaan, semua peralatan computer termasuk PC, printer, dan peripheral lainnya dalam rangka pengembangan Teknologi.
2. Membantu pengguna dalam mempelajari pengoperasian peralatan computer dan perangkat lunak
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada setiap unit alat kerja (computer).
4. Memeriksa dan menjaga koneksi jaringan.
5. Memantau penanganan Back Up file untuk database server utama.
6. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan SLIK yang meliputi aspek-aspek Aplikasi SLIK, Multiuser, User ID dan Password, Teknis permintaan DIN, Teknis pengiriman laporan, Gagal posting, ketentuan pengiriman form, IDI, Jaringan data master, teguran dan lain-lain.
7. Mengajukan permohonan dan menerima informasi dari Bank Indonesia.
8. Menggunakan informasi debitur yang diterima hanya dapat digunakan untuk keperluan pelapor dalam rangka kelancaran proses pemberian kredit, penerapan manajemen resiko dan identifikasi kualitas debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
9. Informasi debitur tidak diperkenankan untuk digunakan dalam rangka promosi atau penyusunan prospek list calon debitur.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
11. Melakukan verifikasi atas keabsyahan dan kelengkapan laporan debitur yang terkini sebelum disampaikan ke instansi yang berwenang.
12. Melakukan koreksi laporan debitur.
13. Mengakomodasi permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan, sehingga pencapaian tujuan dan manfaat SLIK dapat lebih optimal.
14. Memantau dan menganalisis setiap validasi proses dan mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
15. Melakukan pengkinian, pembaharuan dan pemeliharaan website perusahaan.

WEWENANG

1. Mengusulkan penambahan dan penggantian perangkat kerja (IT) serta jaringan sesuai kebutuhan.
2. Mengembangkan, memonitor, dan memastikan IT telah sejalan dengan organisasi bisnis
3. Meminta berkas permohonan kredit dari Customer Service (Adm. Kredit) yang telah ditandatangani oleh calon debitur dan telah dicatat dalam buku register permohonan kredit.
4. Memastikan adanya identitas terbaru dari debitur (suami-istri) beserta penjamin (suami-istri) apabila menggunakan jaminan atas nama orang lain.
5. Melakukan permintaan data (Request ID) dan mencetak hasilnya sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
6. Mengakses data debitur dan calon debitur untuk kepentingan perusahaan.
7. Menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia tentang kondisi Performance kewajiban debitur.

Lampiran I.A.3 Pelatihan dan/atau sertifikasi di bidang TI

No. CIS/01/XI/2023

ISO 27001:2022
Certificate of completion

This certifies that



PERBARINDO
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia

WAFAUDDIN AMRI

PT BPR NUSAMBA BRONDONG

For completing the "Implementation & Audit Procedure of ISO 27001:2022
Information Security Management System (ISMS) Course"

Jakarta, 20 - 21 November 2023


IRFAN AKBAR, CISA, CISSP

CO - EXECUTIVE



ANJAR PRIANDOYO, PhD, CISA, CISSP

EXECUTIVE



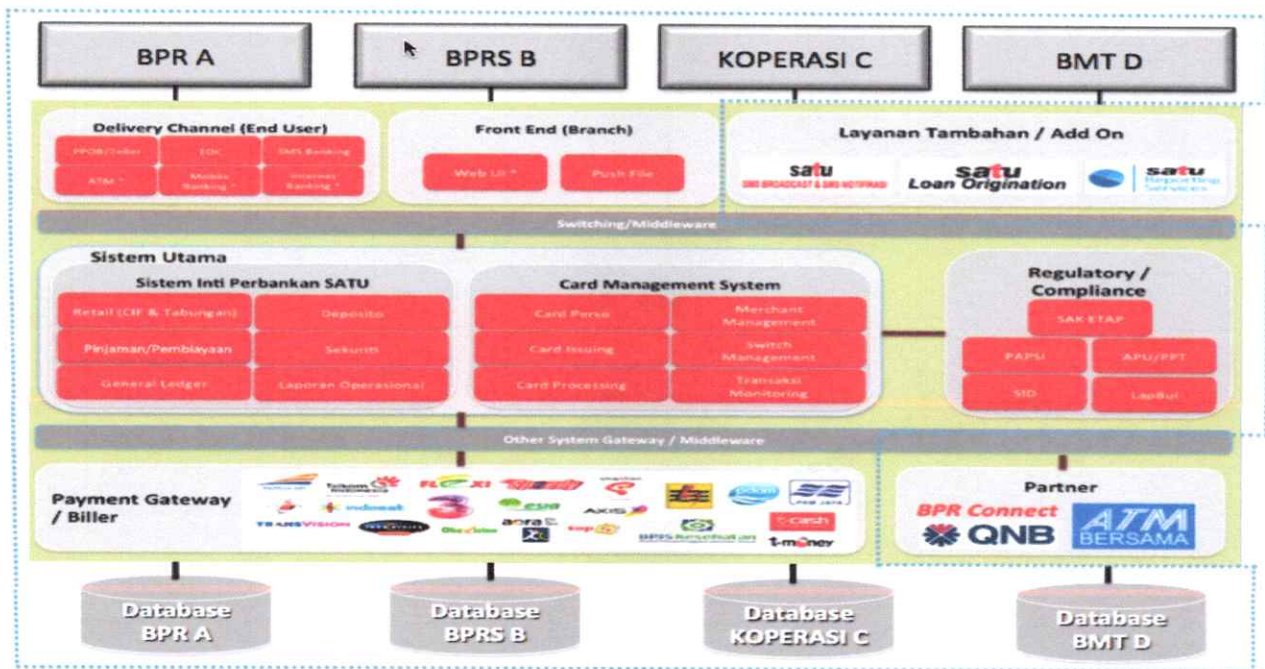
Lampiran I.B.2.b Sistem Elektronik Yang dikembangkan

Daftar sistem elektronik yang sudah diimplementasikan (dikembangkan oleh penyedia jasa TI)

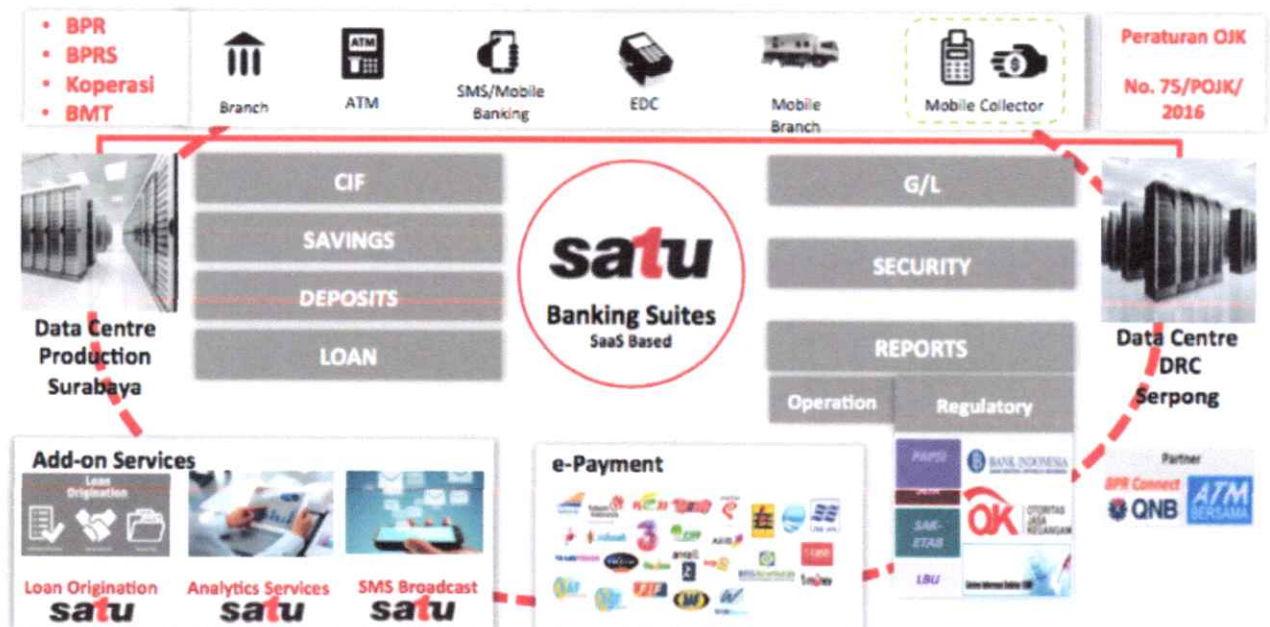
- Infra struktur Data Center dan DRC
- Jaringan komunikasi dari masing-masing kantor ke Data Center
- Core Banking System “Sarana Transaksi Keuangan” (disingkat SATU) yang running di mesin mini IBM AS/400
- Backup data ke media eksternal (Tape) yang disimpan oleh telkomsigma dan dikirim ke customer secara harian
- Delivery Channel meliputi : EDC (untuk skema yang berlangganan) , Billing Payment, ATM (bagi yang sudah memiliki izin Issuer)

Lampiran I.B.3. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur SATU



satu Ecosystem



Lampiran I.B.4.b. Daftar Sistem Elektronik

Daftar sistem elektronik dalam proses pengembangan dan pengadaan (dikembangkan oleh penyedia jasa TI)

- Pengembangan skala menengah ke besar (kompleks) dan regulasi, melalui Road Map sesuai jadwal yang disusun (tahunan) adapun roadmap 2025 yang sudah reales adalah sebagai berikut :

Fitur Core Banking	Modul	BPR
1. Operasional Aplikasi SAK EP (All BPR)	Security	X
2. Penyesuaian POJK No. 1/2024	Loan	X
3. Penyesuaian Struktur Database Laporan Bulanan BPR-BPRS	Reporting	X
4. Restruktur Reguler Grace Periode, Tanpa Buka Tutup	Loan	X
5. Pengembangan TKS	Security	X
6. Pengembangan Reporting / Datawarehouse	Reporting	X
7. Koreksi & Diskon Hapus Buku	Loan	X

- Pengembangan skala kecil/ sederhana dan Error, melalui mekanisme yang diatur SOP Sigma, yang dimaksud dengan Proses pengembangan meliputi kegiatan : Kajian bisnis dan teknis, penentuan cakupan/scope, development, Quality Assurance, SIT, implementasi. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi.
- BPR melaksanakan fungsi manajemen proyek untuk sistem elektronik yang sedang dalam pengembangan dan pengadaan.
- BPR memisahkan lingkungan untuk pengembangan, uji coba, dan operasional.

Lampiran I.C.1.c. Spesifikasi Peladen

Spesifikasi peladen (Server Production & DRC) dan perangkat keras lainnya :

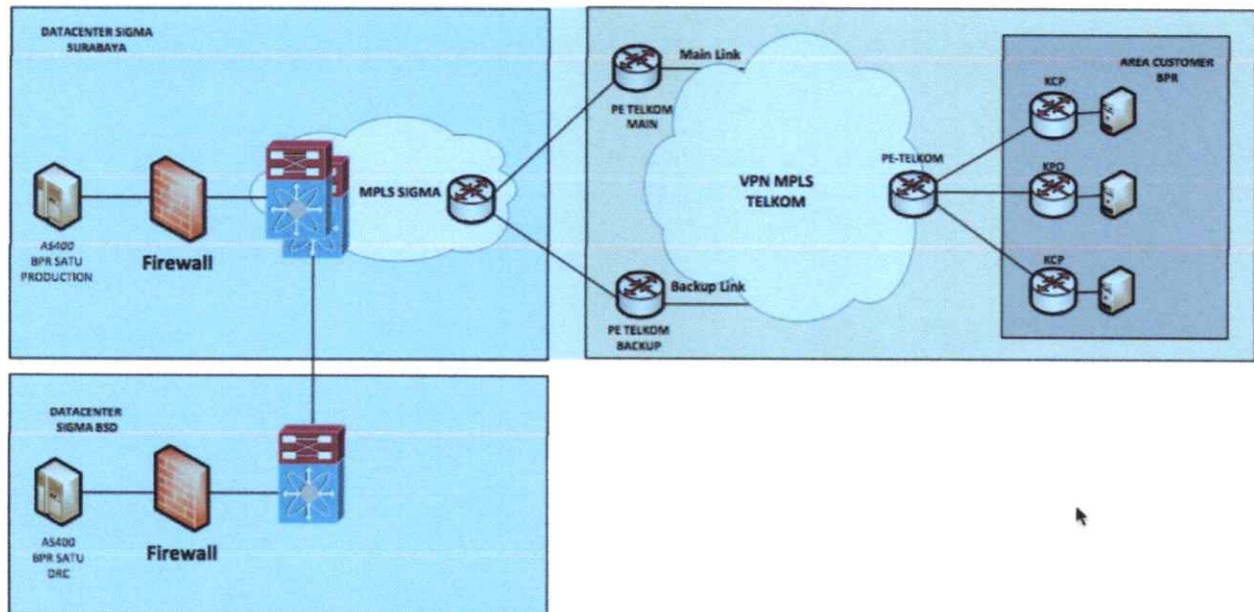
- Mesin IBM AS/400 i-Series Power 5 & 6
- Data Center Production TIER III 2N
- Data Center DRC TIER III 2N
- Core Banking Syatem "SATU" dan Delivery Channel

Lampiran I.C.1.d. Kelengkapan Pengamanan Fisik

Kelengkapan pengamanan fisik pada pusat data :

- Three way access
- CCTV 24 jam
- Security 24 Jam
- Aplikasi VAM (Visitor Access Management)
- Gedung Standart Tier III

Lampiran I.D.1. Topologi Jaringan Komunikasi



Lampiran I.D.3. Daftar Perangkat Keras dan lunak yang digunakan.

Daftar perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk jaringan komunikasi :

- Switch
- Router
- Firewall
- Whatsup-gold (software monitoring)

Lampiran I.F.2.b. Spesifikasi Rekam Jejak.

Spesifikasi rekam cadang peladen dan perangkat keras lainnya :

- Mesin IBM AS/400 i-Series Power 5 & 6
- Data Center Production TIER III 2N
- Data Center DRC TIER III 2N
- Core Banking Syatem "SATU" dan Delivery Channel

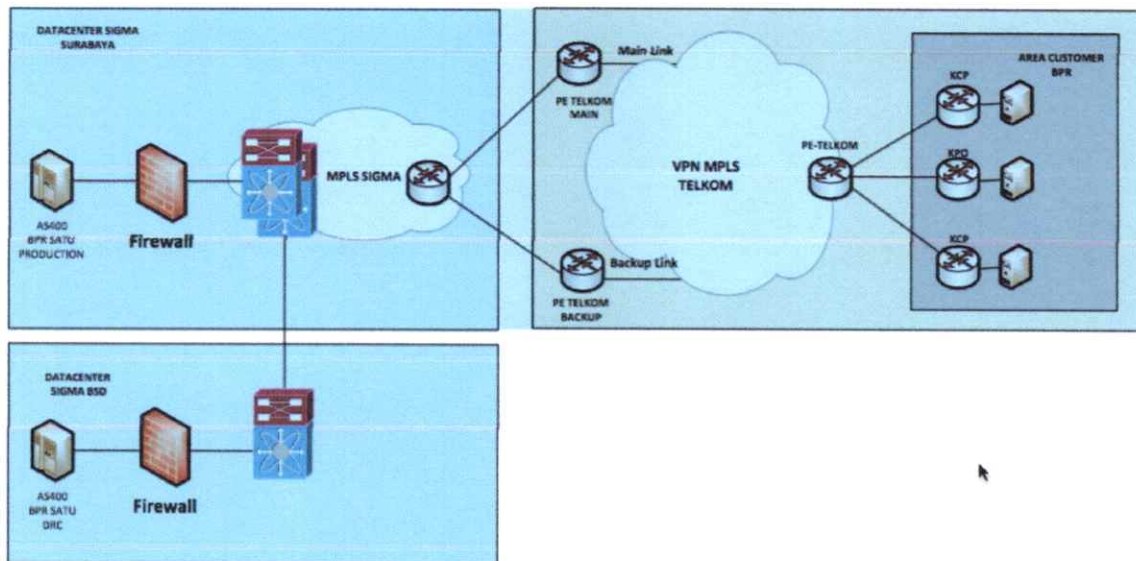
Lampiran I.F.2.c. Kelengkapan Pengamanan Fisik

Kelengkapan pengamanan fisik pada pusat pemulihan bencana :

- Three way access
- CCTV 24 jam
- Security 24 Jam
- Aplikasi VAM (Visitor Access Management)
- Gedung Standart Tier III

Lampiran I.F.2.d. Konfigurasi Pusat Pemulihan Bencana

1) Struktur / topologi jaringan komunikasi data (utama dan rekam cadang) :



2) Kebijakan dan prosedur pengamanan jaringan komunikasi :

- Menggunakan jaringan komunikasi yang aman dan dedicated (VPN-IP dan VSAT)
- Pemantauan koneksi jaringan antara data center ke BPR dilakukan selama 24 x 7 oleh team monitoring Sigma

3) Daftar perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk jaringan komunikasi :

- Switch
- Router
- Firewall
- Whatsup-gold (software monitoring)

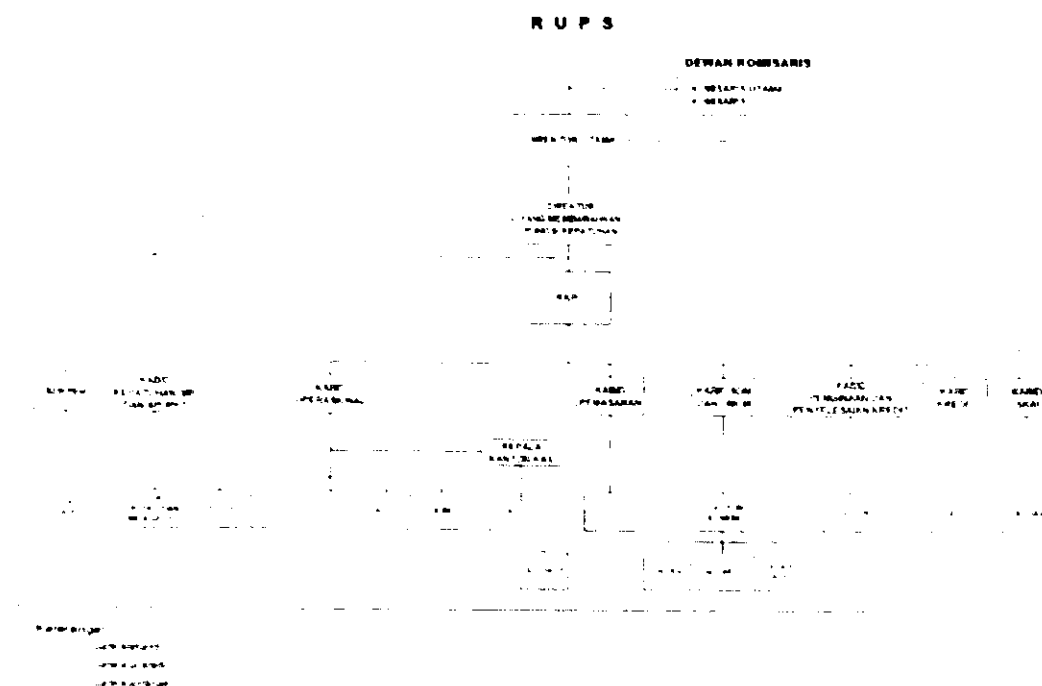
4) Kebijakan dan prosedur untuk mengatur pengamanan jaringan komunikasi data (misal Firewall) :

- Firewall operational di lakukan oleh team network Sigma
- Maintenance firewall dilakukan setiap 3 bulan
- Monitoring firewall dilakukan oleh team service desk Sigma

Lampiran I.G.1. Organ Pelaksana Fungsi Audit Intern

JOB DESCRIPTION
URATAN PEKERJAAN

- ❖ **NAMA JABATAN** : KEPALA BIDANG SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL
- ❖ **FUNGSI JABATAN** : Melaksanakan Koordinasi dan Supervisi kegiatan pengawasan Operasional Bank secara Optimal.
- ❖ **KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI**



➤ TANGGUNG JAWAB

1. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan baik secara on site maupun off site
2. Menjaminnya semua aktivitas perusahaan baik bidang operasional, kredit maupun pemasaran sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku
3. Memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu pengamanan dana masyarakat dan Asset BPR, kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumberdaya secara ekonomis dan efisien, kebenaran dan keutuhan informasi dan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan
4. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
5. Monitoring dan kontroling terhadap seluruh kegiatan staf Internal Audit
6. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud diseluruh bagian
7. Melakukan Pencegahan, Deteksi dan Investigasi terhadap Fraud

➤ TUGAS

- 1 Mengkoordinir Pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Staff Pengawasan
- 2 Memastikan bahwa seluruh bagian Internal Audit telah mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Ketentuan yang berlaku
- 3 Pengawasan atas penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT)
- 4 Melaporkan dengan segera kepada Direksi terhadap transaksi-transaksi nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi, atau nasabah yang mempunyai transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction)
- 5 Pengawasan atas penerapan Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat oleh Direksi
- 6 Memastikan Pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Staff Pengawasan telah dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur bidang Pengawasan
- 7 Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris setiap bulan dan Semesteran
- 8 Menilai Prestasi Kerja Staff Pengawasan
- 9 Merekomendasikan penempatan Staff Pengawasan
- 10 Memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen benar dan akurat
- 11 Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik auditor melalui seminar, kursus dan pendidikan lanjutan lainnya
- 12 Mengikuti perkembangan produk-produk baru dari perbankan
- 13 Memantau tindak lanjut hasil audit, analisis kecukupan tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut
- 14 Memeriksa catatan - catatan administrative (buku register) bank
- 15 Melakukan On The Spot dan sampling terhadap nasabah baik kredit maupun dana
- 16 Melakukan On The Spot ke kantor cabang maupun kantor kas
- 17 Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Bank, melakukan review terhadap cara pengamanan aset Bank, menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas dalam pelaksanaan Good Corporate Governance
- 18 Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Bank
- 19 Mengawasi dan mengevaluasi terhadap keamanan dan ketertiban Bank serta melakukan pemeriksaan secara berkala atas semua unit kerja yang ada dalam organisasi
- 20 Mengadakan pemeriksaan terhadap agunan yang diterima Bank
- 21 Melaporkan hasil audit dan karyawan lainnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
- 22 Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh Direksi
- 23 Membuat rencana pemeriksaan berkala terhadap penerapan manajemen risiko secara menyeluruh baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang Kantor Kas yang dituangkan dalam program pemeriksaan SKAI
- 24 Melakukan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern penerapan manajemen risiko secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan BPR
- 25 Pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh SKAI bersifat independen dengan tingkat integritas yang tinggi serta tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terafiliasi lainnya sehingga hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan SKAI benar-benar sesuai dengan prinsip dasar penerapan manajemen risiko

26. Memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.

➤ **WEWENANG**

1. Melakukan pemeriksaan terhadap semua catatan perusahaan, harta dan hutang hutang Perusahaan.
2. Memasuki semua bagian dan unit kerja untuk melakukan pemeriksaan.
3. Melakukan berbagai teknik pemeriksaan seperti melakukan konfirmasi dengan pihak luar dan mencari data dari luar perusahaan.
4. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan dibidang operasional , kredit, pemasaran, sumber daya manusia, kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Lampiran I.H.3. Daftar Jasa Teknologi Informasi

Daftar jasa teknologi informasi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa TI :

- Infrastruktur berikut mesin Produksi dan DRC
- Cadangan catu daya Genset dan UPS
- Jaringan komunikasi VPN IP dan VSAT
- Aplikasi Core Banking
- Aplikasi Delivery Channel ATM (bagi yang memiliki ijin issuer) , EDC, SMS Banking

Lampiran I.H.5. Salinan Perjanjian Kerjasama

**PERJANJIAN
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN SATU NET (SARANA TRANSAKSI KEUANGAN)
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
&
DENGAN
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA BRONDONG**

=====

Nomor : K.TEL.129E/HK.820/DR3-10000000/2024

Nomor : 724 / BRD / DR / XI / 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-04-2024), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian tentang Penyediaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), oleh dan antara :

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk., NPWP : 01.000.013.1-093.000**, sebuah perusahaan penyedia jasa digital business domain yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital services, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 24 September 1991, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana keputusannya Nomor C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 22 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0131356 tanggal 23 Juni 2023, berkantor pusat di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **SAIFUL HIDAJAT** jabatan **EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL III**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**.
- II. **PT BPR NUSAMBA BRONDONG, NPWP : 01.235.194.6-641.000**, suatu perseroan yang bergerak di bidang perbankan yang didirikan serta tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Raya Brondong No. 77 Lamongan Jawa Timur, yang didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor 111 tanggal 29 September 1989, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: C2-10272 HT.01.01-TH.89 tanggal 8 Nopember 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA BRONDONG Nomor: 10 tanggal 27 Maret 2024 dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09.0125391 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Fitri Budiani, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian, Notaris di Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **BAMBANG EDY YUWONO**, Sarjana Ekonomi, selaku **DIREKTUR UTAMA**, selanjutnya disebut sebagai **BPR**.

Bahwa, TELKOM dan BPR secara sendiri-sendiri dapat juga disebut sebagai "PIHAK", dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TELKOM adalah Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak dan menjalankan usahanya di bidang penyediaan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dikenal dengan nama *digital business domain*, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu, *digital connectivity*, *digital platform* dan *digital services*.
2. Bahwa BPR perusahaan umum yang bergerak di bidang perbankan yang membutuhkan layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) dari TELKOM untuk menunjang pelaksanaan bidang usaha BPR.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani dokumen Perjanjian Nomor: K.TEL.1714/HK.810/DBS-OJ200000/2021 Tanggal 14 September 2021, yang kemudian diubah melalui Amandemen Perjanjian Nomor: K.TEL.625/HK.820/DBS-OJ000000/2022 tanggal 30 Maret 2022 Tentang Penyediaan Layanan SATU NET, yang berlaku sampai tanggal 31 Maret 2024 ("Perjanjian Awal")
4. Bahwa PT Sentra Modal Harmoni yang merupakan holding company dari BPR telah mengirimkan kepada TELKOM Surat Nomor: 048/SMH/DIR/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Kontrak Layanan Satu Net dan VPN IP Net BPR Nusamba dan Mitra Harmoni Group.
5. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Penyediaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama baru sebagaimana tertuang dalam Minutes of Meeting nomor: Tel.203/UM 000/R3W-F0100000/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Perpanjangan Kerja Sama Layanan Satu Net Full Service di BPR Nusamba Brondong.

Maka, berdasarkan latar belakang keadaan yang telah dikemukakan di atas, PARA PIHAK selanjutnya menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri di dalam PERJANJIAN ini, menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN DEFINISI

Setiap istilah yang dituliskan dengan huruf kapital, yang terdapat di dalam PERJANJIAN ini, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam ketentuan lain di dalam PERJANJIAN ini, harus diartikan atau didefinisikan sebagai berikut:

1. **PERJANJIAN**
Adalah, perjanjian ini berserta setiap dan semua lampirannya, yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. **LAMPIRAN**
Adalah, setiap dan semua berkas atau dokumen yang disebutkan dan dilampirkan di dalam PERJANJIAN ini, yang akan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.
3. **PEKERJAAN**
Adalah, serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh TELKOM untuk kepentingan BPR, yang meliputi Penyediaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan), sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 PERJANJIAN ini.
4. **LOKASI PEKERJAAN**
Adalah, tempat atau wilayah hukum yang dimiliki dan dikelola oleh BPR, dimana PEKERJAAN akan dilaksanakan, diselesaikan, diserahkan, dan diawasi oleh TELKOM sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 PERJANJIAN ini.

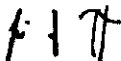
5. **BIAYA LAIN**
Adalah, setiap dan semua biaya dan ongkos yang harus dikeluarkan, baik yang sudah ditentukan di dalam PERJANJIAN ini maupun yang mungkin timbul dari waktu ke waktu selama berlakunya PERJANJIAN ini, sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 PERJANJIAN ini.
6. **BIAYA LAYANAN**
Adalah sejumlah nilai yang dibayarkan oleh BPR kepada TELKOM atas PEKERJAAN yang disediakan oleh TELKOM, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 PERJANJIAN ini.
7. **KORESPONDENSI**
Adalah, setiap dan semua komunikasi tertulis antara PARA PIHAK, dalam bentuk surat-menyurat, termasuk namun tidak terbatas pada surat elektronik/surel (email), untuk menyampaikan informasi dan/atau permintaan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini.
8. **SURAT TAGIHAN**
Adalah, surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili kepentingan TELKOM, ditujukan kepada BPR, yang berisikan tagihan atas pembayaran sejumlah **BIAYA LAYANAN** dan/atau **BIAYA LAIN**, dengan menyebutkan nilai tagihan, penjelasan dan dasar tagihan, batas waktu pembayaran tagihan dan data rekening yang ditentukan untuk pelaksanaan pembayaran nilai tagihan dimaksud.
9. **SURAT TEGURAN**
Adalah, surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya, yang pada pokoknya berisikan teguran agar PIHAK lainnya dimaksud melaksanakan sebagian maupun seluruh kewajibannya yang telah tertunggak atau lewat jatuh tempo menurut PERJANJIAN ini.
10. **APLIKASI**
Adalah, layanan aplikasi inti yang terdapat dalam Penyediaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) dan menjadi bagian dari lingkup pada PERJANJIAN ini.
11. **HARI KERJA**
Adalah, hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap minggu kecuali hari libur nasional.
12. **INSTANSI BERWENANG**
Adalah Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta instansi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan usaha transaksi keuangan di Indonesia.
13. **JAM KERJA**
Adalah waktu kerja operasional BPR pada Hari Kerja, yaitu dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 WIB.
14. **PENYEDIAAN LAYANAN SATU NET (SARANA TRANSAKSI KEUANGAN)**
Adalah, seluruh layanan yang disediakan oleh TELKOM sebagaimana diuraikan pada dokumen Detail Layanan yang terdiri dari layanan inti dan layanan tambahan.
15. **NASABAH**
Adalah, orang dan/atau lembaga yang menggunakan jasa keuangan dari BPR.
16. **SERVICE LEVEL GUARANTEE**
Adalah, tingkat layanan pelaksanaan masing-masing layanan dalam Layanan SATU NET (Sarana

Transaksi Keuangan).

17. **STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)**
Adalah, pedoman pengoperasian Aplikasi yang merupakan bagian dari Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan).
18. **TANGGAL MULAI**
Adalah, tanggal layanan ini diperpanjang ditandai dengan ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh Para Pihak.
19. **BERITA ACARA SIAP OPERASI (BASO)**
Adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa PEKERJAAN sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PERJANJIAN ini siap digunakan dan telah sesuai Ruang Lingkup yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini serta dapat diterima oleh BPR. Berita Acara Siap Operasi (BASO) ini ditandatangani oleh BPR c.q. Direktur Utama dan TELKOM c.q. Manager Witel Business Service. BASO dapat dilampirkan dengan Berita Acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN yang akan ditandatangani oleh TELKOM c.q. Manager Witel Business Service dan BPR c.q. Direktur Utama.
20. **TELKOM GROUP**
Adalah kumpulan entitas bisnis TELKOM secara *group* yang terdiri dari entitas TELKOM beserta seluruh anak perusahaan (*subsidiary*) dan afiliasi yang dimiliki oleh TELKOM.
21. **SOURCE CODE**
Adalah teks atau kumpulan instruksi yang ditulis oleh *programmer* menggunakan bahasa pemrograman, menjadi dasar untuk menghasilkan program komputer atau aplikasi.
22. **ESCROW AGENT**
Adalah pihak ketiga yang independen yang ditunjuk dan bertindak sebagai pemelihara atau wali untuk menyimpan *source code*.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Ruang Lingkup dalam PERJANJIAN ini adalah Penyediaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) oleh TELKOM kepada BPR, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Layanan Inti, dengan ruang lingkup dan pengaturan sebagaimana diuraikan dalam LAMPIRAN I PERJANJIAN ini; yang mulai beroperasi setelah ditandatanganinya Berita Acara Siap Operasi;
 - b. Layanan Tambahan, dengan ruang lingkup dan pengaturan sebagaimana diuraikan dalam LAMPIRAN I PERJANJIAN ini, di mana setiap Layanan tambahan beroperasi setelah ditandatanganinya Berita Acara Siap Operasi.
- (2) Setiap penambahan dan pengurangan atas setiap maupun seluruh ruang lingkup PEKERJAAN, yang harus dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan dari waktu ke waktu, selama berlakunya PERJANJIAN ini, hanya dapat diberlakukan dan mengikat bagi PARA PIHAK, apabila didasarkan pada kesepakatan tertulis tersendiri terlebih dahulu yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Atas kesepakatan tertulis tersebut akan dijadikan sebagai dasar perubahan PERJANJIAN sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 PERJANJIAN ini atau suatu PERJANJIAN tersendiri.

TELKOM: 

BPR: 

- (3) Pelaksanaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) sebagaimana dimaksud PERJANJIAN ini dilaksanakan dari pusat operasi (*Data Center*) milik TELKOM Group yang dilengkapi dengan *system Cadangan hot mirror (Disaster Recovery Centre)* yang teruji dan memadai.

Pasal 3 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PEKERJAAN akan dilaksanakan oleh TELKOM di LOKASI PEKERJAAN menurut ketentuan dan persyaratan yang diuraikan dalam PERJANJIAN ini.
- (2) Pelaksanaan setiap tahapan PEKERJAAN, serta penyerahan hasil PEKERJAAN, akan dilakukan oleh TELKOM kepada BPR, pada batas waktu, dan sesuai dengan spesifikasi, kriteria, serta kualitas yang telah ditentukan di dalam PERJANJIAN ini.
- (3) Penyelesaian dan penyerahan hasil PEKERJAAN dibuktikan dengan adanya dokumen BASO, dengan format dokumen yang telah ditentukan di dalam LAMPIRAN III.
- (4) Masing-masing PIHAK akan menunjuk dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang satu dan lainnya tentang identitas pejabat yang berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama masing-masing PIHAK, dalam pelaksanaan setiap dan seluruh tahapan PEKERJAAN, termasuk dalam mengatasi, mengambil kebijakan dan keputusan atas setiap keadaan dan/atau permasalahan yang dihadapi dan/atau terjadi di LOKASI PEKERJAAN. Pemberitahuan tertulis dimaksud pada ayat ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili masing-masing PIHAK menurut PERJANJIAN ini, dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (5) Para pejabat dari PARA PIHAK dimaksud pada ayat 4 Pasal ini akan selalu melakukan koordinasi secara berkala, baik melalui rapat koordinasi maupun melalui korespondensi, selama berlangsungnya pelaksanaan tahapan PEKERJAAN, pada setiap saat dibutuhkan dari waktu ke waktu selama berlakunya PERJANJIAN ini.
- (6) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus didokumentasikan dalam bentuk berita acara rapat koordinasi dan/atau berita acara rapat kerja dan/atau berita acara atas pelaksanaan kegiatan lainnya, yang harus dibuat dan ditandatangani oleh para pejabat dari masing-masing PIHAK yang berwenang menurut ayat 4 Pasal ini.
- (7) BPR akan memberitahukan atau menyerahkan keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan kepada TELKOM bagi kelancaran pelaksanaan PEKERJAAN.

Pasal 4 LOKASI PEKERJAAN

- (1) PEKERJAAN dilaksanakan oleh TELKOM di LOKASI PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN II PERJANJIAN ini.
- (2) Dalam hal BPR membutuhkan perubahan data lokasi instalasi layanan tanpa perubahan fisik layanan, perubahan lokasi instalasi atau relokasi alamat (pindah alamat), maka dapat mengajukan kepada TELKOM melalui surat permintaan, yang kemudian kesepakatan perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. Account Manager dan BPR Nusamba Brondong c.q. Direktur Utama dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V PERJANJIAN ini.

Berita Acara Kesepakatan tersebut menjadi satu kesatuan dengan PERJANJIAN ini. Sedangkan untuk perubahan lain yang mengandung perubahan fisik layanan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan layanan, perubahan perangkat atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam Amandemen yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (3) Apabila dalam hal melaksanakan Pekerjaan sebagaimana tercantum pada ayat (2) Pasal ini menimbulkan suatu biaya diluar BIAYA sebagaimana tercantum pada Pasal 7 PERJANJIAN ini, maka TELKOM berhak untuk mengajukan tagihan terhadap biaya yang muncul tersebut kepada BPR.

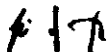
Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN BPR

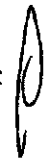
- (1) Di samping hak - hak yang diatur dalam pasal lain PERJANJIAN ini, hal - hal berikut menjadi Hak BPR, yaitu :
- a. BPR berhak mendapatkan dan memanfaatkan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) yang disediakan oleh TELKOM.
 - b. BPR berhak melakukan peninjauan dan dilibatkan dari waktu ke waktu dalam proses pelaksanaan PEKERJAAN, sejak awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan penyelesaian PEKERJAAN, termasuk dalam pelaksanaan proses pengelolaan dan pengawasan atas Pemanfaatan penyediaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) yang dilakukan oleh TELKOM.
 - c. BPR berhak mendapatkan informasi atas segala pemeliharaan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) yang berdampak pada penggunaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) berdasarkan PERJANJIAN ini.
 - d. BPR berhak menerima laporan tertulis TELKOM tentang perkembangan pelaksanaan PEKERJAAN menurut PERJANJIAN ini.
 - e. BPR berhak mendapatkan jaminan dari TELKOM, bahwa pelaksanaan penyediaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) berdasarkan PERJANJIAN ini akan selalu berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 PERJANJIAN ini.
 - f. BPR berhak mendapatkan dukungan teknis terkait Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) ketika terjadi kendala teknis.
 - g. BPR berhak pemeriksaan hasil konversi data yang telah dilakukan oleh TELKOM.
 - h. Selama masa berlaku Kontrak, BPR berhak untuk melakukan 1 (satu) kali uji coba terhadap Rencana Pemulihan Bencana dan 1 (satu) kali kaji ulang terhadap Rencana Pemulihan Bencana.
- (2) Di samping kewajiban - kewajiban yang diatur dalam pasal lain PERJANJIAN ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban BPR, yaitu:
- a. BPR wajib melaksanakan pembayaran BIAYA LAYANAN dan/atau BIAYA LAIN kepada TELKOM atas penyediaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan), sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 7 PERJANJIAN ini.
 - b. BPR wajib memberikan ijin kepada TELKOM untuk masuk dan melaksanakan PEKERJAAN di LOKASI PEKERJAAN, serta untuk mendapatkan informasi dan penjelasan atas hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan setiap dan semua tahapan PEKERJAAN.

- c. BPR wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan lingkup PERJANJIAN ini yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan informasi.
- d. BPR wajib menjaga kerahasiaan informasi dan nama baik TELKOM.
- e. BPR wajib menyediakan perangkat dan infrastruktur untuk mendukung layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) pada kantor-kantor BPR.
- f. BPR wajib mengupayakan sosialisasi atau menjelaskan kepada pihak-pihak terkait mengenai penggunaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) dalam menunjang kegiatan usaha BPR.
- g. BPR wajib memberikan akses selama 7 x 24 jam kepada TELKOM atau pihak lain yang bekerja sama dengan TELKOM dalam pelaksanaan PEKERJAAN dan kegiatan lainnya yang diperlukan dan/atau dianggap perlu oleh TELKOM sehubungan dengan pelaksanaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) di LOKASI PEKERJAAN.
- h. BPR wajib menandatangani BASO atas hasil PEKERJAAN yang dilaksanakan TELKOM seketika setelah PEKERJAAN dinyatakan telah selesai.
- i. BPR wajib memberikan jaminan dan pernyataan tertulis kepada TELKOM bahwa peruntukkan atau pemanfaatan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) di LOKASI PEKERJAAN, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar hak pihak lainnya.
- j. BPR wajib menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan menurut PERJANJIAN ini, secara lisan maupun tertulis kepada TELKOM terhitung sejak dimulainya pelaksanaan PEKERJAAN oleh TELKOM menurut PERJANJIAN ini.
- k. BPR wajib melakukan evaluasi bersama-sama dengan TELKOM atas pelaksanaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan), setelah PERJANJIAN ini berakhir.
- l. BPR wajib mendapatkan izin seperlunya dari INSTANSI BERWENANG yang dibutuhkan untuk penggunaan jasa-jasa yang dimaksudkan dalam PERJANJIAN ini.
- m. BPR wajib untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) kepada pihak manapun lainnya kecuali Instansi Berwenang atau auditor yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan audit untuk kepentingan BPR.
- n. BPR wajib menjaga keamanan, agar tidak terjadi kebocoran data pada media komunikasi disisi kantor-kantor BPR.
- o. BPR wajib bertanggung jawab atas penginputan transaksi yang kurang sempurna maupun penyalahgunaan sistem pengamanan data dan user oleh karyawan BPR.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN TELKOM

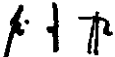
- (1) Di samping hak-hak yang diatur dalam pasal lain PERJANJIAN ini, hal-hal berikut menjadi Hak TELKOM, yaitu :
 - a. TELKOM berhak dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan dalam pelaksanaan PEKERJAAN, menerima dari BPR, setiap dan seluruh data tentang BPR dari waktu ke waktu selama berlakunya PERJANJIAN ini.
 - b. TELKOM berhak menerima pembayaran BIAYA LAYANAN dan BIAYA LAIN dari BPR atas penggunaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) secara penuh dan tepat waktu yang dilakukan oleh TELKOM di LOKASI PEKERJAAN, sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 7 PERJANJIAN ini.

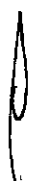
TELKOM: 

BPR: 

- c. TELKOM berhak mendapatkan pemberitahuan melalui surat dari BPR apabila adanya tindakan aksi perusahaan (*corporate action*) yang dilakukan oleh BPR yang dapat mempengaruhi segala kewajiban pembayarannya kepada TELKOM.
 - d. TELKOM berhak mendapatkan ijin dari BPR untuk masuk dan melaksanakan PEKERJAAN di LOKASI PEKERJAAN, serta untuk mendapatkan informasi dan penjelasan atas hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan setiap dan semua tahapan PEKERJAAN.
 - e. TELKOM berhak mendapatkan informasi dan jaminan serta pernyataan tertulis dari BPR bahwa pemanfaatan jasa pelayanan yang dilakukan oleh BPR terhadap pelanggan BPR berdasarkan PERJANJIAN ini, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar hak pihak lainnya, di wilayah hukum LOKASI PEKERJAAN.
 - f. TELKOM berhak untuk melakukan pengembangan fitur dan fasilitas serta perubahan pada lingkup Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) dari waktu ke waktu, sesuai dengan *roadmap* pengembangan yang direncanakan oleh TELKOM GROUP.
 - g. TELKOM berhak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak lain tidak mempunyai akses langsung maupun tidak langsung atas transaksi, perubahan, penambahan, penghapusan *database* di perangkat keras utama.
 - h. TELKOM berhak mengajukan kepada BPR untuk menandatangani BASO dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan PEKERJAAN yang telah dilakukan dan diserahkan oleh TELKOM kepada BPR.
 - i. TELKOM berhak melakukan tindakan deaktivasi terhadap Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) yang digunakan BPR, apabila BPR gagal membayar kewajiban pembayaran dimaksud PERJANJIAN ini dan/ atau apabila BPR melanggar salah satu atau beberapa ketentuan PERJANJIAN ini.
 - j. TELKOM berhak melakukan monitoring data Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) untuk kepentingan PEKERJAAN.
 - k. TELKOM berhak melakukan penghentian atau penonaktifan untuk waktu tertentu atas PEKERJAAN yang sedang berlangsung, tanpa memerlukan persetujuan BPR terlebih dahulu, apabila TELKOM menemukan indikasi bahwa BPR melakukan kegiatan yang berpotensi mengganggu kualitas pelayanan telekomunikasi secara nasional dan/atau yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada penyebaran perangkat lunak yang dibuat untuk memasuki dan merusak system computer (*malware*), seperti virus, *worm*, *trojan*, *spam*, pembajakan atau *hacking*, dan yang sejenisnya.
 - l. TELKOM berhak melakukan konversi data berdasarkan data yang diberikan oleh BPR.
- (2) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban TELKOM, yaitu :
- a. TELKOM wajib menyediakan dan melaksanakan instalasi Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) kepada BPR di LOKASI PEKERJAAN sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur di dalam PERJANJIAN ini.
 - b. TELKOM wajib menjamin kualitas Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) sesuai dengan SLG yang dimaksud di dalam Pasal 10 PERJANJIAN ini.
 - c. TELKOM wajib melakukan pengawasan dan pemeliharaan atas pemanfaatan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan), menurut tata cara dan ketentuan yang diatur di dalam PERJANJIAN ini.

- d. TELKOM wajib membuat dan memberikan laporan kepada BPR atas pelaksanaan PEKERJAAN pada akhir jangka waktu PERJANJIAN ini.
- e. TELKOM wajib menjaga agar Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) berdasarkan PERJANJIAN ini berfungsi baik dan dapat digunakan oleh BPR.
- f. TELKOM wajib meminta persetujuan BPR apabila akan memberikan informasi dan data kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan penggunaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) berdasarkan PERJANJIAN ini.
- g. TELKOM wajib menjaga kerahasiaan informasi kecuali ditentukan secara khusus dalam PERJANJIAN ini, dan wajib menjaga nama baik BPR.
- h. TELKOM wajib melaporkan kepada BPR setiap terjadi perkembangan dan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN dan PERJANJIAN ini, secara lisan atau tertulis.
- i. TELKOM wajib memberikan dokumen teknis kepada BPR terkait dengan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) yang diberikan berdasarkan PERJANJIAN ini, yang antara lain alur proses teknologi informasi, petunjuk pelaksanaan (*manual book*), struktur pangkalan data, dan aplikasi bantuan yang bekerja secara interaktif.
- j. TELKOM wajib menjaga agar Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) selalu berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
- k. TELKOM wajib menyediakan akses bagi auditor intern BPR, auditor ekstern yang ditunjuk oleh BPR, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan.
- l. TELKOM wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak lain tidak mempunyai akses langsung maupun tidak langsung atas transaksi, perubahan, penambahan, penghapusan Database di Perangkat Keras Utama.
- m. TELKOM wajib menjaga keamanan akses dan transmisi data, dari dan ke Data Center, DRC dan dalam pemrosesan transaksi.
- n. TELKOM wajib memiliki tenaga ahli yang didukung dengan sertifikat keahlian sesuai dengan keperluan penyelenggaraan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan).
- o. TELKOM wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi Berwenang dalam melaksanakan PERJANJIAN ini, selama hal tersebut tidak menimbulkan biaya yang belum diperhitungkan dalam biaya-biaya dalam PERJANJIAN ini.
- p. TELKOM wajib memberikan perlindungan kepentingan BPR atas source code lisensi Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan), dengan ketentuan berikut:
 - i. Menempatkan dan menitipkan kepada pihak ketiga yang independen untuk menyimpan source code ("Escrow Agent").
 - ii. Segala biaya atas *Escrow Agent* akan ditanggung TELKOMGroup yang disepakati dalam PERJANJIAN terpisah antara *Escrow Agent* dan TELKOMGroup.
 - iii. TELKOM menjamin *source code* yang disimpan di *Escrow Agent* adalah versi terkini. BPR berhak untuk memastikan atau memeriksa bahwa source code ini adalah versi terkini kepada *Escrow Agent* atas biaya sendiri dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada TELKOM.
- q. Apabila karena satu dan lain hal, TELKOM terhenti operasinya dikarenakan sesuatu hal seperti namun tidak terbatas pada, pailit atau hal lainnya BPR berhak mendapatkan *source code* yang tersimpan di *Escrow Agent*.

TELKOM: 

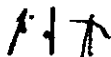
BPR: 

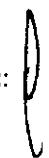
- r. TELKOM wajib memastikan bahwa Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PERJANJIAN ini telah memenuhi standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR/BPRS berdasarkan Peraturan OJK No. 75/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- s. TELKOM wajib melaporkan kepada BPR atas setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau mengganggu kelangsungan operasional BPR.

Pasal 7 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) BIAYA LAYANAN atas Penyediaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) akan dibayarkan BPR kepada TELKOM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya-biaya dalam pelaksanaan Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) oleh TELKOM kepada BPR berdasarkan PERJANJIAN ini adalah sebesar Rp1.312.200.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang mana rinciannya sebagaimana dimaksud pada Lampiran II PERJANJIAN ini.
 - b. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pajak-pajak yang berlaku. Apabila sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, BPR diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan dan menyetorkannya ke Kas Negara, maka BPR akan menyerahkan bukti penyetoran kepada TELKOM.
 - c. Pembayaran akan dilakukan BPR kepada TELKOM paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam surat tagihan (invoice yang dikirimkan oleh TELKOM tanpa pengurangan atau pemotongan apapun kecuali pemotongan untuk Pajak sesuai ayat (1) butir b. Pasal ini.
- (2) Ketentuan mengenai BIAYA LAYANAN sebagaimana diatur dalam Pasal ini adalah bersifat tetap dan tidak berubah selama berlangsungnya masa berlaku PERJANJIAN ini. Perubahan atas BIAYA LAYANAN hanya dapat diubah apabila terdapat kesepakatan tertulis terlebih dahulu antara PARA PIHAK dalam bentuk amandemen yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat PARA PIHAK yang berwenang menurut PERJANJIAN ini, yang selanjutnya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (3) Apabila diperlukan, Para Pihak akan mengadakan peninjauan dan penyesuaian biaya sebagaimana dimaksud PERJANJIAN ini pada setiap awal tahun kalender berdasarkan data inflasi 12 (dua belas) bulan sebelumnya yang diterbitkan Biro Pusat Statistik.
- (4) Setiap dan seluruh BIAYA LAIN yang mungkin timbul dari waktu ke waktu dalam pelaksanaan tahapan PEKERJAAN menurut PERJANJIAN ini, yang perlu dan/atau harus dikeluarkan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan PERJANJIAN ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab BPR sepenuhnya.
- (5) Pembayaran BIAYA LAYANAN sebagaimana dimaksud Pasal ini akan dilakukan oleh BPR kepada TELKOM paling lambat sesuai tanggal jatuh tempo yang diatur dalam surat tagihan (invoice) yang dikirimkan TELKOM, dengan cara transfer ke rekening TELKOM sbb:

Nomor Rekening	: 132.000.455.2841
Atas Nama	: PT.TELKOM UCC BANDUNG
Nama Bank	: Bank Mandiri
Cabang	: Jl.Braga

TELKOM : 

BPR: 

atau *virtual account* yang tercantum di dalam *invoice*. Seluruh biaya yang timbul dari dan berhubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab BPR sendiri.

- (6) BPR mengirimkan bukti pembayaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada TELKOM melalui Nomor GSM : 0 81299910106 atau email : 990113@telkom.co.id, Attn. : Vanessa Rania (Account Manager).
- (7) Apabila BPR terlambat membayar tagihan BIAYA LAYANAN SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan), BPR akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran yang dihitung mulai dari Tanggal Jatuh Tempo pembayaran yang tercantum dalam *invoice* hingga dilakukannya pembayaran tagihan oleh BPR, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh BPR sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, BPR akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran yang jumlahnya ditentukan dalam Perjanjian dan/atau Amandemen dikenakan yaitu sebesar 1 %/∞(satu per-seribu) dari BIAYA LAYANAN sesuai surat tagihan (*invoice*).
 - b. Apabila melewati bulan jatuh tempo BPR belum melakukan pembayaran, maka paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya akan dilakukan deaktivasi atau pemutusan terhadap Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan).
 - c. TELKOM menyerahkan proses penagihan pembayaran atas Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) yang telah digunakan BPR kepada Pihak lain, apabila BPR tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran.
 - d. TELKOM atas keputusannya sendiri dapat melakukan reaktivasi Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) setelah BPR menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan PERJANJIAN ini terhadap TELKOM.
 - e. Apabila BPR tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya termasuk kewajiban pembayaran, TELKOM akan menolak permohonan BPR untuk mendapatkan layanan apapun yang diberikan oleh TELKOM Group.
- (8) Dalam hal BPR memutuskan layanan berdasarkan PERJANJIAN ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu PERJANJIAN selesai, maka BPR wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN ini kepada TELKOM.

Pasal 8 KETENTUAN PERPAJAKAN

- (1) Semua pajak dan bea materai sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini akan menjadi beban dan tanggung jawab dari masing-masing PIHAK, dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bilamana diperlukan oleh salah satu PIHAK atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit, maka masing-masing PIHAK akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN BPR

- (1) BPR menyatakan dan menjamin bahwa setiap dan semua data, keterangan dan dokumen yang disebutkan di dalam PERJANJIAN ini, terkait status hukum perusahaan, data korporasi, bidang dan perijinan usaha BPR yang disebutkan di dalam PERJANJIAN ini, adalah sah dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum.

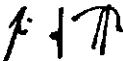
- (2) BPR menyatakan dan menjamin bahwa LAYANAN dan/atau hasil PEKERJAAN menurut PERJANJIAN ini hanya akan dimanfaatkan oleh BPR untuk kepentingan pelaksanaan bidang usaha BPR yang telah disebutkan di dalam PERJANJIAN ini dan tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*traffic illegal*), dan/atau disewakan atau diretailkan dan/atau dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (3) BPR menyatakan bahwa BPR tidak sedang dalam posisi bermasalah secara hukum dengan pihak lain, dalam bentuk apapun, yang berpotensi menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan setiap maupun seluruh tahapan pelaksanaan PEKERJAAN dan/atau tenaga kerja TELKOM dan/atau isi maupun pelaksanaan PERJANJIAN ini.

Pasal 10
JAMINAN TELKOM SERVICE LEVEL GUARANTEE

- (1) TELKOM menjamin tingkat availability Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen).
- (2) Apabila terjadi klaim terhadap kualitas dan performansi Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) dan/ atau TELKOM tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, maka BPR berhak memberi peringatan tertulis kepada TELKOM sampai maksimal 3 (tiga) kali dengan masing-masing diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu.

Pasal 11
JAMINAN HUKUM ATAS LAYANAN SATU NET (SARANA TRANSAKSI KEUANGAN)

- (1) Para Pihak sepakat bahwa terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN ini, TELKOM memberikan hak atas penggunaan Aplikasi yang menjadi bagian dari Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) dengan dasar sebagaimana adanya (*as is*), tidak dapat dialihkan dan tidak bersifat eksklusif dan dapat digunakan selama berlangsungnya PERJANJIAN ini.
- (2) TELKOM menjamin bahwa Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) yang dikerjasamakan berdasarkan PERJANJIAN ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga.
- (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, TELKOM tidak akan melibatkan BPR serta dengan ini TELKOM menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik di luar maupun di dalam Pengadilan atau lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab TELKOM.
- (4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau lembaga hukum lainnya, maka TELKOM menjamin bahwa Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan) tetap dapat dipergunakan oleh BPR.

TELKOM: 

BPR: 

Pasal 12
KEADAAN INGKAR JANJI

- (1) Masing-masing PIHAK akan dinyatakan berada dalam keadaan lalai atau ingkar janji terhadap PIHAK lainnya, apabila TELKOM atau BPR tetap tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam PERJANJIAN ini, selama 7 (tujuh) hari kalender berturut - turut terhitung sejak tanggal PIHAK yang berkepentingan menurut ayat ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keadaan ingkar janji dimaksud di dalam ayat ini.
- (2) Keadaan ingkar janji dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dapat dijadikan alasan dan dasar hukum bagi PIHAK yang berkepentingan untuk mengakhiri PERJANJIAN ini, secara sepihak, sebelum berakhirnya masa berlaku PERJANJIAN ini, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13 PERJANJIAN ini, dengan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya.

Pasal 13
JANGKA WAKTU

- (1) PERJANJIAN ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2027.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK terlebih dahulu, dengan memperhatikan dan memberlakukan ketentuan dimaksud pada Pasal 14 PERJANJIAN ini.

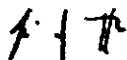
Pasal 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Salah satu PIHAK dalam PERJANJIAN ini dapat mengakhiri atau memutuskan PERJANJIAN ini secara sepihak, apabila salah satu PIHAK lainnya berada dan/atau melakukan salah satu tindakan berikut ini.
 - a. Tidak melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban yang telah ditentukan di dalam PERJANJIAN ini, meskipun telah mendapatkan SURAT TEGURAN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari PIHAK yang berkepentingan.
 - b. Melakukan perbuatan ingkar janji dimaksud pada Pasal 12 PERJANJIAN ini.
 - c. Melakukan pengalihan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban yang telah ditentukan di dalam PERJANJIAN ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam PERJANJIAN ini.
- (2) PIHAK yang akan melakukan pemutusan PERJANJIAN yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, wajib memberikan surat pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal PIHAK yang berkepentingan dimaksud pada ayat ini akan memutuskan PERJANJIAN ini secara sepihak.
- (3) PARA PIHAK dapat melakukan pemutusan PERJANJIAN ini berdasarkan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PERJANJIAN ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum berakhirnya masa berlakunya PERJANJIAN ini, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13 PERJANJIAN ini, tanpa dikenakan sanksi apa pun, dalam hal terjadinya keadaan berikut ini:
 - a. BPR dibubarkan secara hukum.

- b. Ijin usaha BPR atau ijin-ijin lainnya sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini dicabut oleh instansi yang berwenang untuk sementara ataupun seterusnya.
 - c. BPR dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang.
- (5) Dalam hal terjadinya pengakhiran PERJANJIAN lebih awal oleh BPR namun di luar ketentuan yang sebagaimana tercantum pada ayat (4) pasal ini, maka:
- a. BPR wajib melunasi kewajiban pembayarannya sampai dengan tanggal pengakhiran PERJANJIAN lebih awal.
 - b. BPR wajib membayar kepada TELKOM sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Biaya Bulanan (kecuali biaya yang berdasarkan transaksi/kejadian) yang berlaku untuk sisa jangka waktu PERJANJIAN.
- (6) Dalam hal terjadinya pengakhiran PERJANJIAN ini berdasarkan ketentuan dimaksud pada Pasal ini, Kerahasiaan Informasi dimaksud pada Pasal 15 PERJANJIAN ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (7) Setiap dan seluruh kewajiban PARA PIHAK terhadap satu dan lainnya yang telah ada dan belum diselesaikan, sebelum tanggal terjadinya pengakhiran PERJANJIAN menurut Pasal ini, akan tetap berlaku dan wajib diselesaikan oleh PIHAK terkait, kecuali ada kesepakatan tertulis diantara PARA PIHAK yang menentukan lain atau sebaliknya.

Pasal 15 KERAHASIAAN DAN DATA PRIBADI

- (1) Berdasarkan persetujuan dari Pihak lainnya, suatu Pihak tidak dapat mengungkapkan dan harus memastikan bahwa Orang yang Terkait (sebagaimana didefinisikan pada ayat 2 Pasal ini) tidak dapat mengumumkan atau memberitahukan ke pihak lain mengenai negosiasi atau diskusi terkait, atau isi, ketentuan atau keberadaan Perjanjian dan/atau bagian manapun dari Perjanjian atau hal lain terkait dengan transaksi yang direncanakan, termasuk yang dimaksud di sini atau negosiasi atau diskusi yang terkait dengannya ("Informasi Rahasia"), selain:
- a. pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku atau, dibutuhkan, berdasarkan pandangan Pihak, atau Orang yang Terkait untuk membuat pembelaan atau gugatan di Perkara manapun;
 - b. informasi tersebut berada dalam domain publik (selain dari pelanggaran Pasal ini) atau informasi tersebut tersedia pada suatu Pihak dari sumber yang tidak diketahui kepada Pihak menjadi subyek kewajiban kepada Pihak lain untuk tetap menjaga informasi tersebut rahasia.
- (2) Tanpa menyimpangi ketentuan di atas, masing-masing PIHAK dan Orang yang Terkait (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dapat memberitahukan Informasi Rahasia tersebut, apabila dibutuhkan, kepada induk perusahaan, anak perusahaan, dan direksi, serta komisaris, pegawai, karyawan, akuntan dan/atau konsultan (hukum atau lainnya) Instansi Pemerintahan yang berwenang ("Orang yang Terkait") yang secara tegas memiliki hubungan dengan Perjanjian ini atau hal-hal yang terkait secara langsung dengan Perjanjian ini, selama PIHAK tersebut memastikan bahwa Orang yang Terkait mematuhi ketentuan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Semua Informasi Rahasia termasuk namun tidak terbatas pada data, laporan, program, perencanaan, dokumen, presentasi, dan jadwal. Kepemilikan Informasi Rahasia tetap menjadi milik Pihak yang memiliki dan/atau yang mengungkapkannya. Pihak penerima Informasi Rahasia tidak akan memiliki hak apapun atas Informasi Rahasia tersebut.
- (4) Tidak ada dalam Perjanjian ini akan dianggap sebagai atau dimaksudkan untuk menyebabkan dan/atau menyiratkan ketentuan dan/atau pertukaran antara Para Pihak dari informasi apa pun,

TELKOM: 

apakah benar atau tidak, tentang individu yang dapat diidentifikasi (i) dari data itu sendiri atau (ii) dari data itu dan informasi lain yang dimiliki atau kemungkinan akan diakses oleh suatu Pihak, termasuk informasi lain yang dapat diperlakukan sebagai "data pribadi", "informasi pribadi", atau "informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi" ("Data Pribadi") berdasarkan undang-undang, deklarasi, dekrit, arahan, pemberlakuan legislatif, ketertiban, tata cara, peraturan, atau batasan mengikat lainnya yang berlaku (sebagaimana diamandemen, dikonsolidasikan atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu) yang berkaitan dengan perlindungan individu terkait terhadap pemrosesan Data Pribadi yang menjadi dasar suatu Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada (i) Undang-Undang Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016; (ii) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; (iii) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 71 tahun 2019 tentang Implementasi Sistem dan Transaksi Elektronik; dan (iv) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data dalam Sistem Elektronik ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").

- (5) Untuk menghindari keraguan, dalam hal salah satu Pihak ("Penerima") terbuka ke atau mendapatkan akses ke Data Pribadi Pihak lain ("Penyedia"), Para Pihak hanya akan menggunakan, memproses dan/atau mengungkapkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan berikut:
- Data Pribadi hanya akan diproses: (i) semata-mata untuk tujuan memenuhi kewajiban dan ketentuannya dalam Perjanjian ini, (ii) berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya dari individu tersebut, atau (iii) ketika diharuskan oleh undang-undang yang berlaku dan peraturan atau perintah pengadilan;
 - Penerima harus menyimpan dan menjaga Data Pribadi dalam kerahasiaan yang ketat, menggunakan derajat yang sesuai untuk menghindari pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah;
 - Penerima harus memproses Data Pribadi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Pelindungan Data Pribadi;
 - Penerima tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menggunakan, menjual, menyewakan, mentransfer, mendistribusikan, atau mengungkapkan atau menyediakan Data Pribadi untuk tujuan Penerima sendiri;
 - Penerima tidak boleh menyimpan Data Pribadi (atau dokumen atau catatan apa pun yang berisi Data Pribadi, elektronik, atau lainnya) untuk periode waktu yang lebih lama dari yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini kecuali sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pelindungan Data Pribadi;
 - Penerima harus membatasi akses Data Pribadi kepada personil yang berwenang yang secara ketat memerlukan akses Data Pribadi berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui dasar dan memastikan personil tersebut atau orang yang kepadanya Penerima mengungkapkan Data Pribadi, memprosesnya dalam sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - Penerima harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan operasional untuk melindungi Data Pribadi dari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pemrosesan, modifikasi, penyalinan, pembuangan, pemusnahan, penghancuran, atau risiko serupa yang tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) memisahkan Data Pribadi dari data sendiri dan data pelanggan lainnya, (ii) penggunaan nama samaran dan enkripsi Data Pribadi, jika perlu, (iii) langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan dan ketahanan yang berkelanjutan dari sistem dan layanan Penerima, (iv) kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke Data Pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis (rencana respon insiden), dan (v) proses untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi efektivitas secara berkala tindakan teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan pemrosesan Data Pribadi, (vi) rekam jejak Data Pribadi; dan
 - Penerima harus segera memberi tahu Penyedia jika ia mengetahui, atau mencurigai telah terjadi, pelanggaran keamanan yang mengarah pada kehilangan, pengubahan atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak disengaja atau tidak sah, termasuk deskripsi tentang

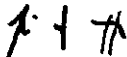
sifat dari pelanggaran keamanan, volume dan jenis Data Pribadi yang terpengaruh dan kategori serta perkiraan jumlah individu yang bersangkutan.

Pasal 16 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa material berupa kerusuhan, huru hara, pemberontakan, pemogokan, peperangan, embargo, blokade, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi berwenang yang berakibat langsung dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, disambar petir, banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, wabah penyakit, *pandemic*, epidemi, dan endemi yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut keadaan memaksa, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PIHAK lainnya.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam setelah hari pertama dari keadaan memaksa tersebut terjadi, dengan melampirkan (i) bukti dan/atau keterangan resmi dari instansi Pemerintah yang berwenang dan (ii) usaha-usaha dan tindakan yang telah dan/atau akan dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (5) Atas pemberitahuan tersebut, PIHAK yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui keadaan memaksa dimaksud, secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (6) Apabila sampai dengan batas waktu 3x24 jam sejak pemberitahuan tersebut, PIHAK yang diberitahu tidak memberikan jawaban menolak atau menyetujui keadaan memaksa dimaksud, maka PIHAK yang diberitahu tersebut dianggap telah menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (7) Apabila keadaan memaksa berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat merundingkan kembali mengenai pelaksanaan dan penyelesaian PERJANJIAN ini. Apabila PARA PIHAK tidak memperoleh kesepakatan atas perundingan kembali tersebut, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan PERJANJIAN ini. Dalam hal ini PARA PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dalam bentuk apa pun juga kepada PIHAK yang satu dan lainnya dalam PERJANJIAN ini, kecuali pemenuhan hak dan kewajiban sampai dengan sebelum terjadinya keadaan memaksa.

Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan isi dan pelaksanaan PERJANJIAN ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

TELKOM: 

- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender seperti dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 PERJANJIAN ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang diberlakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut.

Pasal 18 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan isi dan pelaksanaan PERJANJIAN ini harus dilakukan oleh PARA PIHAK secara tertulis dengan surat dan diserahkan secara langsung atau dengan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. BPR

Nama : Elly Trisnani Rohmawati
Jabatan : Kabis Operasional
Alamat : Jl. Raya Brondong No. 77 Lamongan Jawa Timur
Telepon/GSM : 0322-661688/ 081332653115
E-Mail : nsb_brd@yahoo.co.id

TELKOM

Nama : Vanessa Rania
Jabatan : Account Manager
Alamat : Jl. Mesjid No. 1 Sukabumi
Telepon/GSM : 081299910106
E-Mail : vanessaraniat@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data perusahaan dan/atau nama pejabat yang ditunjuk di dalam ayat 1 Pasal ini dan/atau penanggung jawab dalam pelaksanaan PEKERJAAN menurut PERJANJIAN ini harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya, secara tertulis.

Pasal 19 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK hanya dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan di dalam PERJANJIAN ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, berdasarkan adanya persetujuan tertulis dari PIHAK yang satu dan lainnya.

Pasal 20 PEMBERLAKUAN DAN KETENTUAN HUKUM

PERJANJIAN ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan yang diberlakukan di lingkungan kerja TELKOM

Pasal 21 PERUBAHAN

- (1) Kecuali ditentukan lain di dalam PERJANJIAN ini, setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi PERJANJIAN ini, akan dibuat dalam bentuk amandemen atau addendum atau kesepakatan tersendiri yang dibuat oleh dan antara para pejabat PARA PIHAK yang berwenang menurut PERJANJIAN ini, yang selanjutnya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

- (2) Biaya yang timbul atas perubahan layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas akan disepakati secara bersama oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu Addendum/Amandemen atas PERJANJIAN yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) Usulan perubahan terhadap PERJANJIAN ini harus diajukan oleh PIHAK yang menginginkan perubahan kepada PIHAK lainnya di dalam PERJANJIAN ini, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembicaraan mengenai usulan perubahan tersebut akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 22 KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap dan seluruh LAMPIRAN yang disebutkan di dalam PERJANJIAN ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran antara ketentuan di dalam PERJANJIAN ini dengan ketentuan di dalam LAMPIRAN PERJANJIAN ini, maka ketentuan yang tersebut di dalam PERJANJIAN ini yang akan diberlakukan.
- (3) Apabila selama berlakunya PERJANJIAN ini terdapat ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena hukum dan/atau karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau karena adanya putusan dari pengadilan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka ketentuan tersebut tidak dapat mengakibatkan berakhirnya PERJANJIAN ini, dan ketentuan lainnya di dalam PERJANJIAN ini akan tetap berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK. Dan, setelah mengetahui adanya suatu ketentuan dari PERJANJIAN ini yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dimaksud di dalam ayat ini, PARA PIHAK wajib merubah atau mengganti ketentuan tersebut.
- (4) PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, diberikan untuk kepentingan masing-masing PIHAK, serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk


Telkom Indonesia
SAIFUL HIDAJAT
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
TELKOM REGIONAL III

PT BPR NUSAMBA BRONDONG



bank nusamba
bpr nusamba bro
B5828AMX018469888
BAMBANG EDY YUWONO, SE.
DIREKTUR UTAMA

TELKOM: 

BPR: 

Lampiran II
PERJANJIAN antara TELKOM dengan BPR

Nomor : K.TEL.129E/HK.820/DR3-10000000/2024
Tanggal : 1 April 2024
Tentang : Rincian Biaya, Alamat dan Jenis Layanan SATU NET (Sarana Transaksi Keuangan)

No	Alamat	Layanan	Jumlah Paket	Periode Kontrak (Bulan)	Harga Bulanan (Rp.)
1	Kantor Pusat	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (15 Devices)	1	36	5.950.000
	Jl. Raya Brondong No. 77 Lamongan Jawa Timur	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
2	Cabang Gresik	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Komplek Ruko KIG Blok A21 Jl. Tridarma Kec. Kebomas Kab. Gresik	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
3	Cabang Tuban	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Jl. Brawijaya Kel. Kebonsari Kec/Kab Tuban	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
4	KAS Karanggeneng	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Jl. Raya Sumberwudi No. 88 Kec. Karanggeneng Lamongan	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
5	KAS Maduran	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Jl. Raya Pangean No.7 Kec. Maduran Lamongan	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
6	KAS Tikung	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Jl. Raya Mantup No. 38 Desa Jotosanur Kec. Tikung	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
7	KAS Paciran	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Jl. Raya Sunan Drajat No. 07 Drajat Kec. Paciran Lamongan	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000

8	KAS Babat	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Jl. Raya Babat-Jombang No. 142 Kel. Banaran Kec. Babat Lamongan	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
9	KAS Lamongan Kota	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Jl. Karangbinangun No. 20 Deket Kulon Kec. Sugio Lamongan	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
10	KAS Sugio	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Komplek Pertokoan Sugio No. 2 Kec. Sugio Lamongan	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
11	KAS Ngimbang	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Jl. Gajahmada No. 99 Ds/Kec Ngimbang Lamongan	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
12	KAS Bungah	SATU NET Full Service (Core Banking + Channel) Kantor Pusat (6 Devices)	1	36	1.900.000
	Jl. Raya Bungah No. 22 Bungah Kab. Gresik	VPN IP SATU NET 128 Kbps	1	36	800.000
Total					36.450.000
Total Nilai Kontrak					1.312.200.000

*harga belum termasuk PPN yang berlaku

Form A.05.04

Perkembangan dan Target Pasar

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Brondong

Posisi Laporan : 2025

I. Pendahuluan

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja PT. BPR Nusamba Brondong pada posisi Desember 2025 dibandingkan dengan posisi Desember 2024 serta tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank.

Secara umum, kinerja PT. BPR Nusamba Brondong pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Dari sisi struktur keuangan, total aset mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh kontraksi penyaluran kredit serta penurunan penghimpunan dana pihak ketiga. Di sisi lain, kualitas kredit menunjukkan tekanan yang cukup tinggi yang tercermin dari peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL).

Namun demikian, dari sisi profitabilitas dan efisiensi operasional, bank masih mampu menunjukkan perbaikan kinerja yang tercermin dari meningkatnya rasio Return on Assets (ROA) serta menurunnya rasio BOPO. Selain itu, kondisi permodalan bank masih berada pada level yang sangat memadai yang tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tetap berada jauh di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.

Selanjutnya, perkembangan kinerja PT. BPR Nusamba Brondong akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan analisis terhadap masing-masing indikator utama kinerja bank.

Tabel 1 Indikator Umum BPR Nusamba Brondong

Indikator	Des '24	Des '25	Δ yoy		Target	Deviasi		Pencapaian
			Nominal	%	Nominal	Nominal	%	%
Asset (Rp Juta)	145.006	142.632	(2.374)	-1,64%	154.400	(11.768)	-7,62%	92,38%
Kredit (Rp Juta)	108.834	105.239	(3.595)	-3,30%	124.929	(19.690)	-15,76%	84,24%
- Lancar	62.684	54.046	(8.638)	-13,78%	94.955	(40.909)	-43,08%	56,92%
- Dalam Perhatian Khusus	25.244	25.805	561	2,22%	23.737	2.068	8,71%	108,71%
- Kurang Lancar	1.671	1.595	(77)	-4,58%	407	1.188	291,88%	391,88%
- Diragukan	4.731	2.803	(1.928)	-40,75%	1.201	1.603	133,46%	233,46%
- Macet	14.503	20.989	6.486	44,72%	4.629	16.360	353,45%	453,45%
NPL (Nominal)	20.906	25.387	4.482	21,44%	6.237	19.151	307,07%	407,07%
Dana Pihak Ketiga (Rp Juta)	119.575	117.189	(2.386)	-2,00%	127.009	(9.820)	-7,73%	92,27%
- Tabungan (Rp Juta)	57.234	54.534	(2.700)	-4,72%	58.150	(3.616)	-6,22%	93,78%
- Deposito (Rp Juta)	62.341	62.656	315	0,50%	68.860	(6.204)	-9,01%	90,99%
CAR (%)	34,33	36,61	228		39,01	(240)		93,85%
ROA (%)	2,33	3,26	93		4,08	(82)		79,90%
BOPO (%)	90,79	85,58	-521		82,84	274		103,31%
NPL Gross (%)	19,21	24,12	491		4,99	1.913		483,44%
NPL Net (%)	13,79	17,38	359		1,19	1.619		1460,50%
LDR (%)	91,02	89,80	-122		98,36	-856		91,30%
CR (%)	18,74	21,92	318		18,66	326		117,47%

II. Perkembangan Kinerja Keuangan

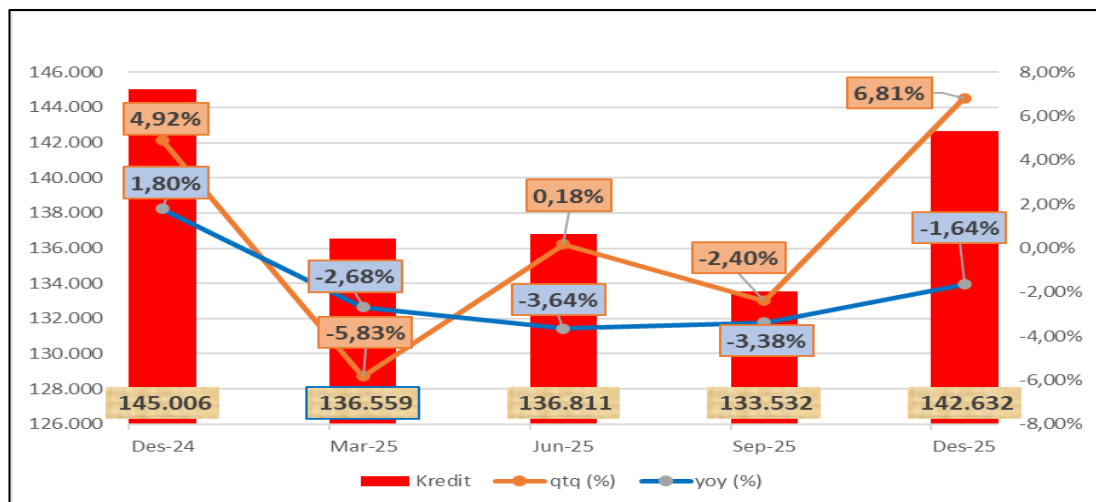
1. Aset

Pada posisi Desember 2025, total aset PT. BPR Nusamba Brondong tercatat sebesar Rp142.632 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.374 juta atau -1,64% dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar Rp145.006 juta. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp154.400 juta, maka realisasi aset mencapai 92,38% dari target.

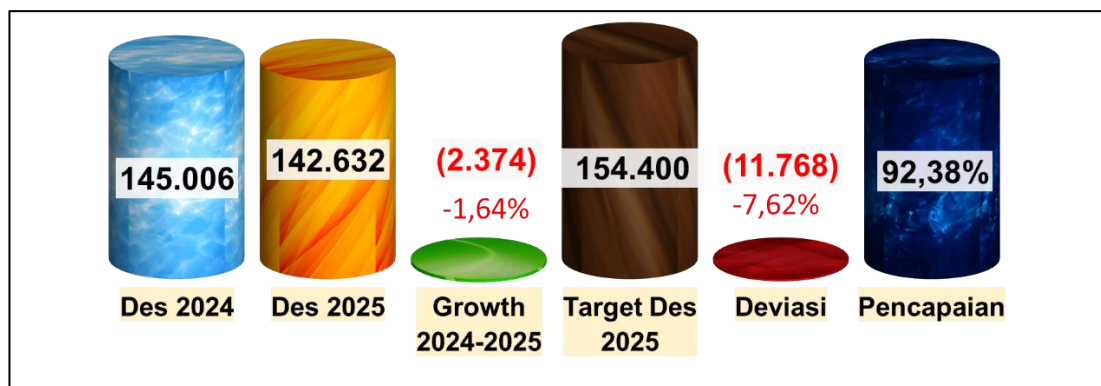
Tidak tercapainya target aset tersebut terutama dipengaruhi oleh kontraksi penyaluran kredit serta perlambatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada terbatasnya kapasitas bank dalam meningkatkan ekspansi aset produktif.

Sebagai upaya perbaikan, manajemen telah melakukan peningkatan aktivitas pemasaran produk simpanan, memperkuat hubungan dengan nasabah existing, serta meningkatkan kualitas analisa penyaluran kredit guna mendorong pertumbuhan aset secara lebih sehat.

Grafik 1 perkembangan Aset



Grafik 2 Pencapaian Target Asset



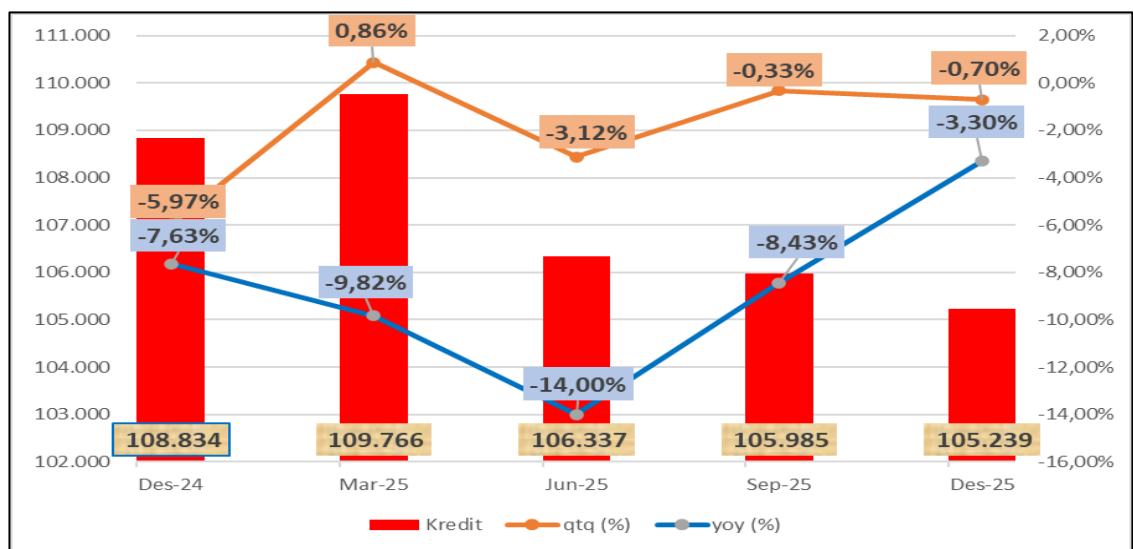
2. Kredit yang Diberikan

Pada posisi Desember 2025, total kredit yang diberikan tercatat sebesar Rp105.239 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.595 juta atau -3,30% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp108.834 juta. Jumlah debitur juga menurun dari 3.650 nasabah menjadi 3.428 nasabah atau turun sebanyak 222 debitur.

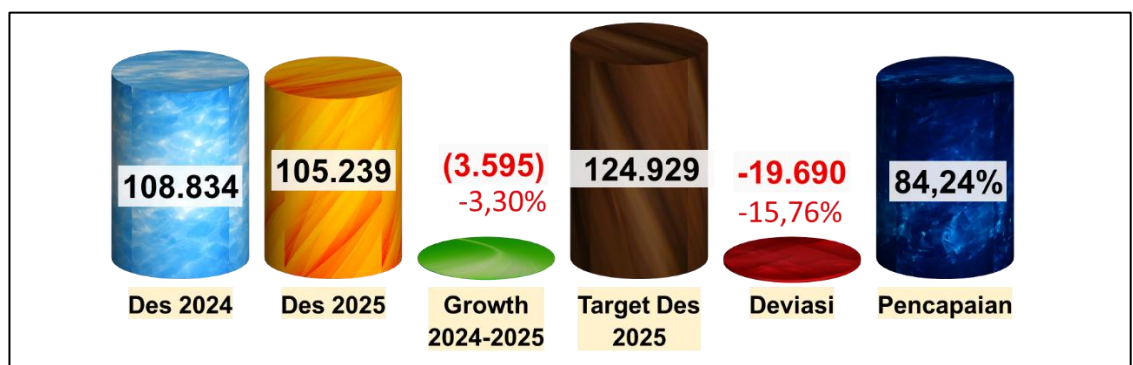
Jika dibandingkan dengan target penyaluran kredit sebesar Rp124.929 juta, maka realisasi kredit mencapai 84,24% dari target.

Tidak tercapainya target penyaluran kredit dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada sektor usaha utama debitur BPR sehingga sebagian pelaku usaha mengalami penurunan omzet dan permintaan kredit baru menjadi lebih terbatas. Selain itu, meningkatnya risiko kredit juga mendorong bank untuk menerapkan kebijakan ekspansi kredit yang lebih selektif.

Grafik 3 Perkembangan Kredit



Grafik 4 Pencapaian Target Kredit

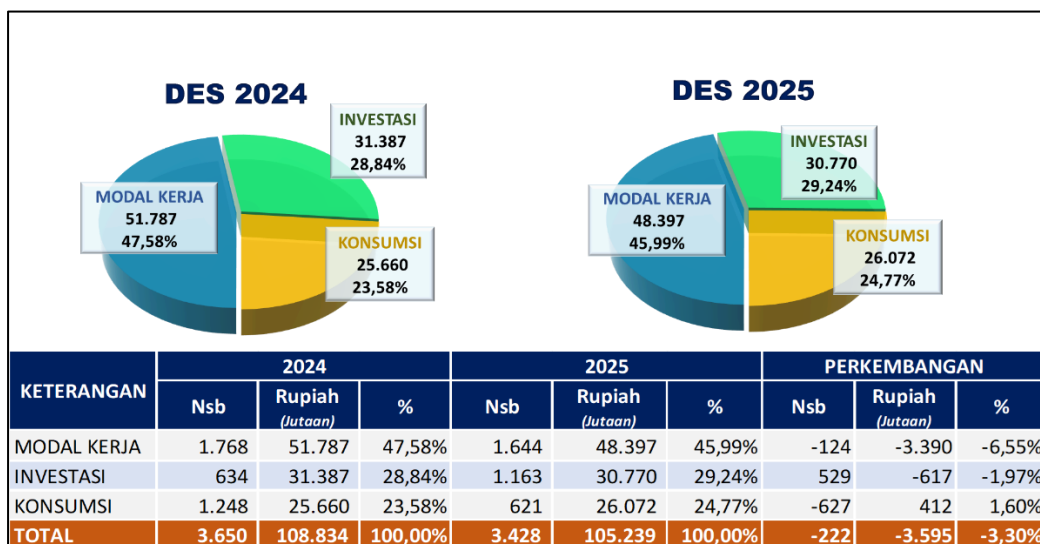


2.1 Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, portofolio kredit PT. BPR Nusamba Brondong pada tahun 2025 masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan nilai sebesar Rp48.397 juta atau 45,99% dari total kredit, diikuti oleh kredit investasi sebesar

Rp30.770 juta atau 29,24%, serta kredit konsumsi sebesar Rp26.072 juta atau 24,77%.

Grafik 5 Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Kredit modal kerja mengalami penurunan sebesar Rp3.390 juta atau -6,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sejalan dengan melemahnya aktivitas usaha sebagian debitur yang berdampak pada menurunnya kebutuhan tambahan modal kerja.

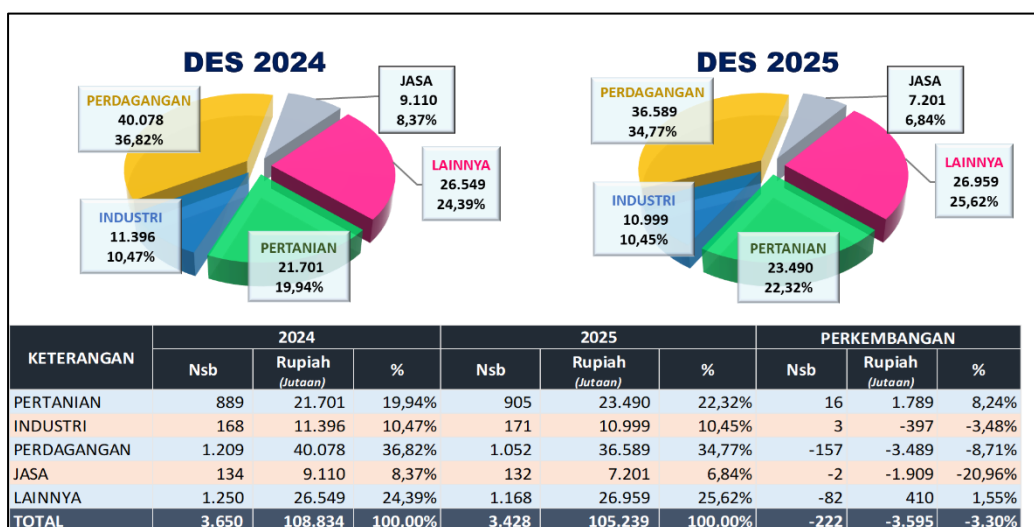
Sementara itu, kredit investasi tercatat relatif stabil dengan nilai sebesar Rp30.770 juta, atau turun Rp617 juta (-1,97%) dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun secara nominal mengalami penurunan, jumlah debitur investasi meningkat dari 634 nasabah menjadi 1.163 nasabah, yang mengindikasikan adanya peningkatan pembiayaan investasi dengan nominal yang relatif lebih kecil.

Adapun kredit konsumsi tercatat sebesar Rp26.072 juta, meningkat Rp412 juta atau 1,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan konsumtif masyarakat masih relatif terjaga meskipun kondisi perekonomian mengalami perlambatan.

2.2 Komposisi Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit PT. BPR Nusamba Brondong pada tahun 2025 masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, serta kategori lainnya.

Grafik 6 Komposisi Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi



Sektor perdagangan masih menjadi sektor terbesar dengan nilai kredit sebesar Rp36.589 juta atau 34,77% dari total kredit, meskipun mengalami penurunan sebesar Rp3.489 juta atau -8,71% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp40.078 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan aktivitas usaha di sektor perdagangan.

Sementara itu, sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan kredit menjadi Rp23.490 juta atau 22,32% dari total kredit, meningkat sebesar Rp1.789 juta atau 8,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang relatif stabil dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah operasional bank.

Pada sektor industri, kredit tercatat sebesar Rp10.999 juta atau 10,45% dari total kredit, mengalami penurunan sebesar Rp397 juta atau -3,48% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor jasa tercatat sebesar Rp7.201 juta atau 6,84% dari total kredit, mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp1.909 juta atau -20,96% dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas usaha pada beberapa segmen jasa.

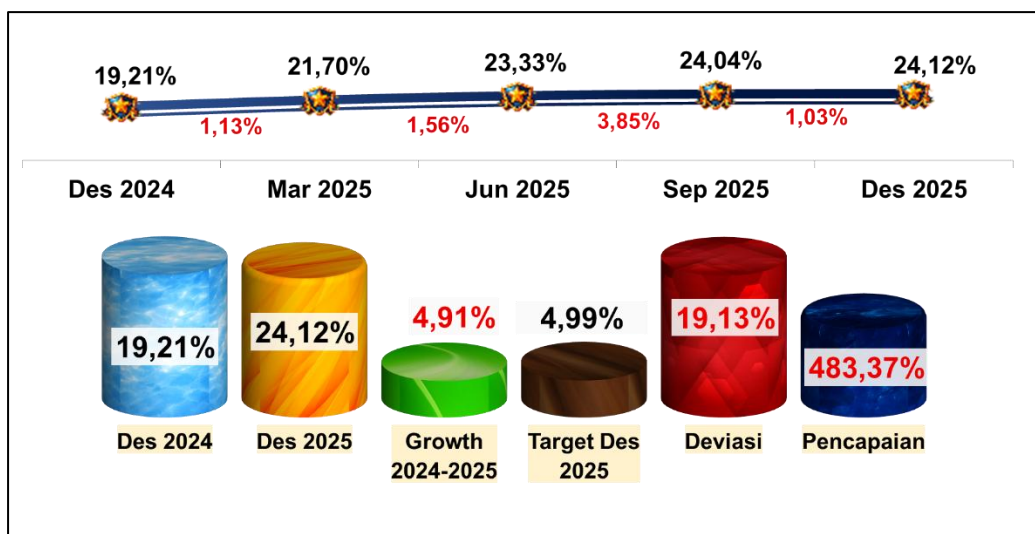
Adapun pada kategori lainnya, kredit tercatat sebesar Rp26.959 juta atau 25,62% dari total kredit, meningkat sebesar Rp410 juta atau 1,55% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, struktur penyaluran kredit bank masih terkonsentrasi pada sektor-sektor usaha mikro dan kecil yang menjadi basis ekonomi masyarakat di wilayah operasional bank.

2.3 Profil Risiko

Selain melihat perkembangan penyaluran kredit, bank juga melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit yang tercermin dari rasio **Non Performing Loan (NPL)** sebagai bagian dari pengelolaan profil risiko kredit.

Grafik 7 Perkembangan dan Pencapaian Target NPL

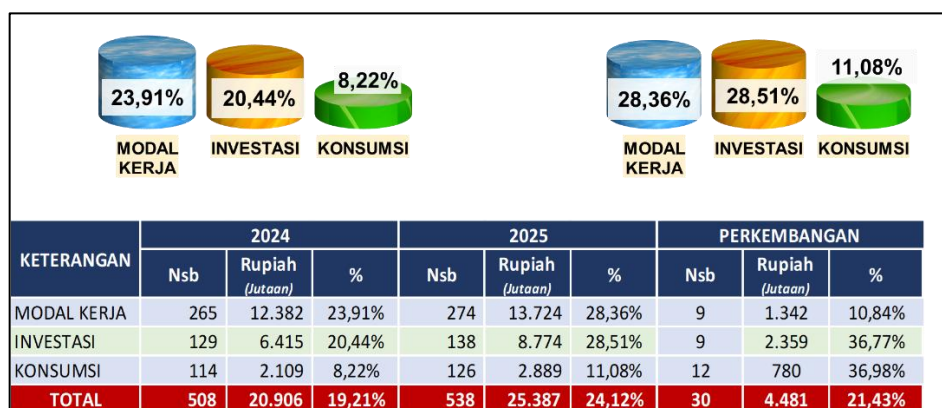


Pada tahun 2025, total kredit dengan kualitas Non Performing Loan (NPL) tercatat sebesar Rp25.387 juta yang berasal dari 654 debitur, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20.906 juta dari 508 debitur. Secara persentase, rasio NPL Gross meningkat dari 19,21% pada tahun 2024 menjadi 24,12% pada tahun 2025 atau naik signifikan sebesar 491 bps.

Sementara itu, rasio NPL Net juga meningkat dari 13,79% pada tahun 2024 menjadi 17,38% pada tahun 2025 atau naik 359 bps. Peningkatan rasio NPL tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kemampuan pembayaran sebagian debitur yang dipengaruhi oleh dinamika kondisi perekonomian serta menurunnya kinerja usaha pada beberapa sektor usaha debitur.

2.3.1 NPL Berdasarkan Jenis Penggunaan Kredit

Grafik 8 Perkembangan NPL Berdasarkan Jenis Penggunaan



Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja masih menjadi kontributor terbesar terhadap NPL dengan nilai sebesar Rp13.724 juta atau 28,36%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.382 juta atau 23,91%. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas usaha sebagian debitur sehingga berdampak pada kemampuan pembayaran kewajiban kredit.

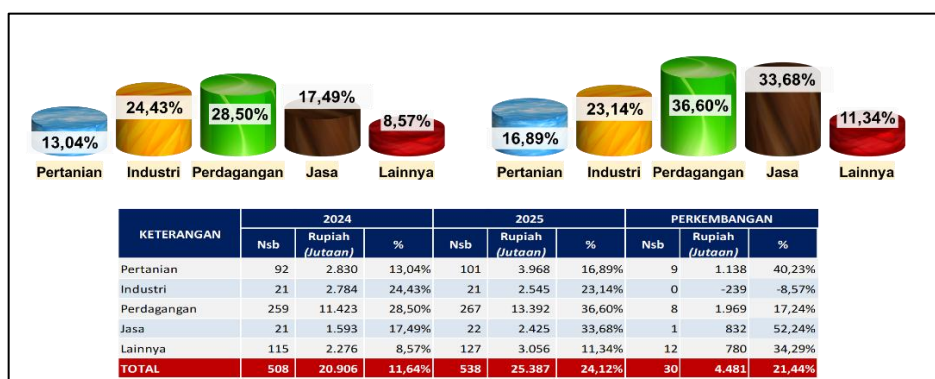
Kredit investasi tercatat memiliki NPL sebesar Rp8.774 juta atau 28,51%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.415 juta atau 20,44%, yang menunjukkan bahwa beberapa pembiayaan investasi

mengalami perlambatan dalam pengembalian seiring dengan belum optimalnya kinerja usaha debitur.

Sementara itu, kredit konsumsi tercatat memiliki NPL sebesar Rp2.889 juta atau 11,08%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.109 juta atau 8,22%, meskipun secara struktur risiko kredit konsumsi masih relatif lebih rendah dibandingkan kredit produktif.

2.3.2 NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi

Grafik 9 Perkembangan NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi



Dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit bermasalah masih didominasi oleh sektor perdagangan dengan nilai sebesar Rp13.392 juta atau 36,60%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.423 juta atau 28,50%. Kondisi ini sejalan dengan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan omzet usaha pada sebagian debitur di sektor perdagangan.

Pada sektor pertanian, NPL tercatat sebesar Rp3.968 juta atau 16,89%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.830 juta atau 13,04%. Sementara itu, sektor industri mencatatkan NPL sebesar Rp2.545 juta atau 23,14%, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor jasa menunjukkan peningkatan NPL yang cukup signifikan menjadi Rp2.425 juta atau 33,68%, meningkat dari Rp1.593 juta atau 17,49% pada tahun sebelumnya. Adapun pada kategori lainnya, NPL tercatat sebesar

Rp3.056 juta atau 11,34%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.276 juta atau 8,57%.

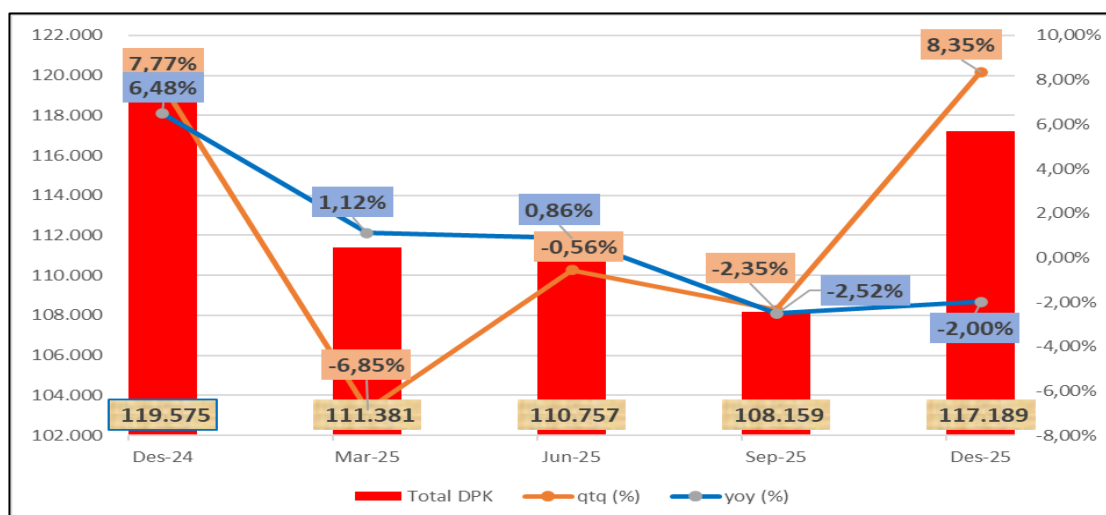
Secara umum, peningkatan NPL pada beberapa sektor usaha tersebut dipengaruhi oleh penurunan kinerja usaha debitur yang terdampak oleh dinamika perekonomian serta melemahnya daya beli masyarakat.

Dalam rangka menjaga kualitas portofolio kredit, bank terus melakukan penguatan pengelolaan risiko kredit melalui peningkatan monitoring terhadap debitur, optimalisasi strategi penagihan, serta percepatan upaya penyelesaian kredit bermasalah.

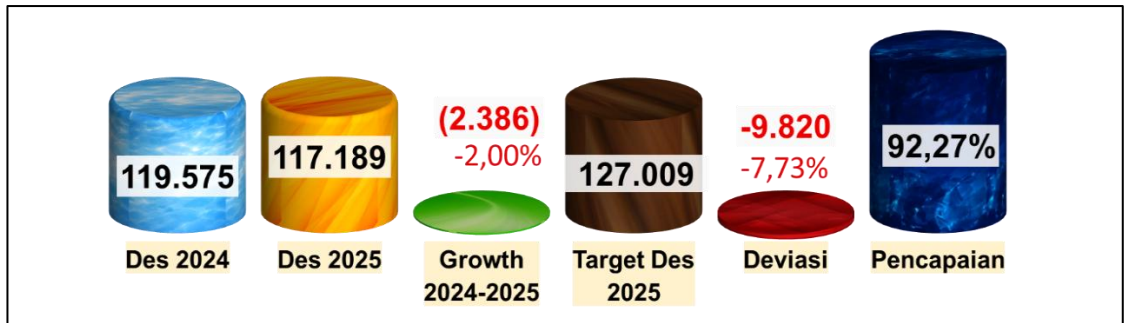
3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada posisi Desember 2025 tercatat sebesar Rp117.189 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.386 juta atau -2,00% (yoy) dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar Rp119.575 juta. Jika dibandingkan dengan target sebesar Rp127.009 juta, realisasi DPK mencapai 92,27% dari target.

Grafik 10 Perkembangan Dana Pihak Ketiga



Grafik 11 Pencapaian Target DPK



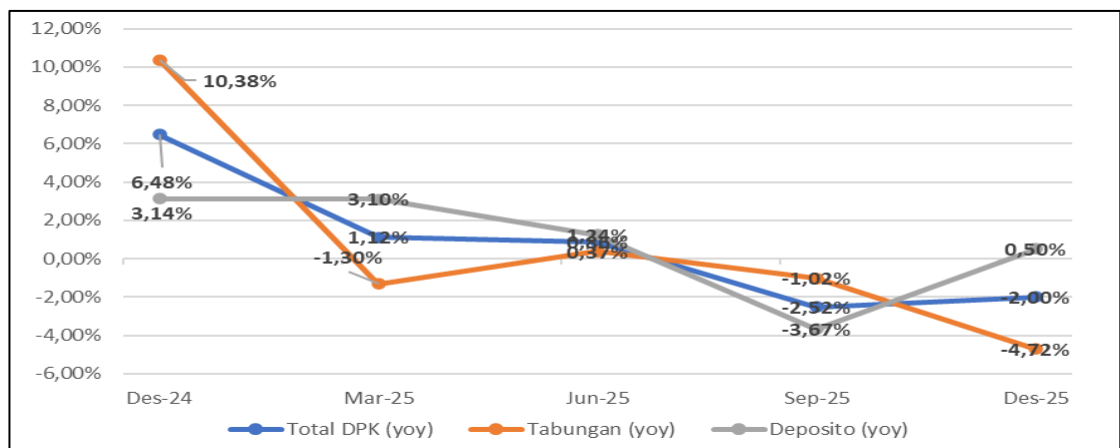
Penurunan Dana Pihak Ketiga tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya simpanan tabungan, sementara simpanan deposito masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif terbatas

Pada tahun 2025, struktur Dana Pihak Ketiga masih didominasi oleh simpanan deposito, dengan kontribusi sekitar 53%, sementara simpanan tabungan memberikan kontribusi sekitar 47% terhadap total Dana Pihak Ketiga bank.

Tabel 2 Komposisi DPK

Komponen	2024	2025	Perkembangan
Tabungan	Rp57.234 juta	Rp54.534 juta	-Rp2.700 juta (-4,72%)
Deposito	Rp62.341 juta	Rp62.656 juta	Rp315 juta (0,51%)
Total DPK	Rp119.575 juta	Rp117.190 juta	-Rp2.385 juta (-1,99%)

Grafik 12 Perkembangan Komposisi Dana Pihak Ketiga

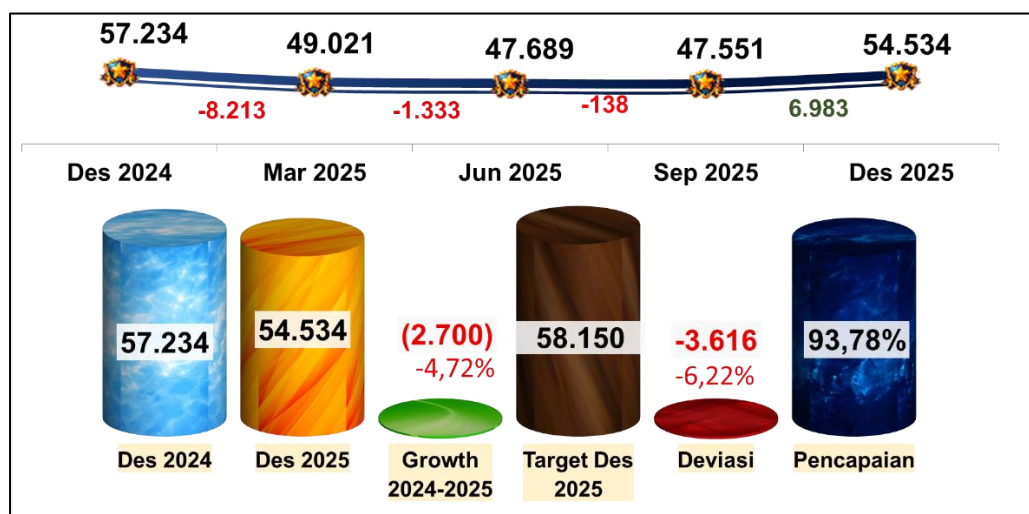


Perkembangan Dana Pihak Ketiga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya persaingan penghimpunan dana antar lembaga keuangan, kondisi daya beli masyarakat yang masih relatif terbatas, serta meningkatnya kebutuhan likuiditas nasabah sehingga sebagian dana digunakan untuk kebutuhan usaha maupun konsumsi. Selain itu, terdapat kecenderungan sebagian masyarakat untuk menempatkan dananya pada instrumen investasi lain yang dianggap lebih menarik. Dalam rangka menjaga stabilitas serta meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, bank terus melakukan berbagai upaya antara lain melalui peningkatan aktivitas pemasaran produk simpanan, penguatan hubungan dengan nasabah existing, peningkatan kualitas layanan kepada nasabah, serta optimalisasi program promosi produk simpanan kepada masyarakat.

3.1 Tabungan

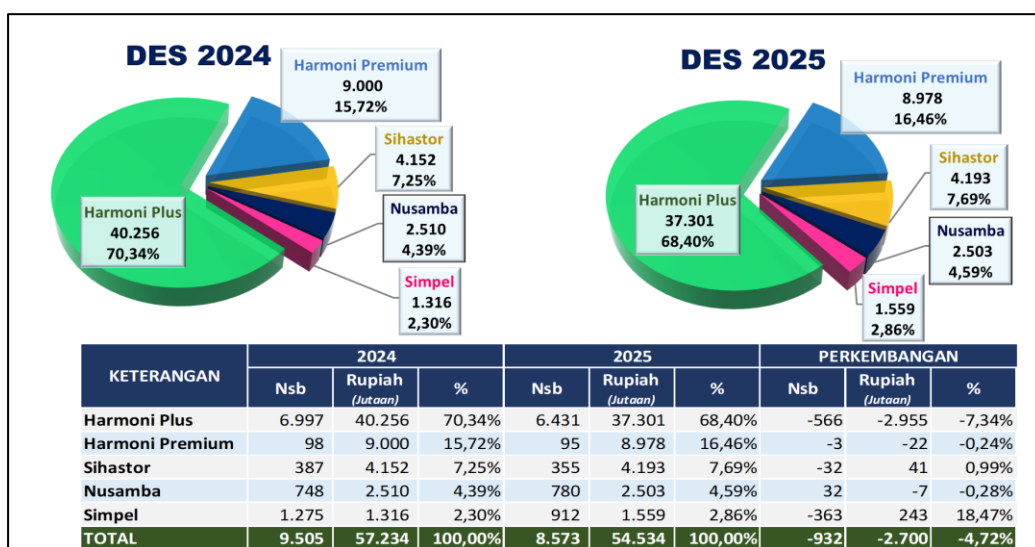
Pada tahun 2025, posisi simpanan tabungan tercatat sebesar Rp54.534 juta, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp57.234 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp2.700 juta (-4,72%). Penurunan tersebut juga diikuti oleh berkurangnya jumlah nasabah dari 9.505 nasabah menjadi 8.573 nasabah atau turun sebanyak 932 Nasabah.

Grafik 13 Perkembangan dan Pencapaian Tabungan



Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar Rp58.150 juta, maka realisasi simpanan tabungan mencapai 93,78% dari target, dengan deviasi sebesar Rp3.616 juta (-6,22%).

Grafik 14 Tabungan Berdasarkan Jenis dan Komposisi Tabungan



Berdasarkan grafik komposisi tabungan, terlihat bahwa Tabungan Harmoni Plus masih menjadi produk dengan kontribusi terbesar terhadap total tabungan bank dengan porsi 68,40%, diikuti oleh Harmoni Premium sebesar 16,46%, Sihastor sebesar 7,69%, Nusamba sebesar 4,59%, dan Simpel sebesar 2,86%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penghimpunan dana tabungan masih cukup terkonsentrasi pada produk Harmoni Plus sebagai produk utama bank.

Dilihat dari jenis produk Tabungan, Tabungan Harmoni Plus masih menjadi produk dengan kontribusi terbesar terhadap total tabungan. Pada tahun 2025 saldo Tabungan Harmoni Plus tercatat sebesar Rp37.301 juta atau 68,40% dari total tabungan, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.256 juta (-7,34%) seiring dengan berkurangnya jumlah nasabah sebanyak 566 nasabah.

Produk Harmoni Premium pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp8.978 juta atau 16,46% dari total tabungan dan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp9.000 juta.

Sementara itu Tabungan Sihastor tercatat sebesar Rp4.193 juta atau 7,69% dari total tabungan, meningkat sebesar Rp41 juta (0,99%) dibandingkan tahun sebelumnya.

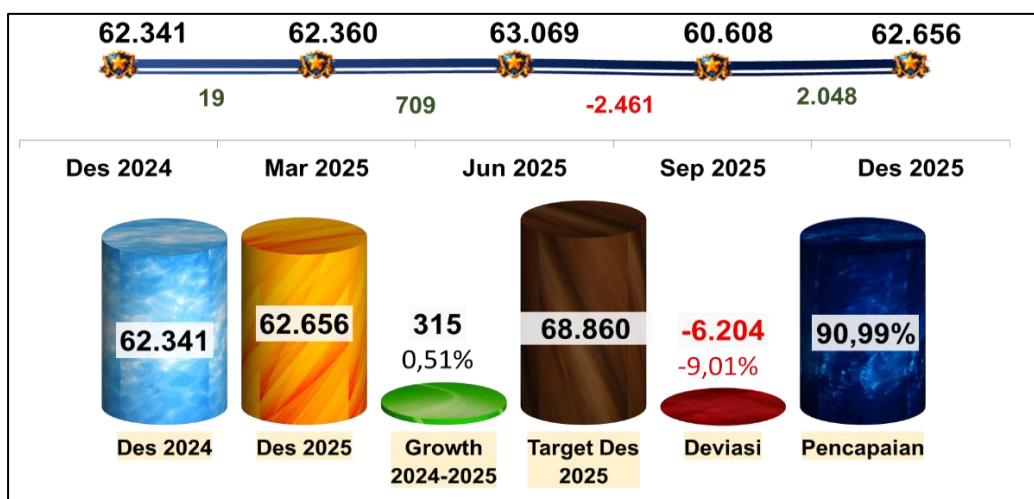
Adapun Tabungan Nusamba tercatat sebesar Rp2.503 juta atau 4,59% dari total tabungan dan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.510 juta.

Sedangkan Tabungan Simpel menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dengan saldo sebesar Rp1.559 juta atau 2,86% dari total tabungan, meningkat sebesar Rp243 juta (18,47%) dibandingkan tahun sebelumnya.

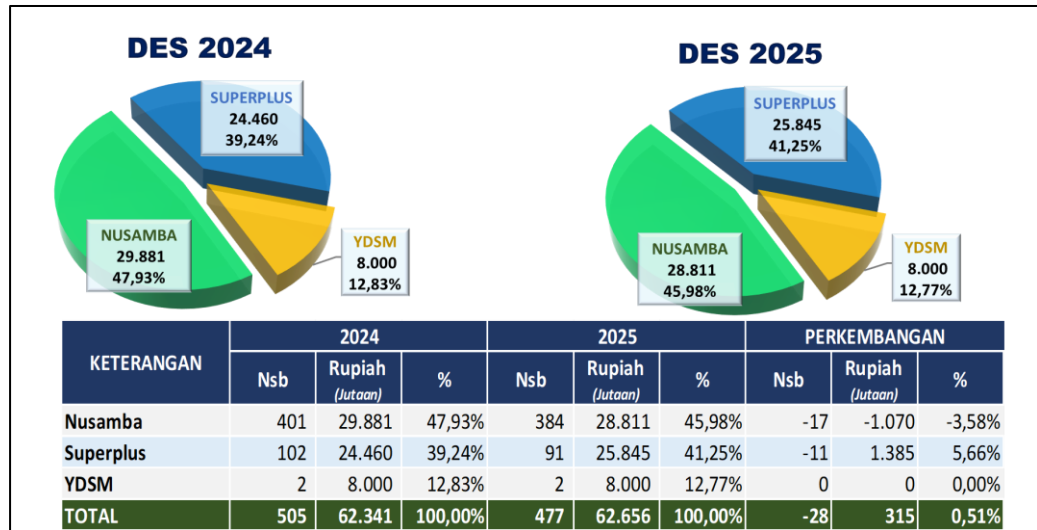
3.2 Deposito

Pada tahun 2025, posisi simpanan deposito tercatat sebesar Rp62.656 juta, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp62.341 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar Rp315 juta (0,50%). Meskipun secara nominal mengalami peningkatan, jumlah nasabah deposito tercatat menurun dari 505 nasabah menjadi 477 nasabah. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar Rp68.860 juta, maka realisasi simpanan deposito mencapai Rp62.656 juta atau 90,99% dari target, dengan deviasi sebesar Rp6.204 juta (-9,01%).

Grafik 15 Perkembangan dan pencapaian Target Deposito



Grafik 16 Deposito berdasarkan produk dan perkembangannya



Berdasarkan grafik komposisi deposito, terlihat bahwa Deposito Nusamba masih menjadi produk dengan kontribusi terbesar terhadap total deposito bank dengan porsi 45,98%, diikuti oleh Deposito Superplus sebesar 41,25%, dan Deposito YDSM sebesar 12,77%.

Dilihat dari perkembangan masing-masing produk, Deposito Nusamba pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp28.811 juta atau 45,98% dari total deposito, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.070 juta (-3,58%) seiring dengan berkurangnya jumlah nasabah sebanyak 17 nasabah.

Sementara itu, Deposito Superplus menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun 2025 saldo Deposito Superplus tercatat sebesar Rp25.845 juta atau 41,25% dari total deposito, meningkat sebesar Rp1.385 juta (5,66%) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat nasabah terhadap produk deposito dengan skema atau fitur yang ditawarkan pada produk tersebut.

Adapun Deposito YDSM tercatat sebesar Rp8.000 juta atau 12,77% dari total deposito dan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah nasabah yang tetap sebanyak 2 nasabah.

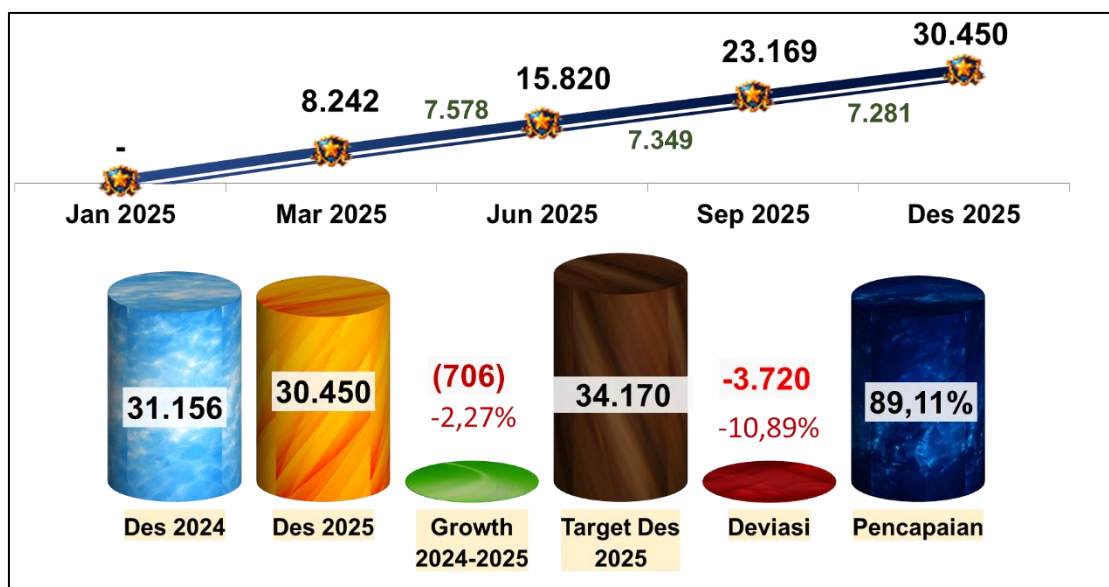
Secara umum, perkembangan simpanan deposito menunjukkan bahwa meskipun jumlah nasabah mengalami penurunan, namun saldo simpanan relatif tetap terjaga bahkan mengalami sedikit peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan rata-rata nominal penempatan dana oleh sebagian nasabah, terutama pada produk deposito dengan nominal penempatan yang lebih besar.

4. Pendapatan

Pendapatan bank merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja operasional bank, yang sebagian besar bersumber dari aktivitas penyaluran kredit serta pengelolaan aset produktif lainnya. Perkembangan pendapatan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit, kualitas aset, serta kemampuan bank dalam mengoptimalkan sumber pendapatan operasional lainnya.

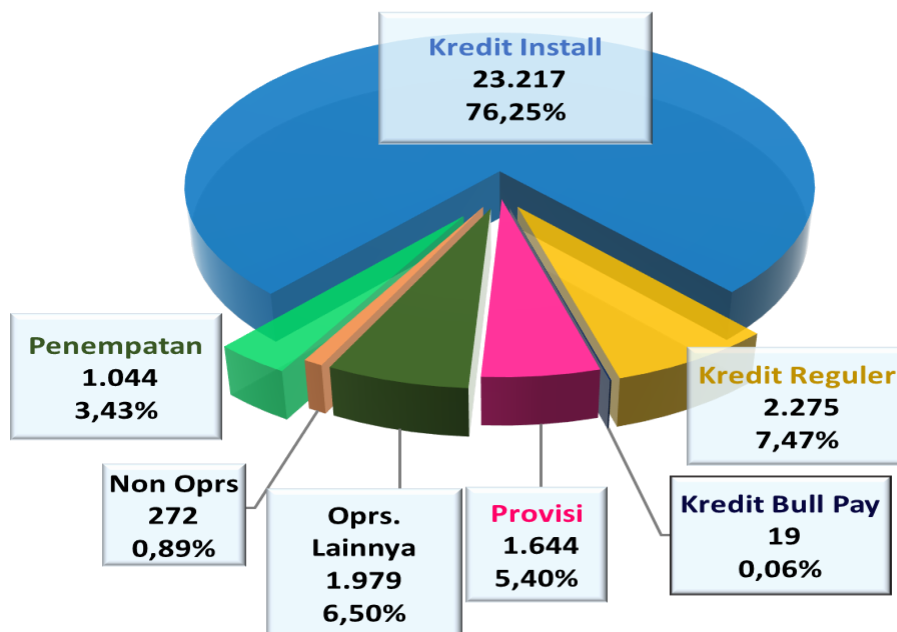
Pada tahun 2025, realisasi pendapatan bank tercatat sebesar Rp30.450 juta, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp31.156 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp706 juta (-2,27%). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya outstanding kredit serta meningkatnya kredit bermasalah yang berdampak pada pengakuan pendapatan bunga.

Grafik 17 Perkembangan dan pencapaian Pendapatan



Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar Rp34.170 juta, maka realisasi pendapatan bank mencapai 89,11% dari target, dengan deviasi sebesar Rp3.720 juta (-10,89%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan bank pada tahun 2025 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank.

Grafik 18 Komposisi Pendapatan



Dilihat dari komposisi pendapatan, pendapatan bank masih didominasi oleh pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Pendapatan terbesar berasal dari kredit angsuran (Kredit Installment) sebesar Rp23.217 juta atau sekitar 76,25% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyaluran kredit tetap menjadi sumber utama pendapatan operasional bank.

Selain itu, pendapatan juga diperoleh dari kredit reguler sebesar Rp2.275 juta (7,47%), serta pendapatan provisi sebesar Rp1.644 juta (5,40%). Sementara itu, pendapatan operasional lainnya tercatat sebesar Rp1.979 juta (6,50%), yang berasal dari berbagai layanan operasional bank.

Pendapatan dari penempatan dana tercatat sebesar Rp1.044 juta (3,43%), sedangkan kredit bull pay memberikan kontribusi yang relatif kecil sebesar Rp19 juta (0,06%). Selain itu, terdapat pula pendapatan non operasional sebesar Rp272 juta (0,89%).

Secara umum, struktur pendapatan bank masih sangat bergantung pada pendapatan bunga kredit, sehingga perkembangan penyaluran kredit dan kualitas kredit sangat mempengaruhi kemampuan bank dalam meningkatkan pendapatan operasional.

Tidak tercapainya target pendapatan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penurunan outstanding kredit, meningkatnya kredit bermasalah, serta realisasi penagihan kredit write off yang belum optimal, dimana realisasi penagihan write off hanya mencapai Rp148 juta dari target Rp685 juta.

5. Biaya

Biaya operasional merupakan komponen penting dalam menentukan tingkat efisiensi dan profitabilitas bank. Perkembangan biaya operasional dipengaruhi oleh aktivitas penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta biaya operasional lainnya yang timbul dalam rangka mendukung kegiatan usaha bank.

Pada tahun 2025, total biaya operasional bank tercatat sebesar Rp25.969 juta, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp27.890 juta, atau mengalami penurunan sebesar Rp1.921 juta (-6,89%) secara year on year.

Penurunan biaya tersebut menunjukkan adanya upaya efisiensi yang dilakukan oleh bank dalam mengendalikan beban operasional selama tahun 2025. Efisiensi tersebut dilakukan melalui pengendalian berbagai komponen biaya operasional serta penyesuaian aktivitas usaha seiring dengan perkembangan penyaluran kredit dan kegiatan operasional bank secara keseluruhan.

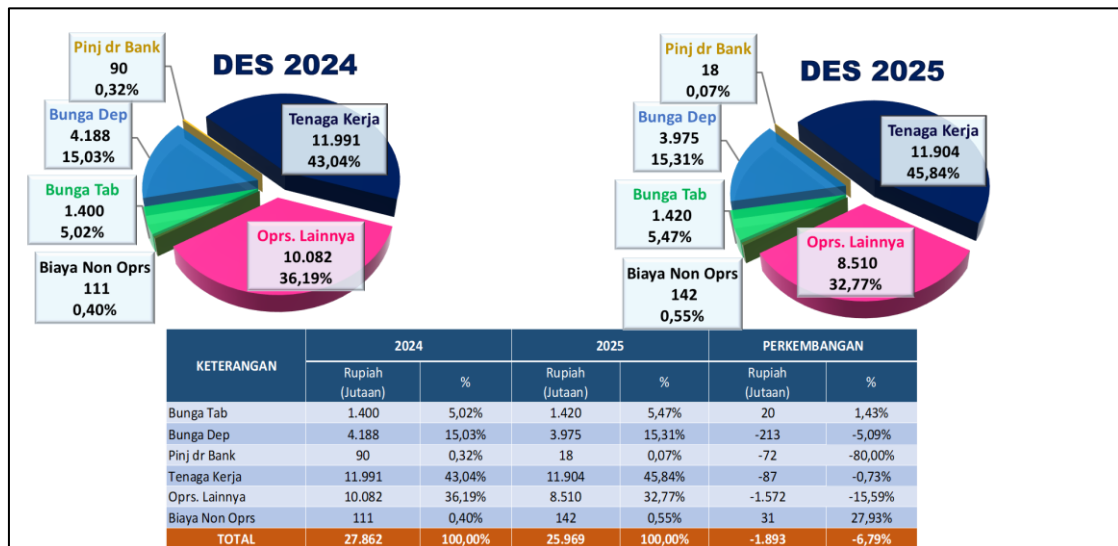
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp28.145 juta, realisasi biaya sebesar Rp25.969 juta berada Rp2.176 juta lebih rendah dari target, dengan tingkat pencapaian sebesar 92,27%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan biaya

operasional bank selama tahun 2025 relatif lebih efisien dibandingkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Grafik 19 Perkembangan dan Pencapaian Biaya



Grafik 20 Perkembangan dan Pencapaian Biaya



Dilihat dari komposisinya, struktur biaya operasional bank pada tahun 2025 masih didominasi oleh biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya, yang secara bersama-sama memberikan kontribusi terbesar terhadap total biaya operasional bank.

Komponen biaya tenaga kerja pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp11.904 juta atau 45,84% dari total biaya, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar

Rp11.991 juta atau 43,04%. Secara nominal biaya tenaga kerja mengalami penurunan sebesar Rp87 juta (-0,73%), namun secara komposisi mengalami peningkatan karena adanya penurunan pada beberapa komponen biaya lainnya.

Sementara itu, biaya operasional lainnya pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp8.510 juta atau 32,77% dari total biaya, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp10.082 juta atau 36,19%. Secara nominal komponen biaya ini mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp1.572 juta (-15,59%), yang menjadi salah satu faktor utama menurunnya total biaya operasional bank pada tahun 2025.

Untuk biaya bunga deposito, pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.975 juta atau 15,31% dari total biaya, menurun sebesar Rp213 juta (-5,09%) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan upaya bank dalam mengelola struktur dana serta menjaga efisiensi biaya dana.

Adapun biaya bunga tabungan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.420 juta atau 5,47% dari total biaya, meningkat sebesar Rp20 juta (1,43%) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya penyesuaian biaya dana seiring dengan upaya bank dalam menjaga stabilitas penghimpunan dana tabungan.

Sementara itu, biaya pinjaman dari bank lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp18 juta atau 0,07% dari total biaya, menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp90 juta. Penurunan sebesar Rp72 juta (-80,00%) ini menunjukkan berkurangnya ketergantungan bank terhadap sumber pendanaan dari bank lain.

Untuk biaya non operasional, pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp142 juta atau 0,55% dari total biaya, meningkat sebesar Rp31 juta (27,93%) dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan, kontribusi biaya ini terhadap total biaya masih relatif kecil.

Secara keseluruhan, komposisi biaya pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya efisiensi yang dilakukan bank terutama berasal dari pengendalian biaya operasional lainnya serta biaya bunga deposito, sehingga mampu menekan total biaya operasional

bank dan turut mendukung perbaikan tingkat efisiensi operasional sebagaimana tercermin pada penurunan rasio BOPO pada tahun 2025.

6. Laba

Pada tahun 2025, laba bank tercatat sebesar Rp4.481 juta, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp3.294 juta. Dengan demikian, laba bank mengalami pertumbuhan sebesar Rp1.187 juta atau 36,04% secara year on year.

Peningkatan laba tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional bank selama tahun 2025. Kenaikan laba ini terutama dipengaruhi oleh upaya pengendalian biaya operasional yang berhasil menurunkan total biaya bank, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan laba yang dihasilkan.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target laba tahun 2025 sebesar Rp6.025 juta, realisasi laba sebesar Rp4.481 juta masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Terdapat deviasi sebesar Rp1.544 juta atau -25,62% dari target yang direncanakan, sehingga tingkat pencapaian target laba tercatat sebesar 74,38%.

Belum tercapainya target laba tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi penyaluran kredit yang belum tumbuh sesuai dengan rencana serta meningkatnya rasio kredit bermasalah yang berdampak pada keterbatasan pertumbuhan pendapatan bunga bank.

Meskipun demikian, secara keseluruhan kinerja laba bank pada tahun 2025 masih menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan bahwa langkah pengendalian biaya serta pengelolaan operasional bank masih mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja profitabilitas bank.

Grafik 20 Perkembangan dan pencapaian Laba



7. Analisa Rasio

Pada tahun 2025, perkembangan rasio keuangan bank menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit, kondisi kualitas aset, serta penghimpunan dana pihak ketiga. Secara umum, rasio keuangan bank masih berada pada kondisi yang cukup baik, meskipun beberapa indikator masih menghadapi tantangan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Analisa rasio dalam laporan ini mencakup rasio rentabilitas, rasio permodalan, dan rasio likuiditas yang masing-masing memberikan gambaran mengenai kinerja profitabilitas, kekuatan modal, serta kemampuan bank dalam menjaga stabilitas likuiditas.

7.1 Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional yang dijalankan.

Return On Assets (ROA)

Rasio Return On Assets (ROA) pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,26%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 2,33%. Peningkatan rasio ROA ini sejalan dengan meningkatnya laba bank pada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp4.481 juta, atau tumbuh 36,04% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.294 juta.

Selain itu, peningkatan ROA juga dipengaruhi oleh penurunan total aset bank dari Rp145.006 juta pada tahun 2024 menjadi Rp142.632 juta pada tahun 2025, sehingga secara rasio memberikan tingkat pengembalian aset yang lebih tinggi.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target ROA sebesar 4,08%, realisasi ROA masih berada di bawah target yang direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi penyaluran kredit yang belum tumbuh sesuai dengan rencana serta meningkatnya rasio kredit bermasalah yang berdampak pada keterbatasan pertumbuhan pendapatan bunga bank.

BOPO

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada tahun 2025 tercatat sebesar 85,58%, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 90,79%. Penurunan rasio BOPO ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional bank selama tahun 2025.

Perbaikan rasio BOPO terutama dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam melakukan pengendalian biaya operasional. Total biaya bank pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp25.969 juta, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp27.862 juta, atau mengalami penurunan sebesar Rp1.893 juta (-6,79%).

Penurunan biaya tersebut terutama berasal dari berkurangnya biaya operasional lainnya serta biaya bunga deposito, yang turut mendukung peningkatan efisiensi operasional bank.

Apabila dibandingkan dengan target BOPO sebesar 82,84%, realisasi rasio BOPO masih berada sedikit di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi operasional telah mengalami perbaikan, namun pengelolaan biaya dan peningkatan pendapatan operasional masih perlu terus dioptimalkan.

7.2 Rasio Permodalan

Rasio permodalan digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan modal yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional serta menyerap potensi risiko yang timbul dari aktivitas usaha bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada tahun 2025 tercatat sebesar 36,61%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 34,33%.

Peningkatan rasio CAR ini menunjukkan bahwa kondisi permodalan bank masih berada pada tingkat yang sangat kuat dan mampu mendukung kegiatan operasional bank. Kenaikan rasio CAR juga dipengaruhi oleh menurunnya penyaluran kredit bank pada tahun 2025, yang menyebabkan penurunan aset tertimbang menurut risiko sehingga rasio kecukupan modal menjadi lebih tinggi.

Apabila dibandingkan dengan target CAR sebesar 39,01%, realisasi CAR mencapai 93,85% dari target. Meskipun sedikit di bawah target yang direncanakan, kondisi permodalan bank secara umum masih berada pada tingkat yang sangat memadai untuk mendukung pengembangan usaha bank.

7.3 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, khususnya dalam menghadapi kemungkinan penarikan dana oleh nasabah.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada tahun 2025 tercatat sebesar 89,80%, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 91,02%.

Penurunan rasio LDR ini dipengaruhi oleh menurunnya penyaluran kredit bank dari Rp108.834 juta menjadi Rp105.239 juta, sementara dana pihak ketiga juga mengalami sedikit penurunan namun tidak sebesar penurunan kredit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana yang dihimpun untuk penyaluran kredit masih belum optimal.

Apabila dibandingkan dengan target LDR sebesar 98,36%, realisasi LDR masih berada di bawah target yang direncanakan.

Cash Ratio (CR)

Rasio Cash Ratio (CR) pada tahun 2025 tercatat sebesar 21,92%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 18,74%.

Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh penurunan penyaluran kredit sehingga likuiditas bank relatif lebih longgar.

Apabila dibandingkan dengan target Cash Ratio sebesar 18,66%, realisasi rasio CR berada di atas target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa posisi likuiditas bank masih berada pada kondisi yang cukup kuat.

III. Penutup

Secara umum, kinerja PT. BPR Nusamba Brondong pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup beragam.

Pertumbuhan aset dan kredit mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh meningkatnya risiko kredit serta kebijakan ekspansi kredit yang lebih selektif. Di sisi lain, kualitas kredit menunjukkan tekanan yang cukup tinggi yang tercermin dari meningkatnya rasio NPL.

Namun demikian, dari sisi efisiensi operasional dan profitabilitas, bank masih mampu menunjukkan perbaikan kinerja yang tercermin dari meningkatnya ROA serta menurunnya rasio BOPO. Selain itu, kondisi permodalan dan likuiditas bank masih berada pada level yang cukup kuat untuk mendukung kegiatan operasional bank ke depan.

Ke depan, fokus utama manajemen adalah pada upaya **perbaikan kualitas kredit, penyelesaian kredit bermasalah, serta peningkatan kualitas penyaluran kredit** guna mendorong pertumbuhan usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
			Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab/Kota	Kode Pos		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC		
Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap									EDC Milik Sendiri	EDC Milik BU	EDC Milik BPR Lain
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya						

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan					Jumlah Pegawai					
			Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap		
Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR		No.	Tanggal			Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis	Kode Kantor Kas	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya	Nama Kantor Kas	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan	No. Telepon
-------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	--------	---------------	-------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas	Tanggal Pelaksanaan	Sandi Kantor Kendali	Tanggal Persetujuan
---	---------------------	----------------------	---------------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
PT PEFINDO BIRO KREDIT	Informasi Perkreditan	Pihak yang menghimpun data menghasilkan informasi perkreditan yang bekerjasama dengan BPR sebagai pihak yang menjadi sumber data dan/atau memperoleh informasi perkreditan dari PBK	07-05-2018
PT TELKOM SIGMA	Penyedia jasa telecommunication, information, media, edutainment, dan services (TIMES)	Pengembangan Core Banking BPR dalam meningkatkan pelayanan untuk mencapai tujuan perusahaan agar sesuai dengan yang diharapkan dan didasari pemikiran persaingan usaha yang sangat kompetitif, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, kemampuan dan daya saing produk	06-03-2014
AMANDA PUSPITA, SH., M. Kn	Memberikan kepastian hukum bagi BPR dalam setiap transaksi perkreditan dan pengikatan jaminan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pembuatan Akta Kredit dan Pengikatan Jaminan, Pengurusan Balik Nama Sertifikat Jaminan, Pemberian Konsultasi Hukum, Pengesahan Dokumen, menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi perkreditan	22-06-2012
SYARISCHA FITAIAHITA S,H, M.Kn	Memberikan kepastian hukum bagi BPR dalam setiap transaksi perkreditan dan pengikatan jaminan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pembuatan Akta Kredit dan Pengikatan Jaminan, Pengurusan Balik Nama Sertifikat Jaminan, Pemberian Konsultasi Hukum, Pengesahan Dokumen, menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi perkreditan	23-08-2024
IBNU HAMID S.H., M.Kn	Memberikan kepastian hukum bagi BPR dalam setiap transaksi perkreditan dan pengikatan jaminan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pembuatan Akta Kredit dan Pengikatan Jaminan, Pengurusan Balik Nama Sertifikat Jaminan, Pemberian Konsultasi Hukum, Pengesahan Dokumen, menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi perkreditan	12-05-2022
LINAH, SH., M.Kn	Memberikan kepastian hukum bagi BPR dalam setiap transaksi perkreditan dan pengikatan jaminan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pembuatan Akta Kredit dan Pengikatan Jaminan, Pengurusan Balik Nama Sertifikat Jaminan, Pemberian Konsultasi Hukum, Pengesahan Dokumen, menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi perkreditan	06-04-2021
NUR ANDAYANI, S.H., M.Kn	Memberikan kepastian hukum bagi BPR dalam setiap transaksi perkreditan dan pengikatan jaminan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pembuatan Akta Kredit dan Pengikatan Jaminan, Pengurusan Balik Nama Sertifikat Jaminan, Pemberian Konsultasi Hukum, Pengesahan Dokumen, menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi perkreditan	13-02-2023
ARDIAN WIDYA PRAMANTO, SH	Konsultasi masalah hukum, Penanganan kasus hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran jasa hukum	Kerjasama Pemberian Jasa Hukum dan/atau penyelesaian Kredit bermasalah, untuk menciptakan sinergi hubungan kerjasama antara PARA PIHAK dalam peningkatan kinerja perusahaan dengan bantuan jasa hukum dan dengan prinsip kepercayaan	24-07-2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
PT FINNET INDONESIA	Memasarkan Finpay Money BPR E-Cash kepada Nasabah	Melakukan kerjasama dalam melakukan pemasaran bersama (Co-Brand) Layanan Uang Elektronik Finpay Money dengan Brand Finpay Money BPR E-cash milik PT Finnet Indonesia	01-03-2023
PT KOMUNAL FINANSIAL INDONESIA	Pemberian jasa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah mendapatkan izin dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);	BPR memberikan sejumlah dana dengan pengenaan bunga kepada Penerima Dana dan menggunakan Layanan dalam Platform yang dikelola oleh Komunal	04-04-2023
PT. BIMANTARA SUKSES PERSADA	Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap debitur	Penagihan bagi debitur yang tergolong debitur Macet; Melakukan pengamanan jaminan bagi debitur yang tergolong debitur Macet	21-01-2025

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	
2. Pelayanan	
3. Lainnya	
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	
2. Pegawai Tidak Tetap	
Tingkat Pendidikan	
1. S3	
2. S2	
3. S1	
4. D3	
5. SMA	
6. Lainnya	
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	
2. Perempuan	
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	
2. Usia 26-35 tahun	
3. Usia 36-45 tahun	
4. Usia 46-55 tahun	
5. Usia >55 tahun	

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Training Aplikasi Digital SIP-TAKOL, SIPRo & SIP-TKS	06-01-2025	02	03	2	Pelatihan sesuai amanat POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, dan POJK No. 3/POJK.03/2022
Workshop Penyusunan Laporan Audit Intern dengan menggunakan Aplikasi SILA Versi 2.7 Bagi BPR/BPRS	22-01-2025	02	03	2	Pelatihan sesuai amanat SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Audit Internal bagi BPR
Training Aplikasi Digitas SI-PIPKu (Sistem Informasi Pengendali Internal Pelaporan Keuangan)	18-02-2025	02	03	1	Pelatihan sesuai amanat POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan	25-02-2025	02	01	3	Pelatihan sesuai amanat POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
Peningkatan Awareness terhadap Risiko Tindak Pidana Invesment Fraud dan Green Fiannce Crime	06-03-2025	02	01	2	Pelatihan sesuai amanat POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
Sosialisasi Ketentuan Perbankan SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2025	17-03-2025	02	01	1	Sosialisasi sesuai amanat SEOJK No. 2/SEOJK.03/2025, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat
Online Training " Penerapan Strategi Anti Fraud "	26-03-2025	02	01	1	Pelatihan sesuai Amanat POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan
Sosialisasi APOLO Modul Laporan Tahunan BPR / BPRS	15-04-2025	02	01	4	Pelatihan sesuai amanat POJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan SEOJK No. 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat
Sosialisasi Kekuatan Perbankan "SEOJK Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR/ BPRS" dan "SEOJK penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR/ BPRS"	16-05-2025	02	03	4	Sosialisasi sesuai amanat SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR dan BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
PPJ Pengkinian Dokumen Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPSPM Tahun 2024 yang disusun secara Individual Menggunakan Aplikasi Digital SIP-APU PPT & PPSPM dalam rangka Memenuhi Kewajiban POJK No.8 Tahun 2023 Tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan (SJK)	03-06-2025	02	01	3	Pelatihan sesuai amanat POJK 8 Tahun 2023 tentang Penerapan APU PPT dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan
Webinar Nasional Perbarindo dengan tema "Strategi FRM, Investigasi Fraud dan Risk Based Audit untuk BPR/ BPRS yang tangguh"	17-06-2025	02	03	1	Pelatihan sesuai amanat POJK 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan
Sosialisasi pelaporan sesuai POJK No 12 tahun 2024 tentang "Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan kepada BPR dan BPR Syariah dengan modal inti minimal 50 Miliar"	17-06-2025	02	01	3	Pelatihan sesuai amanat POJK 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan
Sosialisasi Optimalisasi LAPS SJK dalam Rangka Pelindungan Konsumen	24-06-2025	02	01	2	Pelatihan sesuai amanat POJK No. 22 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Sosialisasi Impelementasi Aplikasi SIPESAT Versi 3.0	24-06-2025	02	01	2	Pelatihan sesuai amanat POJK 8 Tahun 2023 tentang Penerapan APU PPT dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan
Workshop Fungsi Audit Intern dan Penyusunan Laporan Audit Intern dengan menggunakan Aplikasi SILA (Sistem Informasi Laporan Audit) Versi 3.0 sesuai SEOJK nomor 9/SEOJK.03/2025 bagi BPR/BPRS	22-07-2025	02	01	2	Pelatihan sesuai amanat SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR dan BPRS
Training Aplikasi Digital SIPPATUH Versi 2	17-07-2025	02	03	1	Pelatihan sesuai amanat SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Pelatihan Aplikasi Digital SIPPENA Versi 2 untuk menyampaikan Laporan Self Assessment Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2025 Ke OJK Paling Lambat September 2025	09-09-2025	02	03	1	Pelatihan sesuai amanat POJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Refreshment Materi APU-PPT	12-09-2025	02	02	1	Pelatihan sesuai amanat POJK 8 Tahun 2023 tentang Penerapan APU PPT dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Table with 6 columns: Kegiatan Pengembangan, Tanggal Pelaksanaan, Pihak Pelaksana, Kategori Peserta, Jumlah Peserta, and Uraian Peserta. It lists various training and socialization activities with their respective dates, participants, and descriptions.

SDM Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah		
Kas dalam Valuta Asing		
Surat Berharga		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penempatan pada Bank Lain		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)		
-/- Provisi Belum Diamortisasi		
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penyertaan Modal		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Agunan yang diambil alih		
Properti Terbengkalai		
Aset Tetap dan Inventaris		
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		
Aset Tidak Berwujud		
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai		
Aset Antarkantor		
Aset Keuangan Lainnya		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Aset Lainnya		
TOTAL ASET		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera		
Simpanan		
a. Tabungan		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
b. Deposito		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Simpanan dari Bank Lain		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Pinjaman yang Diterima		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
-/- Diskonto Belum Diamortisasi		
Dana Setoran Modal-Kewajiban		
Liabilitas Antarkantor		
Liabilitas Lainnya		
TOTAL LIABILITAS		
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar		
b. Modal yang Belum Disetor -/-		
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio		
b. Modal Sumbangan		
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas		
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya		
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
c. Lainnya		
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain		
Cadangan		
a. Umum		
b. Tujuan		
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu		
b. Tahun Berjalan		
TOTAL EKUITAS		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional		
1 Pendapatan Bunga		
a Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga		
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro		
Tabungan		
Deposito		
Sertifikat Deposito		
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain		
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
b Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
c Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga		
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain		
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		
2 Pendapatan Lainnya		
a Pendapatan Jasa Transaksi		
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing		
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga		
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku		
e Pemulihan CKPN		
f Dividen		
g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		
h Keuntungan penjualan AYDA		
i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi		
j Pemulihan penurunan nilai AYDA		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
k Lainnya		
Beban Operasional		
1 Beban Bunga		
a Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan		
ii. Deposito		
iii. Simpanan dari bank lain		
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia		
2) Dari Bank Lain		
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
4) Berupa Pinjaman Subordinasi		
v. Lainnya		
b Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit		
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga		
b. Penempatan pada Bank Lain		
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
d. Penyertaan Modal		
e. Aset Keuangan Lainnya		
4 Beban Pemasaran		
5 Beban Penelitian dan Pengembangan		
6 Beban Administrasi dan Umum		
a Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah		
ii. Honorarium		
iii. Lainnya		
b Beban Pendidikan dan Pelatihan		
c Beban Sewa		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
i. Gedung Kantor		
ii. Lainnya		
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris		
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
f Beban Premi Asuransi		
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
h Beban Barang dan Jasa		
i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi		
j Kerugian terkait risiko operasional		
a. Kecurangan internal		
b. Kejahatan eksternal		
k Pajak-pajak		
7 Beban Lainnya		
a Kerugian Penjualan Valuta Asing		
b Kerugian Penjualan Surat Berharga		
c Kerugian dari penyertaan dengan equity method		
d Kerugian penjualan AYDA		
e Kerugian penurunan nilai AYDA		
f Lainnya		
Laba (Rugi) Operasional		
Pendapatan Non Operasional		
1 Keuntungan Penjualan		
a Aset Tetap dan Inventaris		
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris		
b Lainnya		
3 Bunga Antar Kantor		
4 Selisih Kurs		
5 Lainnya		
Beban Non Operasional		
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a Aset Tetap dan Inventaris		
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
b Lainnya		
3 Bunga Antar Kantor		
4 Selisih Kurs		
5 Lainnya		
Laba (Rugi) Non Operasional		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		
Taksiran Pajak Penghasilan		
Pendapatan Pajak Tangguhan		
Beban Pajak Tangguhan		
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan		
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan terkait		
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan terkait		
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik		
b. Tagihan Komitmen Lainnya		
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik		
b. Penerusan Kredit		
c. Kewajiban Komitmen Lainnya		
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan		
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain		
3) Surat Berharga		
4) Lainnya		
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan		
2) Penempatan pada Bank Lain		
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku		
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku		
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit		
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya		
Kewajiban Kontinjensi		
Rekening Administratif Lainnya		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi
-----	---------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------------------------

Form B.04.00
Laporan Perubahan Ekuitas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan	Jumlah
---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	--------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga		
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi		
Penerimaan beban klaim asuransi		
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan		
Pendapatan operasional lainnya		
Pembayaran beban bunga		
Beban gaji dan tunjangan		
Beban umum dan administrasi		
Beban operasional lainnya		
Pendapatan non operasional lainnya		
Beban non operasional lainnya		
Pembayaran pajak penghasilan		
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban		
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain		
Kredit yang diberikan		
Agunan yang diambil alih		
Aset lain-lain		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penyesuaian lainnya atas aset operasional		
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera		
Tabungan		
Deposito		
Simpanan dari bank lain		
Pinjaman yang diterima		
Liabilitas imbalan kerja		
Liabilitas lain-lain		
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional		
Arus Kas neto dari aktivitas operasi		
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris		
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud		
Pembelian/penjualan Surat Berharga		
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi		
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan		
Pembayaran dividen		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan		
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas		
Kas dan setara Kas awal periode		
Kas dan setara Kas akhir periode		

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BPR NUSAMBA BRONDONG

Jl. Raya Brondong No. 77, Kec. Brondong
Kab. Lamongan, Jawa Timur – 62263





LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BPR NUSAMBA BRONDONG

Jl. Raya Brondong No. 77, Kec. Brondong
Kab. Lamongan, Jawa Timur – 62263



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Informasi Umum	6
Pernyataan Kepatuhan	8
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan	8
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	18
Penjelasan Pos-pos Laba Rugi	29
Transaksi Pihak Berelasi	35
Pengungkapan Lainnya	36

LAMPIRAN

Kualitas Aset Produktif	Lampiran I
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Lampiran II
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Lampiran III
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Lampiran IV
<i>Cash Ratio</i>	Lampiran V
<i>Return on Asset</i> (ROA) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	Lampiran VI
<i>Return on Equity</i> (ROE)	Lampiran VII
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Lampiran VIII

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00005/3.0272/AU.8/07/1887-2/1/I/2026

**Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR Nusamba Brondong**

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **PT BPR Nusamba Brondong** ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Head Office

L'Avenue Office Tower 11th Floor Unit 11A
Jl. KH. Guru Amin Kav. 16
Pancoran - Jakarta Selatan 12780

T. 021-80667252
E. info@kapsr.co.id

Branch Office Bandung:

License Number: 439/KM.1/2013
Jl. Cipunagara No.14, Kel. Cihapit, Kec. Bandung Wetan,
Kota Bandung, Jawa Barat 40114

T. 022-63196079
E. info@kapsrbdg.co.id

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Head Office

L'Avenue Office Tower 11th Floor Unit 11A
Jl. KH. Guru Amin Kav. 16
Pancoran - Jakarta Selatan 12780

T. 021-80667252
E. info@kapjsr.co.id

Branch Office Bandung:

License Number: 439/KM.1/2013
Jl. Cipunagara No.14, Kel. Cihapit, Kec. Bandung Wetan,
Kota Bandung, Jawa Barat 40114

T. 022-63196079
E. info@kapjsrbdg.co.id

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

KAP JOJO SUNARJO & REKAN



Dr. Muhaimin, CA., CPA., CACP., CFI.

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1887

Registrasi Kantor Akuntan Publik No. NIU-KAP : KEP-439/KM.1/2013

12 Januari 2026



Head Office

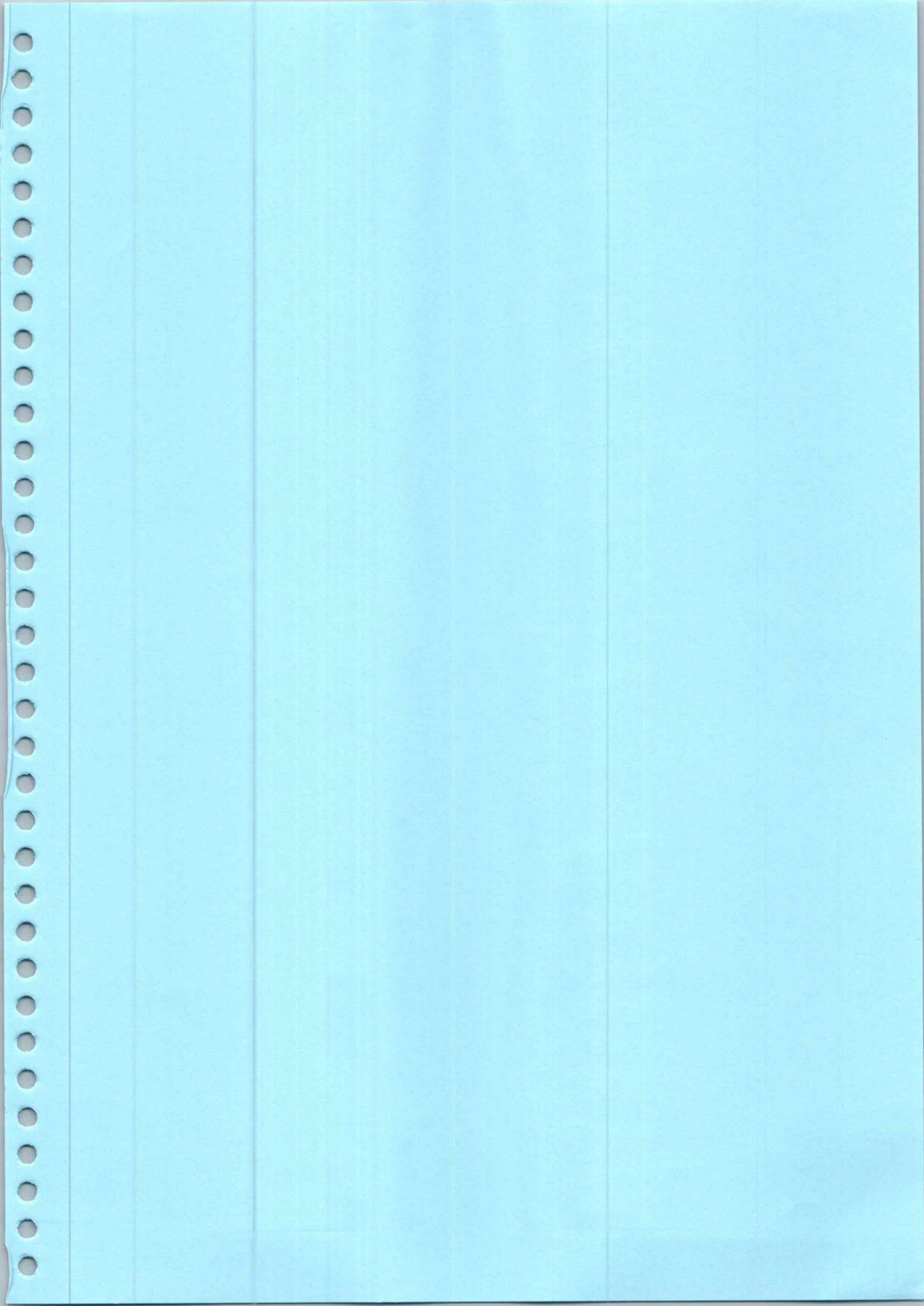
L'Avenue Office Tower 11th Floor Unit 11A
Jl. KH. Guru Amin Kav. 16
Pancoran - Jakarta Selatan 12780

T. 021-80667252
E. info@kapjsr.co.id

Branch Office Bandung:

License Number: 439/KM.1/2013
Jl. Cipunagara No.14, Kel. Cihapit, Kec. Bandung Wetan,
Kota Bandung, Jawa Barat 40114

T. 022-63196079
E. info@kapjsrbdg.co.id



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PERIODE 31 DESEMBER 2025
PT BPR NUSAMBA BRONDONG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Bambang Edy Yuwono, SE
Alamat Kantor : Jl. Raya 77 Brondong
Telepon/Fax : (0322) 661688/ Fax. (0322) 661235
Jabatan : Direktur Utama
- II. Nama : Soni Hari Triwasono, S.Pd., MH.
Alamat Kantor : Jl. Raya 77 Brondong
Telepon/Fax : (0322) 661688/ Fax. (0322) 661235
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Nusamba Brondong;
2. Laporan keuangan PT BPR Nusamba Brondong telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) serta Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat (PA BPR);
3. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Nusamba Brondong telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan PT BPR Nusamba Brondong tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal di PT BPR Nusamba Brondong.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Brondong, 12 Januari 2026

PT BPR Nusamba Brondong



Bambang Edy Yuwono, SE.
Direktur Utama

Soni Hari Triwasono, S.Pd., MH.
Direktur

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	3c, 4a	632.965.100	587.928.200
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	3f, 4b	2.232.089.432	2.357.654.931
Penempatan pada Bank Lain	3d, 4c	40.241.471.006	37.974.902.510
CKPN - Penempatan Pada Bank Lain -/-	3d, 4c	(131.125.874)	(129.352.985)
Total		40.110.345.132	37.845.549.525
Kredit yang Diberikan	3e, 4d	105.238.589.693	108.833.973.995
Provisi	3e, 4d	(1.181.882.998)	(1.511.956.095)
Pendapatan yang Ditangguhkan	3e, 4d	(162.312.236)	(60.697.988)
Restrukturisasi			
CKPN - Kredit Yang Diberikan -/-	3e, 4d	(8.468.684.997)	(6.270.195.336)
Total		95.425.709.462	100.991.124.576
Agunan yang Diambil Alih	3g, 4e	525.000.000	-
Jumlah Aset Lancar		138.926.109.126	141.782.257.232
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	3h, 4f		
Harga Perolehan		6.112.576.286	5.777.068.786
Akumulasi Penyusutan		(3.784.717.073)	(3.587.982.279)
Nilai Buku		2.327.859.213	2.189.086.507
Aset Lain-lain	3j, 4g	1.378.249.657	1.034.668.311
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.706.108.870	3.223.754.818
JUMLAH ASET		142.632.217.996	145.006.012.050

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan*

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Liabilitas Segera Dibayar	3k, 4h	468.047.856	495.921.781
Utang Bunga	3l, 4i	123.950.379	131.974.245
Utang Pajak	3m, 4j	112.865.365	26.694.164
Simpanan	3n, 4k	115.477.350.021	117.931.736.792
Simpanan dari Bank Lain	3o, 4l	2.940.000.000	3.290.000.000
Liabilitas Imbalan Kerja	3p, 4m	-	-
JUMLAH LIABILITAS		119.122.213.621	121.876.326.982
EKUITAS			
Modal Dasar	3r, 4n	20.000.000.000	20.000.000.000
Modal Belum Disetor	3r, 4n	(10.981.000.000)	(10.981.000.000)
Modal Disetor		9.019.000.000	9.019.000.000
Cadangan Umum	3r, 4o	1.803.800.000	1.803.800.000
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuannya	3r, 4q	12.687.204.375	12.306.885.068
JUMLAH EKUITAS		23.510.004.375	23.129.685.068
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		142.632.217.996	145.006.012.050

Brondong, 12 Januari 2026

Atas nama dan mewakili Direksi

**bank
nusamba**
bpr nusamba brondong

Bambang Edy Yuwono, SE.
Direktur Utama

Soni Hari Triwasono, S.Pd., MH.
Direktur

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual	3s, 5a	26.554.939.449	26.858.431.003
Provisi	3s, 5b	1.644.382.569	1.631.797.983
Jumlah Pendapatan Bunga		28.199.322.018	28.490.228.986
Beban Bunga (-)			
Kontraktual	3t, 5c	(5.395.596.593)	(5.630.728.584)
Provisi/Transaksi	3t, 5c	(18.375.000)	(46.841.637)
Jumlah Beban Bunga		(5.413.971.593)	(5.677.570.221)
PENDAPATAN BUNGA NETO		22.785.350.425	22.812.658.765
Pendapatan Operasional Lainnya	3s, 5d	1.978.849.058	2.075.834.289
Jumlah Pendapatan Operasional		24.764.199.483	24.888.493.054
BEBAN OPERASIONAL			
Beban CKPN dan Penyusutan	3t, 5e	(1.826.545.794)	(3.030.193.349)
Beban Pemasaran	3t, 5f	(505.076.625)	(488.675.643)
Beban Administrasi dan Umum	3t, 5g	(18.081.832.282)	(18.554.519.833)
Jumlah Beban Operasional		(20.413.454.701)	(22.073.388.825)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		4.350.744.782	2.815.104.229
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	3u, 5h	271.929.503	589.678.294
Beban Non Operasional	3v, 5i	(141.725.198)	(110.555.966)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		130.204.305	479.122.328
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		4.480.949.087	3.294.226.557
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini	3w, 5j	(940.648.029)	(694.420.290)
Pajak Tangguhan	3w, 5k		
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		(940.648.029)	(694.420.290)
LABA (RUGI) BERSIH		3.540.301.058	2.599.806.267
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan		-	-
Pasca Kerja		-	-
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Terkait		-	-
Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif		-	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		3.540.301.058	2.599.806.267

Brondong, 12 Januari 2026

Atas nama dan mewakili Direksi

**bank
nusamba**
bpr nusamba brondong

Bambang Edy Yuwono, SE.
Direktur Utama

Soni Hari Triwasono, S.Pd., MH.
Direktur

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	MODAL DISETOR	Saldo Laba yang Telah Ditentukan		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Saldo Laba	Jumlah
		Cadangan Tujuan	Cadangan Umum			
Saldo 31 Desember 2023	9.019.000.000	-	1.803.800.000	13.667.078.801	15.470.878.801	24.489.878.801
Pembagian Dividen	-	-	-	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
Pembagian Bonus/Tantiem	-	-	-	(460.000.000)	(460.000.000)	(460.000.000)
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	2.599.806.267	2.599.806.267	2.599.806.267
Saldo 31 Desember 2024	9.019.000.000	-	1.803.800.000	12.306.885.068	14.110.685.068	23.129.685.068
Pembagian Dividen	-	-	-	(2.000.000.000)	(2.000.000.000)	(2.000.000.000)
Pembagian Bonus/Tantiem	-	-	-	(100.000.000)	(100.000.000)	(100.000.000)
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	3.540.301.058	3.540.301.058	3.540.301.058
Pembentukan Cadangan Kerugian Nilai	-	-	-	(1.059.981.751)	(1.059.981.751)	(1.059.981.751)
Saldo 31 Desember 2025	9.019.000.000	-	1.803.800.000	12.687.204.375	14.491.004.375	23.510.004.375

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025	Tahun 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan bunga	24.723.969.501	26.858.431.003
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	-	1.631.797.983
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	166.750.270	281.969.073
Pendapatan operasional lainnya	1.169.347.723	1.793.865.216
Pembayaran beban bunga	(250.187.925)	(5.677.570.221)
Beban gaji dan tunjangan	(11.903.681.807)	(11.990.940.042)
Beban umum dan administrasi	(4.980.805.731)	(7.111.249.178)
Beban operasional lainnya	(378.532.079)	(2.971.199.605)
Pendapatan non operasional lainnya	271.929.503	589.678.294
Beban non operasional lainnya	(141.725.198)	(110.555.966)
Pembayaran pajak penghasilan	(940.648.029)	(694.420.290)
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional :		
- Penempatan pada bank lain	(157.084.979)	70.336.091
- Kredit yang diberikan	5.026.919.749	8.995.589.834
- Agunan Yang Diambil Alih	-	444.023.123
- Aset lain-lain	(2.103.040.929)	401.476.584
- Penyesuaian lainnya atas aset operasional	3.152.867.035	2.192.084.028
Kenaikan (Penurunan) atas liabilitas operasional :		
- Liabilitas segera	(27.873.924)	(647.310.934)
- Tabungan	(1.313.348.964)	5.380.827.754
- Deposito	(5.593.629.258)	2.233.294.000
- Simpanan dari bank lain	(534.243.767)	(3.050.000.000)
- Liabilitas lain-lain	(45.803.044)	5.052.046
Kas netto yang diperoleh dari Aktivitas Operasional	6.141.178.147	18.625.178.793
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/penjualan Aset Tetap dan inventaris	(669.591.000)	(284.786.145)
Pembelian/penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-
Kas netto yang digunakan dari Aktivitas Investasi	(669.591.000)	(284.786.145)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Deviden	(2.000.000.000)	(3.500.000.000)
Penyesuaian Lainnya	(1.159.981.751)	(460.000.000)
Kas netto yang digunakan dari Aktivitas Pendanaan	(3.159.981.751)	(3.960.000.000)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	2.311.605.396	14.380.392.648
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	38.562.830.710	24.182.438.062
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	40.874.436.106	38.562.830.710
Kas dan Setara Kas Akhir		
Kas	632.965.100	587.928.200
Penempatan pada Bank Lain	40.241.471.006	37.974.902.510
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir	40.874.436.106	38.562.830.710

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan*

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM BPR

A. Pendirian Perusahaan

PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Brondong (selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta Notaris Abdul Latief, S.H., No. 111. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-10272 HT.01.01-TH.89, tanggal 8 November 1989. Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, salah satunya dengan akta Notaris Ny. Fitri Budiani, S.H., M.Kn. No.35 tanggal 19 Desember 2024, mengenai persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar, Maksud, dan Tujuan, dan Persetujuan Perubahan Pasal 12 Ayat (1) Anggaran Dasar, Tugas, dan Wewenang Direksi Perseroan. Sesuai perubahan akta tersebut, terdapat perubahan nomenklatur yang semula "PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Brondong disingkat PT BPR Nusamba Brondong" menjadi "PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong disingkat PT BPR Nusamba Brondong". Terakhir akta mengalami perubahan dengan akta Notaris Ny. Fitri Budiani, S.H., M.Kn. No. 05 tanggal 15 Juli 2025 tentang persetujuan pengangkatan kembali seorang anggota Direksi Perseroan.

B. Perizinan

Perizinan yang dimiliki Bank sampai saat ini adalah sebagai berikut.

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.235.194.6-641.000 atas nama PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong.
2. Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Brondong dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990.
3. Nomor Induk Bersama (NIB) 9120006721975 atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Brondong yang ditetapkan tanggal 17 Juli 2019, yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Terdapat perubahan ke-1 tanggal 9 Januari 2025 tentang perubahan nomenklatur menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong.
4. Nomor Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) 912000672197500010001, yang merupakan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Brondong yang ditetapkan pada tanggal 03 Agustus 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan akta perubahan No. 35 tanggal 19 Desember 2024, maksud dan tujuan Bank ini adalah melaksanakan fungsinya sebagai Bank Perekonomian Rakyat, antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2. Menyalurkan dan memberikan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah.
3. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain.
4. Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
5. Melakukan penyertaan modal pada Lembaga Penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain dan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.
7. Melakukan kegiatan usaha pengalihan piutang.
8. Melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
9. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, dalam hal nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya.
10. Menjalankan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan persetujuan otoritas terkait.
11. Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank dapat melakukan usaha sendiri maupun bekerjasama dengan perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM BPR - (Lanjutan)

D. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 19 Januari 2017 terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 1.700.000.000,- atau sejumlah 17.000 saham. diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Sentra Modal Harmoni. Atas penambahan setoran modal tersebut telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan dapat diakui sebagai Modal Disetor berdasarkan surat No. S-13/KR.0411/2017 tanggal 13 Februari 2017. Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 1 November 2017 terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau sejumlah 20.000 saham. diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Sentra Modal Harmoni. Atas penambahan setoran modal tersebut. telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan dapat diakui sebagai Modal Disetor berdasarkan surat No. SR-1423/KR.0411/2017 tanggal 6 Desember 2017.

Komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jumlah Saham	Jumlah Modal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Fajar Mas Murni	8.850	885.000.000	9,81%
2.	PT Sentra Modal Harmoni	81.340	8.134.000.000	90,19%
Jumlah Modal Disetor		90.190	9.019.000.000	100,00%

E. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 15 Juli 2025 di hadapan Notaris Fitri Budiani, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Pusat, mengenai tentang Persetujuan Pengangkatan Kembali Seorang Anggota Direksi Perseroan. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0312703 tertanggal 17 Juli 2025.

Susunan pengurus per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Dingot Sinaga, SE., MM.
- Komisaris : Muslim Thoyib, SE.

Dewan Direksi:

- Direktur Utama : Bambang Edy Yuwono, SE.
- Direktur : Soni Hari Triwasono, S.Pd., MH.

Pengangkatan Kembali Direksi/Dewan Komisaris telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Juli 2025 dengan nomor surat 512/BRD/DIR/VII/2025.

F. Tempat dan Kedudukan

Seluruh kegiatan operasional dan layanan PT BPR Nusamba Brondong diselenggarakan di 1 (satu) Kantor Pusat, 2 (Dua) Kantor Cabang, dan 9 (Sembilan) Kantor Kas dengan jumlah karyawan pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebanyak 117 dan 112 orang.

Bank memiliki 1 (satu) kantor pusat operasional, 2 (dua) kantor cabang, dan 9 (sembilan) kantor kas yang telah dicatat dalam tata usaha Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri sebagai berikut:

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM BPR - (Lanjutan)

F. Tempat dan Kedudukan - (Lanjutan)

No.	Keterangan	Tanggal Surat	Nomor Surat	Alamat
1.	Kantor Pusat	18 Januari 1990	SK Menteri Keuangan Kep.023/KM.13/1990	Jl. Raya No. 77, Kec. Brondong, Kab. Lamongan
2.	Kantor Cabang Gresik	27 Desember 2011	SP OJK No.13/405/DKBU/PL BPR/Sb	Komplek Ruko KIG Blok A21, Jl. Tridharma, Kec. Kebomas, Kab. Gresik.
3.	Kantor Cabang Tuban	22 Desember 2016	SP OJK No. S- 605/KR.041/2016	Jl. Raya Brawijaya, Kebonsari, Tuban
4.	Kantor Kas Bungah	19 Oktober 2015	SP OJK No. S- 88/KR/3/2015	Jl. Raya Bungah No. 22 (Utara Polsek Bungah), Kec. Bungah, Gresik
5.	Kantor Kas Tikung	24 Juli 2006	SP OJK No. 8/43/DPBPR/P3BPR/ Sb	Jl. Raya Mantup No. 38, Kec. Tikung, Kab. Lamongan
6.	Kantor Kas Karanggeneng	06 Juli 2007	SE OJK No. 9/43/DPBPR/P3BPR/ Sb	Jl. Raya Sumberwudi No. 88 , Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan
7.	Kantor Kas Maduran	17 Januari 2008	SP OJK No. 10/8/DPBPR/P3BPR/ Sb	Jl. Raya Pangean Maduran No. 7, Kec. Maduran, Kab. Lamongan
8.	Kantor Kas Paciran	13 Agustus 2008	SP OJK No. 10/136/DKBU/PLBPR/ /Sb	Jl. Raya Sunan Drajat No. 07, Kec. Paciran, Kab. Lamongan
9.	Kantor Kas Babat	13 Agustus 2008	SP OJK No. 10/136.DKBU.PLBPR/ /Sb	Jl. Raya Jombang Babat, Rawarejo RT 01 RW 06 .No.142, Kel. Banaran, Kec. Babat, Kab. Lamongan
10.	Kantor Kas Sugio	14 Januari 2010	SP OJK No. 12/15/DKBU/PLBPR/ Sb	Jl. Komplek Pertokoan No. 2 Sugio Lamongan
11.	Kantor Kas Lamongan	25 Oktober 2010	SP OJK No. 12/422/DKBU/PLBPR/ /Sb	Jl. Karangbinangun No.20, Desa Deket Kulon, Kec. Deket, Kab. Lamongan
12.	Kantor Kas Ngimbang	17 Desember 2010	SP OJK No.12/506/DKBU/PL BPR/Sb	Jl. Gajah Mada 99 Ngimbang Lamongan

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi PT BPR Nusamba Brondong menyatakan bahwa Laporan keuangan Tahun 2025 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan ketentuan regulator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi BPR.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

a. Dasar Pengukuran

Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*), kecuali untuk beberapa instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK EP. Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), kecuali untuk Laporan Arus Kas.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - (Lanjutan)

A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan - (Lanjutan)

b. Dampak Penerapan Awal SAK EP (Transisi) Efektif 1 Januari 2025

Bank menerapkan SAK EP menggantikan SAK ETAP. Penerapan dilakukan secara retrospektif dengan penyesuaian yang diakui pada Saldo Laba awal periode penyajian, dengan pengecualian berikut:

- Penerapan Prospektif (Suku Bunga Efektif)
Berdasarkan evaluasi manajemen atas kendala sistem informasi, penerapan retrospektif untuk perhitungan suku bunga efektif (*Effective Interest Rate/EIR*) pada Kredit yang Diberikan dianggap "Tidak Praktis" (*Impracticable*). Oleh karena itu, sesuai ketentuan transisi SAK EP dan SEOJK 21/2024, Bank menerapkan metode suku bunga efektif secara prospektif untuk kredit yang ada mulai 1 Januari 2025.
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
Kekurangan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) akibat penerapan awal SAK EP diakui langsung sebagai pengurangan Saldo Laba pada awal periode.
- Laporan Keuangan Komparatif
Laporan Keuangan Komparatif yang disajikan menggunakan informasi Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Audited disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

B. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Bank mengidentifikasi pihak berelasi sesuai SAK EP Bab 33 dan ketentuan POJK No. 1 Tahun 2024. Pihak berelasi mencakup personil manajemen kunci (Direksi, Komisaris, Pejabat Eksekutif), pemegang saham pengendali, anggota keluarga dekat, dan entitas yang dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut.

Pengungkapan: Bank mengungkapkan total kompensasi personil manajemen kunci, serta rincian transaksi (saldo, jenis, syarat) dengan pihak berelasi.

Persetujuan Kredit: Setiap penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada Pihak Terkait wajib memperoleh persetujuan dari paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan BMPK.

C. Kas dan Setara Kas

Kas

Terdiri dari uang tunai (kertas dan logam) baik Rupiah maupun mata uang asing (jika ada) yang tersedia di kas besar, kas kecil, serta kas dalam perjalanan.

Setara Kas

Investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang segera dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, dengan jangka waktu jatuh tempo paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya.

D. Penempatan Pada Bank Lain

Mencakup penempatan dana pada Bank Umum atau BPR lain dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, dan Sertifikat Deposito yang tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Penempatan pada bank syariah. Giro dan tabungan wadiah/mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Pendapatan bonus/bagi hasil diakui secara kas sebesar jumlah yang diterima. Deposito mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Pendapatan bagi hasil diakui secara akrual berdasarkan laporan bagi hasil bank syariah sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

Bank membentuk CKPN atas penempatan pada bank lain berdasarkan evaluasi risiko kredit pihak lawan. Jika penempatan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), CKPN dibentuk atas sisa nilai yang tidak dijamin.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - (Lanjutan)

E. Kredit Yang Diberikan

- 1) Kredit dicatat sebesar baki debet pinjaman dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pendapatan bunga diakui menggunakan metode Suku Bunga Efektif (EIR). Provisi dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung diamortisasi sepanjang umur kredit sebagai penyesuaian terhadap *yield* efektif.
- 2) Kredit *Channeling* (penerusan kredit) adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. BPR tidak menanggung risiko atas kredit dan untuk tugas tersebut BPR menerima imbalan jasa berupa *fee* atau bagian dari bunga.
- 3) Plafond adalah jumlah maksimum kredit yang diterima debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/kredit.
- 4) Pokok Kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).
- 5) Kewajiban Debitur adalah seluruh kewajiban debitur kepada BPR berupa Pokok Kredit ditambah tagihan bunga, denda (*Penalty*), dan biaya lainnya sesuai dengan perjanjian kredit.
- 6) Bunga Kredit Kontraktual adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas Kredit yang diterimanya dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
- 7) Provisi Kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
- 8) Denda (*Penalty*) adalah imbalan yang harus dibayar oleh debitur atas keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo, termasuk imbalan atas pembayaran atau pelunasan dipercepat dari jatuh tempo.

Restrukturisasi Kredit

- a. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Restrukturisasi Kredit:
 - 1) Penjadwalan kembali, antara lain dilakukan melalui perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau perubahan jangka waktu;
 - 2) Persyaratan kembali, antara lain dilakukan melalui:
 - a) Perubahan jumlah pembayaran atau angsuran;
 - b) Perubahan jangka waktu;
 - c) Penurunan suku bunga Kredit;
 - d) Penghapusan sebagian kewajiban; atau
 - 3) Penataan kembali, antara lain dilakukan melalui penambahan fasilitas Kredit BPR atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Penurunan Nilai (CKPN):

Bank mengevaluasi penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan sesuai POJK No. 1 Tahun 2024 dan SAK EP Bab 11:

- Evaluasi Individual

Dilakukan untuk debitur dengan eksposur signifikan secara individual (25 debitur terbesar). Kerugian dihitung berdasarkan selisih antara nilai tercatat dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (*Discounted Cash Flow*).

- Evaluasi Kolektif

Dilakukan untuk kelompok kredit dengan karakteristik risiko serupa menggunakan metode statistik (*Migration Analysis*) untuk menentukan *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Perhitungan Penurunan Nilai (CKPN)

Nilai CKPN didapatkan dari perkalian antara nilai PD, LGD, dan outstanding kredit (*Exposure At Default* / EAD).

$\text{Penurunan nilai} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$
--

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - (Lanjutan)

E. Kredit Yang Diberikan - (Lanjutan)

Kebijakan Penurunan Nilai (CKPN) BPR Nusamba Brondong

Berdasarkan SK Direksi No 766.1/BRD/DIR/XI/2025 Tentang Penetapan Metode Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang digunakan oleh PT BPR Nusamba Brondong menggunakan metode sebagai berikut :

1) CKPN Individual

- a. Debitur yang masuk dalam kategori individual adalah 25 debitur inti yang masuk dalam kategori Non-Performing Loan (NPL) berdasarkan baki debit kredit terbesar.
- b. Kelanjutan Penghitungan:
 - Debitur yang sudah pernah dihitung secara individual akan tetap dihitung secara individual sampai:
 1. Komitmen penyelesaian debitur berakhir (misalnya lunas, write-off, atau restrukturisasi yang kembali ke kolektabilitas lancar dan atau dalam perhatian khusus),
 2. Atau terjadi perubahan status signifikan pada kredit tersebut (misalnya perbaikan kualitas kredit ke kolektabilitas lancar atau dalam perhatian khusus
 - Dalam hal debitur belum memenuhi kriteria dalam point (a) maka debitur tersebut masih tetap diperhitungkan dalam kategori CKPN Individual
 1. Kredit restrukturisasi dengan baki debit paling sedikit Rp. 200.000.000,- wajib perhitungan dalam CKPN secara Individual, tanpa memperhatikan status kualitas kredit dan tanpa mempertimbangkan apakah termasuk dalam 25 (dua puluh lima) debitur inti terbesar
 2. Perhitungan CKPN Individual akan dihitung disetiap bulan data

2) CKPN Kolektif

- a. Metode Perhitungan
 - *Probability of Default* (PD) dihitung menggunakan metode *Migration Analysis*
 - *Loss Given Default* (LGD) dihitung dengan metode *Combined Expected Recoveries* dan *Collateral Shortfall*
 - Perhitungan PD dan LGD Menggunakan rentang data 5 tahun terakhir
- b. Segmentasi
Perhitungan CKPN didasarkan pada jenis bunga kredit, meliputi:
 - *Flat*
 - *Anuitas*
 - *Sliding*
- c. EAD (*Exposure at Default*)
 - EAD yang diperhitungkan dalam pembentukan CKPN adalah Baki Debit kontraktual kredit yang memiliki tunggakan >7 hari dan tidak pernah direstrukturisasi.
 - EAD atas seluruh kredit restrukturisasi diperhitungkan dalam pembentukan CKPN.
 - EAD yang diperhitungkan sesuai bulan data.
- d. Frekuensi Perhitungan
 - Frekuensi perhitungan PD 1 (satu) kali dalam setahun, dimana PD yang dihitung untuk awal tahun dapat digunakan hingga akhir tahun.
 - Frekuensi perhitungan LGD dihitung setiap bulan, dikarenakan memperhitungkan recovery yang diperoleh dari pembayaran write-off di setiap bulannya.
 - Perhitungan CKPN Kolektif akan dihitung disetiap bulan data.
- e. Dalam perhitungan CKPN Kolektif, kredit restrukturisasi dihitung secara terpisah dengan kredit non-restrukturisasi, sehingga pembentukan PD, EAD dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing portofolio.

Perhitungan Cadangan Kerugian ini menggunakan retrospektif sesuai dengan SAK-EP dan Pedoman Akuntansi BPR untuk penurunan nilai pada Penempatan pada Bank Lain dan Kredit Yang Diberikan dengan menggunakan saldo laba ditahan tahun 2024 untuk pembentukan kekurangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Yang Diberikan Bank sebesar Rp. 1.059.981.751,- sesuai dengan RUPS tanggal 31 Januari 2025.

Hapus Buku

Kredit dihapusbukukan dari neraca apabila tidak terdapat prospek realistis untuk pemulihan di masa depan dan telah dibentuk CKPN 100%.

Hapus Tagih

Adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - (Lanjutan)

F. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima merupakan pendapatan bunga dari aset produktif (Kredit dan Penempatan pada Bank Lain) dengan kualitas Lancar (L) dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) yang telah diakui sebagai pendapatan (akrual) namun belum diterima pembayarannya secara tunai.

Untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M), pendapatan bunga diakui secara kas (*cash basis*). Bunga yang belum dibayar pada kualitas ini dicatat pada rekening administratif sebagai tagihan kontinjensi.

G. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

AYDA diakui pada saat pengambilalihan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit atau Nilai Realisasi Bersih (*Net Realizable Value* - nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan).

AYDA tidak disusutkan. Bank mengevaluasi nilai AYDA pada setiap tanggal pelaporan. Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai realisasi bersih lebih rendah dari nilai tercatat.

AYDA yang tidak terjual dalam jangka waktu tertentu diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dengan persentase bertahap (15%, 50%, 100%) sesuai umur AYDA.

H. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Kebijakan akuntansi aset tetap dan inventaris sebagai berikut:

- 1) Pada awal perolehan aset tetap dan inventaris diakui sebesar biaya perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap dan inventaris melalui pertukaran adalah sebesar:
 - a. nilai wajar aset yang diserahkan, jika pertukaran memiliki substansi komersial;
 - b. nilai aset yang diterima, jika pertukaran memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal (nilai wajar aset yang diterima lebih andal dibandingkan nilai wajar aset yang diserahkan);
 - c. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima/diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
- 3) Penyusutan aset tetap dan inventaris dilakukan secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan. Penyusutan dihentikan ketika aset tetap dihentikan pengakuannya. Penyusutan setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
- 4) Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai sebesar nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, sedangkan pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan. Indikasi penurunan nilai berasal dari sumber informasi eksternal dan sumber informasi internal. Pengujian penurunan nilai dilakukan setelah terdapat indikasi penurunan nilai, dan pemulihan nilai merupakan kebalikan dari indikasi penurunan nilai.
- 5) Selisih antara nilai aset tetap dan inventaris setelah revaluasi dengan nilai tercatat diakui surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas. Surplus revaluasi aset tetap tersebut direklasifikasi ke saldo laba (melalui laporan perubahan ekuitas) pada saat aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

Penyajian aset tetap dan inventaris berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Surplus revaluasi aset tetap disajikan pos tersendiri dalam ekuitas. Aset tetap dan inventaris berasal dari sewa pembiayaan disajikan tersendiri dalam pos aset tetap dan inventaris, kewajiban sewa pembiayaan disajikan dalam pinjaman yang diterima.

Tabel penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) kecuali bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis:

- Bangunan Permanen	: Penyusutan 5% per tahun (20 tahun) dari harga perolehan
- Bangunan Non Permanen	: Penyusutan 10% per tahun (10 tahun) dari harga perolehan
- Kendaraan (Golongan 1)	: Penyusutan 25% per tahun (4 tahun) dari harga perolehan
- Kendaraan (Golongan 2)	: Penyusutan 12,5% per tahun (8 tahun) dari harga perolehan
- Inventaris (Golongan 1)	: Penyusutan 25% per tahun (4 tahun) dari harga perolehan
- Inventaris (Golongan 2)	: Penyusutan 12,5% per tahun (8 tahun) dari harga perolehan

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sebesar tarif penyusutan yang sesuai.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - (Lanjutan)

I. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

- 1) Suatu aset dapat diidentifikasi apabila:
 - a. dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari BPR dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau
 - b. muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari BPR atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- 2) Umur manfaat
 - a. umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal dari hak kontraktual/hukum maksimal sama dengan periode hak kontraktual. Apabila periode hak kontraktual/hukum dapat diperbarui, maka umur manfaat meliputi periode pembaruan dengan syarat biaya pembaruan tidak signifikan.
 - b. umur manfaat aset tidak berwujud yang tidak dapat diestimasi adalah 10 tahun.
- 3) Nilai residu (nilai sisa) aset tidak berwujud adalah nol, kecuali:
 - a. ada komitmen pihak ketiga untuk membeli aset tidak berwujud pada akhir umur manfaatnya;
 - b. ada pasar aktif bagi aset tidak berwujud serta nilai residu dapat ditentukan dengan mengacu pada harga pasar tersebut dan kemungkinan pasar aktif akan tetap ada pada akhir umur manfaatnya.
- 4) Biaya pendirian tidak memenuhi definisi aset tidak berwujud, sehingga biaya pendirian tidak dapat ditangguhkan dan harus dialokasikan sebagai beban.

J. Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material, maka wajib disajikan tersendiri dalam Laporan Posisi Keuangan.

K. Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas yang telah jatuh tempo dan atau segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Transaksi kewajiban segera diakui pada saat kewajiban jatuh tempo atau kewajiban segera dapat ditagih oleh pemiliknya, baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

L. Utang Bunga

Utang bunga merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian kewajiban bunga adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

- Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dan lain-lain.
- Utang bunga antara lain terdiri dari:
 - kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga);
 - bunga deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah; dan
 - bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

M. Utang Pajak

Utang pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR. Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar di muka.

Utang pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke Kas Negara. Utang pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - (Lanjutan)

N. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

- 1) Bentuk-bentuk simpanan berupa:
 - Tabungan, yaitu simpanan pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - Deposito, yaitu simpanan pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR yang bersangkutan. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu;
 - Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut.

O. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

- 1) Tabungan dari Bank Lain
 - Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh
 - Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
 - Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
- 2) Deposito dari Bank Lain
 - Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.
 - Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
 - Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah.

P. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

Liabilitas imbalan kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja.

Bank mengakui liabilitas imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan liabilitas tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya, imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program iuran pasti.

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh Bank sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen.

Imbalan kerja terdiri dari:

- 1) Imbalan kerja jangka pendek,
- 2) Imbalan pasca kerja,
- 3) Imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan
- 4) Pesangon pemutusan kerja.

Imbalan pasca kerja terdiri dari iuran pasti dan imbalan pasti. Iuran pasti adalah imbalan pasca kerja di mana entitas membayar secara tetap kepada entitas terpisah (dana) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran berikutnya atau melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa mereka periode kini dan periode lalu. Dengan demikian, jumlah imbalan pasca kerja yang diterima pekerja ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayar oleh entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) ke program imbalan pasca kerja atau perusahaan asuransi, ditambah hasil investasi iuran tersebut. Imbalan pasti adalah imbalan pasca kerja, di mana kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan mantan pekerja, dengan risiko aktuarial (di mana imbalan akan lebih besar daripada yang diperkirakan) dan risiko investasi secara substantif berada pada entitas.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 38 tentang Jaminan Hari Tua, Bank telah melaksanakan kewajiban imbalan pasca kerja yang bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - (Lanjutan)

P. Liabilitas Imbalan Kerja - (Lanjutan)

Perusahaan dan karyawan/pekerja secara bersama-sama membayar iuran yang besarnya ditetapkan sebesar 12% dari gaji pokok dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) 9% dibayarkan oleh perusahaan; dan
- 2) 3% dibayarkan oleh karyawan/pekerja.

Saldo DPLK yang terbentuk dapat dikompensasikan dengan seluruh pelaksanaan pemutusan hubungan kerja. Apabila saldo dan hasil pengembangan porsi perusahaan lebih kecil dari perhitungan pesangan, maka atas kekurangan tersebut menjadi beban perusahaan.

Q. Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung liabilitas BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Termasuk dalam liabilitas lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

R. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban.

Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah.

Komponen ekuitas untuk BPR antara lain terdiri dari:

- 1) Modal
 - a. Modal Dasar, yaitu seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
 - b. Modal Disetor, yaitu modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.
 - c. Tambahan Modal Disetor (Agi Saham), yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
 - d. Modal Sumbangan, yaitu sumbangan yang berasal dari pemilik BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik.
- 2) Dana Setoran Modal - Ekuitas

Dana Setoran Modal - Ekuitas (DSM - Ekuitas) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- 3) Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

Laba/rugi yang belum direalisasi adalah selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat.
- 4) Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus revaluasi aset tetap adalah selisih nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.
- 5) Saldo Laba
 - a. Saldo Laba (Laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap.
 - b. Saldo laba dikelompokkan menjadi:
 - i. Cadangan Tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan;
 - ii. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal; dan
 - iii. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya, dan
 - laba rugi periode berjalan.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - (Lanjutan)

S. Pendapatan Operasional

- 1) Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- 2) Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, di mana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi beban-beban yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (beban transaksi).
- 3) Provisi adalah beban yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
- 4) Beban transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal beban transaksi dibebankan kepada nasabah, maka beban tersebut tidak termasuk dalam beban perolehan pemberian kredit.
- 5) Pendapatan operasional lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

T. Beban Operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR. Beban operasional dirinci sebagai berikut.

- 1) Beban Bunga
 - a) Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman.
 - b) Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya tabungan dan deposito, termasuk premi penjaminan simpanan, cash back, dan hadiah deposito berjangka.
 - c) Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.
- 2) Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- 3) Beban Pemasaran, termasuk pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan, iklan dalam rangka promosi, dan biaya transaksi atas kredit yang tidak disetujui.
- 4) Beban Penelitian dan Pengembangan, yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR.
- 5) Beban Administrasi dan Umum adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional BPR.

U. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

Termasuk dalam pos ini adalah keuntungan yang diperoleh dari penilaian kas dalam valuta asing, serta penjualan aset tetap dan inventaris dan Agunan yang Diambil Alih.

V. Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

Beban non operasional antara lain adalah:

- 1) Kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik BPR.
- 2) Denda/sanksi karena suatu pelanggaran.

W. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari Pajak Kini & Pajak Tangguhan.

Pajak Kini : dihitung berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan menggunakan tarif yang berlaku.

Pajak Tangguhan : diakui atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - (Lanjutan)

X. Perubahan Akuntansi

Pada tahun 2024, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat, diatur mengenai penetapan pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Berikut adalah penjelasan terkait perubahan tersebut :

- 1) Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat yang efektif pada posisi laporan keuangan 1 Januari 2025.
- 2) Dengan tidak berlakunya SAK ETAP pada tanggal 1 Januari 2025 maka Bank ditetapkan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) sebagai standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan BPR.
- 3) Perubahan Kebijakan Akuntansi ini diterapkan secara retrospektif sesuai dengan SAK EP dan Pedoman Akuntansi BPR untuk penurunan nilai pada Penempatan pada Bank Lain dan Kredit Yang Diberikan dengan menggunakan saldo laba ditahan tahun 2024 untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Yang Diberikan Bank sebesar Rp. 1.059.981.751,- berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong pada 31 Januari 2025.
- 4) Sedangkan perubahan Kebijakan Akuntansi ini diterapkan secara prospektif sesuai dengan SAK EP dan Pedoman Akuntansi BPR untuk Liabilitas Keuangan (perhitungan suku bunga efektif) pada Kredit Yang Diberikan dan Provisi, ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi, dan dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi, dikarenakan BPR belum bisa menyajikan kembali saldo awal dengan menggunakan saldo akhir 31 Desember 2023 maupun saldo akhir 31 Desember 2024, kondisi tidak praktis yang terdapat pada BPR dikarenakan belum adanya perhitungan otomatis yang disajikan oleh Core Banking sehingga menyusahkan BPR untuk melakukan perhitungan kembali.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Kas

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
- Kas Besar	631.070.000	585.278.700
- Kas Kecil	1.895.100	2.649.500
Jumlah Kas	632.965.100	587.928.200

B. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
- Pendapatan Bunga Kredit yang Diberikan	2.200.885.740	2.329.966.759
- Pendapatan Bunga Deposito	31.203.692	27.688.172
Jumlah Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	2.232.089.432	2.357.654.931

C. Penempatan pada Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Giro:		
- PT. Bank Mega Syariah (1000247533)	632.496.927	188.640.760
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk Cab Lamongan (0531006143)	18.345.337	18.278.791
Jumlah Giro	650.842.264	206.919.551

Tabungan:

Tabungan - Pihak Tidak Terkait

	Tahun 2025	Tahun 2024
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Blimbing (162601000178561)	6.822.148.541	395.623.513
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk KCP Brondong (0282211441)	4.018.505.767	2.918.894.968
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kas Paciran (1919677722)	2.103.024.637	-
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Lamongan (1780077888770)	1.537.465.927	1.720.457.250
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Lamongan (1400005452389)	1.435.177.197	919.528.805
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kas Ngimbang (0282951860)	1.175.735.085	2.157.494.812
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk KCP Karanggeneng (0872002707)	1.168.063.878	1.428.277.713
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Lamongan (1400010440320)	1.041.010.672	744.219.774
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tuban (10901002051560)	960.896.738	1.832.166.409
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Brondong (331616161)	950.546.011	3.967.760.297
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kas Sekaran (0282973227)	875.452.217	1.420.029.424
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kas Bungah (3331616171)	731.283.311	222.844.139
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk KCP Sugio (0862111117)	645.146.243	1.281.324.949
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Tuban (0172858074)	364.727.903	812.676.476
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Gresik (0272799997)	342.603.371	703.555.215
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kas Kranji (0282298813)	172.757.548	946.409.060
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk KCP Babat (0532053790)	118.192.370	162.414.628
- PT Bank Daerah Banten (3004063341)	93.297.349	-
- PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari (0110030888)	4.593.976	4.673.027
- PT Bank Muamalat Indonesia - KCP Lamongan (7720009955)	-	99.632.500
Jumlah Tabungan	24.560.628.741	21.737.982.959

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

C. Penempatan pada Bank Lain - (Lanjutan)

	Tahun 2025	Tahun 2024
Deposito:		
Deposito - <i>Pihak Tidak Terkait</i>		
- Deposito Bank Mega Syariah	8.000.000.000	8.000.000.000
- Deposito BPD Jateng	5.000.000.000	-
- Deposito PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk KCP Brondong	30.000.000	30.000.000
- Deposito PT. Bank Rakyat Indonesia	-	6.000.000.000
Jumlah Deposito - Pihak Tidak Terkait	13.030.000.000	14.030.000.000
Deposito - <i>Pihak Terkait</i>		
- Deposito PT. BPRS Mitra Harmoni Malang	2.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah Deposito - Pihak Terkait	2.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah Penempatan pada Bank Lain	40.241.471.006	37.974.902.510
CKPN Penempatan Pada Bank Lain -/-	(131.125.874)	(129.352.985)
Jumlah Penempatan pada Bank Lain - Bersih	40.110.345.132	37.845.549.525

Adapun Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Penempatan pada Bank Lain adalah:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal Tahun	129.352.985	59.016.894
Reklasifikasi CKPN Kredit Yang Diberikan	-	21.476.149
Pembentukan CKPN Tahun Berjalan	158.857.868	111.699.702
Penyisihan (Pemulihan) Beban CKPN	(157.084.979)	(62.839.760)
Saldo Akhir Tahun	131.125.874	129.352.985

D. Kredit yang Diberikan

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Kredit yang Diberikan - Pihak Tidak Terkait		
- Installment MK Pundi (N)	24.040.749.795	22.061.049.523
- Installment Konsumsi (N)	17.654.384.554	15.178.687.107
- Installment Investasi Pundi (N)	11.307.262.878	7.680.464.797
- Installment Investasi	10.276.748.259	13.926.569.807
- Reguller (Modal Kerja dan Investasi)	10.247.462.482	10.276.337.799
- Installment MK Umum	9.217.860.206	12.466.120.831
- Installment Investasi (N)	5.501.754.099	4.366.422.899
- Installment Konsumsi	5.029.037.923	7.612.978.286
- Installment MK Pundi	5.007.462.032	7.479.187.485
- Installment Investasi Pundi	1.896.033.011	3.137.028.383
- Installment Karyawan	1.544.440.036	1.633.979.209
- Installment Konsumsi Kendaraan (N)	1.316.267.708	681.496.245
- Installment MK Umum (N)	1.135.540.424	597.905.296
- Bul Pay Modal Kerja	536.129.850	1.182.946.550
- Installment Konsumsi Kendaraan	210.592.093	347.049.771
Jumlah Kredit yang Diberikan - Pihak Tidak Terkait	104.921.725.350	108.628.223.988
Kredit yang Diberikan - Pihak Terkait		
- Pinjaman Pengurus dan Pejabat Eksekutif	316.864.343	205.750.007
Jumlah Kredit yang Diberikan - Pihak Terkait	316.864.343	205.750.007
Jumlah Kredit yang Diberikan	105.238.589.693	108.833.973.995

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

D. Kredit yang Diberikan - (Lanjutan)

	Tahun 2025	Tahun 2024
- Kredit yang Diberikan - Provisi	(1.181.882.998)	(1.511.956.095)
- Pendapatan yang Ditangguhkan Restrukturisasi	(162.312.236)	(60.697.988)
Jumlah Kredit yang Diberikan - Netto Setelah Provisi dan Adm	103.894.394.459	107.261.319.912
- CKPN Kredit yang Diberikan	(8.468.684.997)	(6.270.195.336)
Jumlah Kredit yang Diberikan - Netto Setelah CKPN	95.425.709.462	100.991.124.576

a. Kredit yang Diberikan Berdasarkan Kualitas:

Kategori	2025		2024	
Kualitas Lancar	54.046.282.406	51,36%	62.684.490.850	57,60%
Kualitas Dalam Perhatian Khusus	25.804.952.940	24,52%	25.243.754.833	23,19%
Kualitas Kurang Lancar	1.594.682.732	1,52%	1.671.270.429	1,54%
Kualitas Diragukan	2.803.479.472	2,66%	4.731.359.578	4,35%
Kualitas Macet	20.989.192.144	19,94%	14.503.098.305	13,33%
Kualitas NPL	25.387.354.348	24,12%	20.905.728.312	19,21%
Jumlah	105.238.589.693	100%	108.833.973.995	100%

b. Kredit yang Diberikan Berdasarkan Keterkaitan:

Kategori	2025		2024	
Terkait	316.864.343	0,30%	205.750.007	0,19%
Tidak Terkait	104.921.725.350	99,70%	108.628.223.988	99,81%
Jumlah	105.238.589.693	100%	108.833.973.995	100%

c. Kredit yang Diberikan Berdasarkan Jenis Penggunaan:

Kategori	2025		2024	
Kredit Modal Kerja	48.397.218.789	45,99%	51.786.664.496	47,58%
Kredit Investasi	30.769.784.247	29,24%	31.387.368.873	28,84%
Kredit Konsumsi	26.071.586.657	24,77%	25.659.940.626	23,58%
Jumlah	105.238.589.693	100%	108.833.973.995	100%

d. Kredit yang Diberikan Berdasarkan Sektor Ekonomi:

Kategori	2025		2024	
Perdagangan	36.589.086.511	34,77%	40.077.674.833	36,82%
Perindustrian	10.999.408.310	10,45%	11.395.801.727	10,47%
Pertanian	23.490.208.935	22,32%	21.701.172.334	19,94%
Jasa	7.200.548.368	6,84%	9.109.964.821	8,37%
Lain-lain	26.959.337.569	25,62%	26.549.360.280	24,39%
Jumlah	105.238.589.693	100%	108.833.973.995	100%

e. Kredit yang Diberikan Berdasarkan Jangka Waktu

Kategori	2025		2024	
s.d. 12 Bulan	13.332.253.099	12,67%	13.909.157.875	12,78%
12 bulan s.d. 24 Bulan	17.015.253.893	16,17%	17.653.455.578	16,22%
> 24 bulan s.d. 36 Bulan	32.202.828.692	30,60%	32.831.615.701	30,17%
> 36 bulan s.d. 48 Bulan	16.747.744.397	15,91%	16.154.796.946	14,84%
> 48 bulan s.d. 60 Bulan	18.882.190.958	17,94%	21.481.018.780	19,74%
> 60 Bulan	7.058.318.654	6,71%	6.803.929.115	6,25%
Jumlah	105.238.589.693	100%	108.833.973.995	100%

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

D. Kredit yang Diberikan - (Lanjutan)

	Tahun 2025	Tahun 2024
f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit		
Saldo Awal Tahun	6.270.195.336	4.426.623.104
Tambahan Kekurangan CKPN dari Laba di Tahan	1.059.981.751	
Reklasifikasi CKPN Kredit Yang Diberikan	(239.752.994)	(21.476.149)
Pembentukan CKPN di Tahun Berjalan	1.232.117.633	2.458.479.223
Penghapusan Kredit Tahun Berjalan	(10.941.708)	(656.270.602)
Koreksi ABA	157.084.979	62.839.760
Saldo Akhir Tahun	8.468.684.997	6.270.195.336

Penghapusbukuan Kredit Tahun 2025 sesuai dengan Surat KKPO No. 329/ADM/BPR-BRD/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 dan Surat Direksi No. 814/BRD/DIR/XII/2025 untuk Kantor Pusat dan penghapusan kredit untuk Kantor Cabang Tuban dengan surat Kepala Cabang Tuban No. 133/TBN/KEP-CAB/XII/2025 dan Surat Direksi No. 819/BRD/DIR/XII/2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kantor	Nominal	Jumlah Debitur
1	Kantor Pusat Operasional	4.250.000	1 Orang
2	Kantor Cabang Tuban	6.691.708	1 Orang
Jumlah		10.941.708	2 Orang

Bank mempunyai beberapa jenis produk kredit yaitu installment, dan reguler dengan ketentuan yang berbeda berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 092/BRD/DIR/SK/I/2023.

Jenis Kredit : Kredit *Installment*

Suku Bunga (p.a.)

a) Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tuban

Plafond	Jangka Waktu			
	s.d. 1 tahun	s.d. 2 tahun	s.d. 3 tahun	Di atas 3 tahun
s.d. 20 juta	18%	19%	21%	22%
s.d. < 50 juta	17%	18%	21%	22%
s.d. < 100 juta	16%	18%	21%	21%
> 100 juta	16%	17%	19%	20%

b) Kantor Cabang Gresik

Jangka Waktu	Suku Bunga
s.d. 1 tahun	18%
> 1 tahun s.d. 2 tahun	19%
>2 tahun s.d. 8 tahun	21%

Jenis Kredit : Kredit *Reguler*

Suku Bunga (p.a.)	24% - 33% p.a.
Jangka Waktu	Maksimal 12 Bulan/ s.d. 1 tahun

E. Agunan yang Diambil Alih

Akun ini terdiri dari :

Agunan yang Diambil Alih

Jumlah

Tahun 2025	Tahun 2024
525.000.000	-
525.000.000	-

Telah ditetapkan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) per tanggal 31 Desember 2025 terhadap barang tidak bergerak yang dijaminkan atau sebagai agunan di PT. BPR Nusamba Brondong dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Nama Debitur : Mulyono Taufiq
- 2 Jaminan : Tanah dan bangunan di Ds. Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur dengan luas 153 (M2) . Bukti kepemilikan SHM No. 02337 yang saat ini telah menjadi bidang Hak Milik NIB-el Nomor:12.19.000038736.0 dengan atas nama Mulyono Taufiq.
- 3 Nominal AYDA : Rp. 525.000.000,-

Lelang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025 di kantor dan oleh KPKNL - Surabaya. Pelaksanaan lelang dilakukan melalui sistem penawaran online (*closed bidding*) di www.lelang.go.id, dan agunan tersebut dibeli sementara oleh bank dengan Acte de Command.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

F. Aset Tetap dan Inventaris

Akun ini terdiri dari:

Tahun 2025				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Harga Perolehan</u>				
Tanah	723.750.000	-	-	723.750.000
Bangunan	617.000.000	-	-	617.000.000
Inventaris	3.290.984.695	570.791.000	202.333.500	3.659.442.195
Kendaraan	1.145.334.091	98.800.000	131.750.000	1.112.384.091
Jumlah	5.777.068.786	669.591.000	334.083.500	6.112.576.286
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	(118.258.321)	30.850.000	-	(149.108.321)
Inventaris	(2.659.954.960)	360.095.272	202.333.500	(2.817.716.732)
Kendaraan	(809.768.998)	139.873.022	131.750.000	(817.892.020)
Jumlah	(3.587.982.279)	530.818.294	334.083.500	(3.784.717.073)
Nilai Buku	2.189.086.507			2.327.859.213
Tahun 2024				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Harga Perolehan</u>				
Tanah	723.750.000	-	-	723.750.000
Bangunan	617.000.000	-	-	617.000.000
Inventaris	3.272.941.317	238.586.145	220.542.767	3.290.984.695
Kendaraan	1.150.084.091	46.200.000	50.950.000	1.145.334.091
Jumlah	5.763.775.408	284.786.145	271.492.767	5.777.068.786
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	(87.408.321)	30.850.000	-	(118.258.321)
Inventaris	(2.577.618.813)	302.878.914	220.542.767	(2.659.954.960)
Kendaraan	(734.433.487)	126.285.511	50.950.000	(809.768.998)
Jumlah	(3.399.460.621)	460.014.425	271.492.767	(3.587.982.279)
Nilai Buku	2.364.314.787			2.189.086.507

Daftar Asuransi Tetap pada PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Dalam Proses Periode Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No. Polis	Jenis Aset Tetap	Tanggal	Nilai Pertanggungan (Rp)	Premi Asuransi (Rp)
1002050925000096 dan 1002210925000199	35 Kendaraan Roda 2 dan 1 Kendaraan Roda 4 (Pusat)	01/04/2025	739.850.000	9.462.540
1002050925000097	6 Kendaraan Roda 2 (Gresik)	01/04/2025	127.600.000	1.131.840
1002050925000098	1 Kendaraan Roda 2 (Tuban)	01/04/2025	43.000.000	369.750
Total			910.450.000	10.964.130

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

F. Aset Tetap dan Inventaris - (Lanjutan)

Polis Asuransi *Property All Risk*

No Polis	Jenis Aset Tetap	Tanggal	Nilai Pertanggungan	Premi Asuransi
1001090625000170	Gedung K Pusat Brondong	01/04/2025	5.254.000.000	4.312.200
1001090625000170	Gedung KK Tikung	01/04/2025	1.045.000.000	856.900
1001090625000170	Gedung KK Karanggeneng	01/04/2025	630.000.000	516.600
1001090625000170	Gedung KK Maduran	01/04/2025	606.000.000	484.800
1001090625000170	Gedung KK Babat	01/04/2025	615.000.000	512.500
1001090625000170	Gedung KK Paciran	01/04/2025	625.000.000	512.500
1001090625000170	Gedung KK Sugio	01/04/2025	527.000.000	432.140
1001090625000170	Gedung KK Lamongan	01/04/2025	567.000.000	464.940
1001090625000170	Gedung KK Ngimbang	01/04/2025	548.500.000	449.770
1001090625000170	Gedung KC Gresik	01/04/2025	987.000.000	896.808
1001090625000170	Gedung KK Bungah	01/04/2025	640.000.000	497.333
1001090625000170	Gedung KC Tuban	01/04/2025	845.000.000	752.900
Total			12.889.500.000	10.689.391

Polis Asuransi *Gempa Bumi*

No Polis	Jenis Aset Tetap	Tanggal	Nilai Pertanggungan	Premi Asuransi
1001220625000114	Gedung K Pusat Brondong	01/04/2025	5.254.000.000	5.314.000
1001220625000114	Gedung KK Tikung	01/04/2025	1.045.000.000	1.045.000
1001220625000114	Gedung KK Karanggeneng	01/04/2025	630.000.000	630.000
1001220625000114	Gedung KK Maduran	01/04/2025	606.000.000	606.000
1001220625000114	Gedung KK Panciran	01/04/2025	615.000.000	625.000
1001220625000114	Gedung KK Babat	01/04/2025	625.000.000	615.000
1001220625000114	Gedung KK Sugio	01/04/2025	527.000.000	527.000
1001220625000114	Gedung KK Lamongan	01/04/2025	567.000.000	567.000
1001220625000114	Gedung KK Ngimbang	01/04/2025	548.500.000	548.500
1001220625000115	Gedung KC Gresik	01/04/2025	987.000.000	1.017.000
1001220625000115	Gedung KK Bungah	01/04/2025	640.000.000	670.000
1001220625000117	Gedung KC Tuban	01/04/2025	845.000.000	905.000
Total			12.889.500.000	13.069.500

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

G. Aset Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Dibayar di Muka		
- Beban Dibayar di Muka - Sewa Tanah Gedung	973.854.164	595.479.140
- Beban Dibayar di Muka - Asuransi Karyawan	214.471.438	218.141.994
- Beban Dibayar di Muka - Pemeliharaan Gedung	97.161.500	34.521.015
- Beban Dibayar di Muka - Rumah Dinas	20.808.335	41.158.335
- Beban Dibayar di Muka - Asuransi Kebakaran	5.954.720	5.954.719
- Beban Dibayar di Muka - Lainnya	4.828.500	23.666.000
- Beban Dibayar di Muka - Asuransi Kendaraan	2.753.895	2.891.325
- Beban Dibayar di Muka - Asuransi Kas	1.001.250	1.001.250
Jumlah Beban Dibayar Dimuka	1.320.833.802	922.813.778
Persediaan Barang Cetakan		
- Persediaan Alat Tulis Menulis	38.926.565	68.110.833
- Persediaan Barang Promosi	12.753.850	43.313.700
- Persediaan Materai	700.000	430.000
Jumlah Persediaan Barang Cetakan	52.380.415	111.854.533
Lain-lain		
- Tagihan Lainnya	5.035.440	-
Jumlah Lain-lain	5.035.440	-
Jumlah Aset Lain-lain	1.378.249.657	1.034.668.311

Rincian Beban Dibayar di Muka - Sewa Tanah & Gedung adalah sebagai berikut.

Keterangan	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Uang Muka Sewa (Rp)
Kantor Kas Tikung Jl. Raga Mantup No. 38 Tikung Kab. Lamongan	30/05/2020	30/05/2030 (10 tahun)	190.666.655
Kantor Kas Karanggeneng Jl. Raga Karanggeneng No. 62 Karanggeneng Lamongan	05/02/2024	05/02/2029 (5 tahun)	84.791.659
Kantor Kas Maduran Jl. Raga Maduran - Maduran Lamongan	17/04/2025	17/04/2035 (10 tahun)	74.250.000
Jumlah yang Dipindahkan			349.708.314

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

G. Aset Lain-lain - (Lanjutan)

Rincian Beban Dibayar di Muka - Sewa Tanah & Gedung adalah sebagai berikut.

Keterangan	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Uang Muka Sewa (Rp)
Jumlah Pindahan			349.708.314
Kantor Kas Paciran			
Jl. Sunan Drajat Ds. Banjarwati, Kec. Paciran Kab. Lamongan	21/02/2023	21/02/2028 (5 tahun)	50.416.664
Kantor Kas Sugio			
Desa Supenuh Kec. Sugio Kab Lamongan	14/02/2017	14/02/2027 (10 tahun)	6.770.853
Kantor Kas Sugio			
Desa Supenuh Kec. Sugio Kab Lamongan	07/11/2019	11/07/2029 (10 tahun)	34.500.000
Kantor Kas Lamongan			
Kel.Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan	15/06/2025	15/06/2028 (3 tahun)	71.775.000
Kantor Kas Ngimbang			
Desa Sengrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan	25/07/2025	25/07/2028 (3 tahun)	28.333.334
Kantor Kas Ngimbang			
Desa Sengrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan	25/11/2025	25/11/2028 (3 tahun)	58.933.334
Kantor Kas Bungah			
Jl. Raga Bungah No. 8 Kec Bungah Kab. Gresik	07/05/2025	07/05/2030 (5 tahun)	102.666.665
Kantor Cabang Tuban			
Jl Brawijaya Tuban	17/02/2021	17/02/2026 (5 tahun)	3.750.000
Kantor Cabang Tuban			
Jl Brawijaya Tuban	13/10/2025 dan 23/12/2025	DP dan Pelunasan sewa ruko	267.000.000
Total			973.854.164

H. Liabilitas Segera Dibayar

Akun ini terdiri dari:

Kepada Pemerintah:

	Tahun 2025	Tahun 2024
- PPh 21	134.997.011	167.366.536
- PPh Pasal 25	-	79.943.241
- PPh Pasal 4 Ayat 2	60.674.066	63.557.002
- PPh Hadiah	13.404.000	7.908.000
- PPh 23/26	11.489.447	9.587.416

Setoran Titipan

- Titipan Asuran Jiwa	93.640.762	33.792.156
- Titipan Lainnya	50.380.513	74.087.500
- Titipan BPJS Kesehatan	31.554.100	31.679.650
- Titipan Pajak Sewa Kendaraan dan Bangunan	28.082.000	3.624.000
- Titipan Asuran Jaminan	19.885.532	11.870.000
- Titipan Biaya Notaris	15.000.000	1.500.000
- Titipan Telco Sera	8.759.803	10.615.860
- Titipan PPh Pasal 23 Lainnya	180.622	390.420

Jumlah Liabilitas Segera Dibayar

468.047.856 495.921.781

I. Utang Bunga

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
- Biaya Bunga yang Harus Dibayar - Deposito	119.405.422	127.249.841
- Biaya Bunga yang Harus Dibayar - Tabungan	4.544.957	4.724.404

Jumlah Utang Bunga

123.950.379 131.974.245

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

J. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

- PPh Pasal 29

Jumlah Utang Pajak

Tahun 2025	Tahun 2024
112.865.365	26.694.164
112.865.365	26.694.164

K. Simpanan

Akun ini terdiri dari:

Tabungan

Deposito

Jumlah

Biaya Transaksi

Jumlah Simpanan

Tahun 2025	Tahun 2024
54.533.590.021	57.234.072.792
62.655.750.000	62.341.250.000
117.189.340.021	119.575.322.792
(1.711.990.000)	(1.643.586.000)
115.477.350.021	117.931.736.792

a. Berdasarkan keterikatan Tabungan dibedakan :

Tabungan - *Pihak Tidak Terkait*

- Harmoni Plus
- Harmoni Premium
- Sihastor
- Tabunganku Nusamba
- Simpel
- Pundi

Tabungan - *Pihak Terkait*

- Pengurus dan Pejabat Eksekutif

Sub Jumlah Tabungan

Tahun 2025	Tahun 2024
37.301.105.935	40.256.256.389
8.977.861.242	9.000.444.666
3.967.840.690	4.042.241.453
2.501.765.841	2.507.671.696
1.452.873.140	1.244.478.511
-	897.616
332.143.173	182.082.461
54.533.590.021	57.234.072.792

b. Berdasarkan keterikatan Deposito dibedakan :

Deposito - *Pihak Tidak Terkait*

- Deposito Nusamba Berjangka 1 Bulan
- Deposito Nusamba Berjangka 3 Bulan
- Deposito Nusamba Berjangka 6 Bulan
- Deposito Nusamba Berjangka 12 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 3 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 6 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 9 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 12 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 18 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 24 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 30 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 36 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 48 Bulan
- Deposito Superplus Berjangka 60 Bulan

Deposito - *Pihak Terkait*

- PT. Sentra Modal Harmoni
- Pengurus Dan Pejabat Eksekutif

Sub Jumlah Deposito

Biaya Transaksi

Jumlah Simpanan

Tahun 2025	Tahun 2024
4.558.000.000	4.865.000.000
11.312.950.000	11.767.450.000
7.277.500.000	8.161.500.000
11.262.300.000	10.507.300.000
2.305.000.000	1.550.000.000
1.500.000.000	960.000.000
-	50.000.000
5.435.000.000	5.535.000.000
270.000.000	200.000.000
4.630.000.000	2.800.000.000
250.000.000	250.000.000
5.540.000.000	6.010.000.000
5.915.000.000	1.280.000.000
-	5.825.000.000
2.000.000.000	2.000.000.000
400.000.000	580.000.000
62.655.750.000	62.341.250.000
(1.711.990.000)	(1.643.586.000)
115.477.350.021	117.931.736.792

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

K. Simpanan - (Lanjutan)

Tingkat suku bunga per tahun untuk masing-masing jenis tabungan dan deposito tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

Jenis Tabungan	Surat Keputusan	Nominal	Suku Bunga
Tabunganku Nusamba	196/BRD/DIR/SK/III/2019	≤ 500.000	0,00%
		> 500.001	2,00%
Tabunganku Sihastor	199/BRD/DIR/SK/III/2019	≤ 100.000	0,00%
		100.001 s/d 10.000.000	2,00%
		10.000.001 s/d 100.000.000	2,50%
		>100.000.000	3,00%
Tabungan Harmoni Plus	198/BRD/DIR/SK/III/2019	≤ 100.000	0,00%
		100.001 s/d 10.000.000	2,00%
		1.000.001 s/d 10.000.000	2,50%
		10.000.001 s/d 100.000.000	2,80%
		>100.000.000	3,00%
Tabungan Harmoni Premium	108/BRD/DIR/SK/III/2021	0 s/d 1.000.000	0,00%
		1.000.001 s/d 10.000.000	2,50%
		10.000.001 s/d 100.000.000	3,00%
		100.000.001 s/d 500.000.000	4,00%
		500.000.001 s/d 1.000.000.000	4,50%
		>1.000.000.000	5,00%
Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)	967/BRD/DIR/SK/XI I/2016	99.999	0,00%
		100.000 s/d 4.999.999	2,00%
		5.000.0000	2,50%

Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka dan Super Plus tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 106/BRD/DIR/SK/III/2021 dan No 590/BRD/DIR/IX/2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Deposito	Suku Bunga
Deposito Berjangka	
- Deposito 1 Bulan	4,0%
- Deposito 3 Bulan	4,5%
- Deposito 6 Bulan	5,0%
- Deposito 12 Bulan	5,5%
Deposito Super Plus	
- Deposito Superplus 3-60 Bulan	1,0%

L. Simpanan dari Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

Deposito dari Bank Lain:

- Deposito Bank Lain 1 Bulan
- Deposito Bank Lain 3 Bulan
- Deposito Bank Lain 6 Bulan

Jumlah Simpanan dari Bank Lain

Tahun 2025	Tahun 2024
1.000.000.000	-
1.000.000.000	2.350.000.000
940.000.000	940.000.000
2.940.000.000	3.290.000.000

M. Liabilitas Imbalan Kerja

Akun ini terdiri dari:

- Liabilitas Imbalan Kerja

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja

Tahun 2025	Tahun 2024
-	-
-	-

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

M. Liabilitas Imbalan Kerja - (Lanjutan)

BPR melaksanakan liabilitas imbalan pasca kerja melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife untuk karyawan/pekerja yang telah diangkat menjadi karyawan/pekerja tetap. Namun berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 44 tentang Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja, apabila Saldo Dana Pensiun karyawan lebih kecil dari jumlah uang pesangon, uang masa penghargaan, uang penggantian hak dan uang pisah yang menjadi hak karyawan, maka selisih kekurangannya dibayar oleh Perusahaan. Potensi kekurangan DPLK seyogianya didukung

Menurut Laporan DPLK dari Manulife per 01 November 2000 s.d. 31 Desember 2024 dan 01 November 2000 s.d. 31 Desember 2025 menyebutkan bahwa saldo manfaat sebesar Rp. 8.792.013.012,- untuk 108 orang karyawan per 31 Desember 2024 dan Rp. 9.544.192.957,- untuk 108 orang karyawan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian:	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
Penarikan Dana/Koreksi	(313.874.378)	(329.718.010)
Dana Masuk		
Iuran Pemberi Kerja (ER)	5.666.626.232	5.340.269.400
Iuran Peserta (EE)	1.882.367.307	1.772.135.521
Top Up	4.008.002	4.008.002
Hasil Pengembangan		
Pengembangan ER	2.224.367.005	1.953.421.482
Pengembangan EE	709.429.482	618.551.724
Pengembangan Top Up	3.272.857	2.866.582
Biaya	(632.003.550)	(569.521.689)
Saldo	9.544.192.957	8.792.013.012

N. Modal

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000
Modal yang Belum Disetor	(10.981.000.000)	(10.981.000.000)
Jumlah Modal Disetor	9.019.000.000	9.019.000.000

Modal dasar PT BPR Nusamba Brondong sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 05 tanggal 01 November 2017 ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 200.000 lembar saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah disetorkan sebesar 45,10% atau sebesar Rp. 9.019.000.000,- (sembilan milyar sembilan belas juta rupiah).

O. Cadangan Umum

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	1.803.800.000	1.803.800.000
Ditambah: Pembentukan Cadangan	-	-
Jumlah Cadangan Umum	1.803.800.000	1.803.800.000

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

P. Cadangan Tujuan

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal	-	-
Ditambah: Pembentukan Cadangan	-	-
Jumlah Cadangan Tujuan	-	-

Q. Laba Belum Ditentukan Penggunaannya

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Laba Rugi Periode Lalu	12.306.885.068	13.667.078.801
Dividen	(2.000.000.000)	(3.500.000.000)
Bonus	(100.000.000)	(460.000.000)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.540.301.058	2.599.806.267
Pembentukan Cadangan Kerugian Nilai	(1.059.981.751)	-
Jumlah Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	12.687.204.375	12.306.885.068

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 21 April 2025, pemegang saham menyetujui untuk mempergunakan Laba tahun buku 2024 sebesar Rp. 2.599.806.267,- untuk dibagikan sebagai berikut:

	Rp
1. Dividen	2.000.000.000
2. Bonus/Tantiem	100.000.000
3. Laba Ditahan	499.806.267
Jumlah	2.599.806.267

5. PENJELASAN POS-POS LABA RUGI

A. Pendapatan Bunga Kontraktual

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bunga Kredit:		
<i>Pihak Tidak Terkait</i>		
- Installment MK Pundi (N)	6.070.887.131	6.446.117.092
- Installment Konsumsi Umum (N)	4.832.111.287	4.602.214.944
- Installment Investasi Pundi (N)	2.465.376.688	2.350.422.820
- Installment Investasi	2.103.400.973	2.261.539.112
- Reguler Modal Kerja	1.818.533.458	1.866.129.617
- Installment MK Umum	1.796.989.480	2.014.469.495
- Installment Konsumsi Umum	1.578.981.539	1.547.397.175
- Installment MK Pundi	1.378.540.659	1.467.240.336
- Installment Invetasi (N)	1.361.841.598	1.127.592.095
- Installment Investasi Pundi	631.240.596	774.713.395
- Reguler Investasi	456.127.883	504.436.521
- Installment Konsumsi Kendaraan (N)	335.678.680	241.992.246
- Installment MK Umum (N)	264.618.563	185.249.393
- Installment Karyawan	216.474.885	141.361.375
- Installment Konsumsi Kendaraan	109.402.710	113.082.251
- Pend Bunga yang Ditangguhkan Restruktur	48.507.555	10.823.736
- Pend Bunga Kredit Bulanan Pay Modal Kerja	19.050.937	683.643.096
- Installment Konsumsi (Lainnya)	-	5.283.139
Jumlah Pendapatan Bunga Kredit - Pihak Tidak Terkait	25.487.764.623	26.343.707.838

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN POS-POS LABA RUGI - (Lanjutan)

A. Pendapatan Bunga Kontraktual - (Lanjutan)

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bunga Kredit:		
<i>Pihak Terkait</i>		
- Pengurus dan Pejabat Eksekutif	23.156.250	22.175.000
Jumlah Pendapatan Bunga Kredit - Pihak Terkait	23.156.250	22.175.000
Jumlah Pendapatan Bunga Kredit Kontraktual	25.510.920.873	26.365.882.838

Pendapatan Bunga dari Bank Lain:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bunga Giro		
- PT Bank Mega Syariah	1.742.300	486.709
- PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk	66.546	16.074
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	778	-
Jumlah Pendapatan Bunga Giro	1.809.624	502.783

Pendapatan Bunga Tabungan

	Tahun 2025	Tahun 2024
- PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk	93.800.983	95.619.603
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.863.098	44.793.624
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49.597.656	21.042.333
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.195.375	7.000.405
- PT BPR Lestari Bali	34.949	35.136
- PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	239	505
- PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk Cab Gresik	5.426.527	7.732.239
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kas Bungah	3.056.583	4.668.493
- PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	159.849	-
Jumlah Pendapatan Bunga Tabungan	191.135.259	180.892.338

Bunga Deposito

	Tahun 2025	Tahun 2024
<i>Pihak Tidak Terkait</i>		
- PT Bank Mega Syariah	442.353.867	165.801.743
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	206.929.091	23.923.271
- PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	102.783.393	-
- PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk Cab Lamongan	1.741.060	1.837.529
<i>Pihak Terkait</i>		
- Bunga Deposito BPRS Mitra Harmoni Malang	97.266.282	119.590.501
Jumlah Bunga Deposito	851.073.693	311.153.044
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	26.554.939.449	26.858.431.003

B. Pendapatan Provisi

Akun ini terdiri dari:		
	Tahun 2025	Tahun 2024
- Pendapatan Provisi	1.644.382.569	1.631.797.983
Jumlah Pendapatan Provisi	1.644.382.569	1.631.797.983

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN POS-POS LABA RUGI - (Lanjutan)

C. Beban Bunga

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bunga Tabungan:		
<i>Pihak Tidak Terkait</i>		
- Harmoni Plus	858.978.049	869.067.322
- Harmoni Premium	377.951.315	333.257.917
- Sihastor	104.899.463	106.711.496
- Tabunganku Nusamba	41.459.312	47.824.071
- Simpel	33.394.914	38.442.552
- Pundi	-	32.413
<i>Pihak Terkait</i>		
- Pengurus dan Pejabat Eksekutif	3.726.167	4.479.983
Jumlah Bunga Tabungan	1.420.409.220	1.399.815.754
Beban Bunga Deposito:		
<i>Pihak Tidak Terkait</i>		
- Nusamba	2.038.725.124	1.961.194.237
- Superplus	1.403.467.228	1.507.693.858
Jumlah Beban Bunga Deposito - Pihak Tidak Terkait	3.442.192.352	3.468.888.095
Beban Bunga Deposito		
<i>Pihak Terkait</i>	Tahun 2025	Tahun 2024
- PT. Sentra Modal Harmoni	89.484.932	92.252.055
- Pengurus dan Pejabat Eksekutif	18.566.137	26.520.986
Jumlah Beban Bunga Deposito - Pihak Terkait	108.051.069	118.773.041
Jumlah Beban Bunga Deposito	3.550.243.421	3.587.661.136
Beban Bunga Simpanan dari Bank Lain	Tahun 2025	Tahun 2024
- Deposito. Bank Lain	193.131.027	362.380.000
Jumlah Beban Bunga Simpanan dari Bank Lain	193.131.027	362.380.000
Beban Pinjaman Diterima	Tahun 2025	Tahun 2024
- Beban Premi Penjaminan Simpanan	231.812.925	238.310.034
- Biaya Transaksi	18.375.000	46.841.637
- Beban Pinjaman PT BPD Jatim, Tbk KCP Brondong	-	42.561.660
Jumlah Pinjaman Diterima	250.187.925	327.713.331
Jumlah Beban Bunga	5.413.971.593	5.677.570.221
D. Pendapatan Operasional Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	Tahun 2025	Tahun 2024
- Administrasi Pinjaman	664.470.000	730.809.999
- Administrasi Tabungan	402.998.071	429.016.451
- Denda Angsuran	385.320.803	485.113.117
- Pendapatan Pemulihan CKPN Kredit	239.752.994	-
- Pokok dan Bunga kredit Dihapusbukukan	166.750.270	281.969.073
- Administrasi Pelunasan Kredit	56.775.493	59.764.117
- Pendapatan Operasional Lainnya	36.166.498	72.328.776
- Penalti Deposito	20.910.000	11.974.000
- Administrasi Tutup Tabungan	4.159.629	3.210.256
- Fee Sera	1.420.300	1.598.500
- Administrasi Buku Tabungan	125.000	50.000
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1.978.849.058	2.075.834.289

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN POS-POS LABA RUGI - (Lanjutan)

E. Beban Penyisihan Cadangan Kerugian Nilai dan Penyusutan

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
- Beban CKPN Kredit	1.232.117.633	2.458.479.223
- Beban Penyusutan Inventaris	264.847.272	302.878.914
- Beban CKPN Tabungan/Deposito	158.857.868	111.699.702
- Beban Penyusutan Kendaraan	139.873.021	126.285.510
- Beban Penyusutan Bangunan	30.850.000	30.850.000
Jumlah Beban Penyisihan Cadangan Kerugian Nilai dan Penyusutan	1.826.545.794	3.030.193.349

F. Beban Pemasaran

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
- Beban Promosi Tabungan	249.614.026	274.451.623
- Beban Promosi Kredit	103.401.796	19.564.102
- Beban Promosi Lainnya	113.613.360	151.143.800
- Beban Iklan	24.930.780	21.379.780
- Beban Promosi Deposito	13.516.663	22.136.338
Jumlah Beban Pemasaran	505.076.625	488.675.643

G. Beban Administrasi dan Umum

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Tenaga Kerja		
- Gaji Pokok Dan Upah	4.832.820.000	4.863.555.001
- Tunjangan Makan	1.196.500.000	1.193.300.000
- Tunjangan Transport	1.172.700.000	1.133.100.000
- Tunjangan Jabatan	743.681.250	734.666.667
- Tunjangan Hari Raya	738.277.664	715.660.000
- Tunjangan Cuti	716.551.000	670.785.000
- Tunjangan PPh Pasal 21	471.120.398	567.703.715
- Honorarium	431.100.000	418.950.000
- Tunjangan Pulsa	328.420.000	291.000.000
- Tunjangan Premi BPJS Kesehatan	301.656.564	301.888.831
- Tunjangan Lainnya	217.207.835	482.597.412
- Tunjangan Premi Pensiun	147.907.230	145.901.366
Beban Pendidikan & Pelatihan		
- Beban Pendidikan	605.739.866	471.832.049
Beban Sewa		
- Sewa Kendaraan Hubungan Isitmewa	636.030.000	588.500.000
- Sewa Gedung Pihak Ketiga	301.124.976	275.649.973
- Sewa Rumah Dinas Pihak Ketiga	60.830.000	58.591.664
- Sewa Gedung Kantor Hubungan Istimewa	59.940.000	54.000.000
Beban Pajak Lainnya		
- Pajak Lainnya	114.089.936	124.275.983
- Pajak Kendaraan Bermotor	16.620.000	23.735.000
- Pajak Promosi	10.806.644	8.199.246
- Biaya Pajak PBB	46.428	232.100
- Pajak Sewa Kendaraan	-	10.324.000
- Pajak Sewa Tanah	-	5.400.000
Jumlah yang Dipindahkan	13.103.169.791	13.139.848.007

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN POS-POS LABA RUGI - (Lanjutan)

G. Beban Administrasi dan Umum - (Lanjutan)

	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah Pindahan	13.103.169.791	13.139.848.007
Beban Premi Asuransi		
- Beban Premi Asuransi	1.446.196.634	1.427.815.403
Beban Pemeliharaan & Perbaikan		
- Beban Pemeliharaan Gedung	189.263.081	129.696.432
- Beban Pemeliharaan Kendaraan	104.964.425	92.490.276
- Beban Pemeliharaan Inventaris	75.480.500	84.973.200
- Beban Pemeliharaan Lainnya	37.046.300	14.979.600
Beban Barang dan Jasa		
- Beban Pengembangan IT	634.903.413	602.257.514
- Beban Tenaga Kerja Oursource	560.671.576	589.067.118
- Beban Bensin/Solar	397.931.600	436.236.950
- Beban Listrik/Air	265.532.860	267.428.426
- Beban Konsumsi/Makan Dinas	176.415.450	259.453.282
- Beban Rapat	155.054.644	200.143.973
- Beban Alat Tulis Kantor	138.884.768	163.021.818
- Beban Telp/Fax/Komunikasi	113.223.675	117.405.929
- Beban Rumah Tangga Kantor	99.554.100	136.152.800
- Beban BJKP Lainnya	62.731.400	139.262.900
- Beban Transport	49.334.600	25.128.120
- CSR	44.687.000	95.709.200
- Beban Inventaris Kecil	36.811.240	47.994.200
- Beban Parkir/Retribusi	23.540.500	26.179.100
- Beban Ekspedisi/Perangko	9.463.200	8.066.345
- Beban Koran/Majalah	8.876.000	6.254.000
- Admin Komunal	4.895.020	106.482.351
- Edukasi dan Literasi	4.661.500	48.707.100
- Beban Administrasi Bank Lain	4.307.367	3.297.600
- BY Materai dan Segel	4.030.000	-
- Beban Fotocopy/Laminating	983.300	2.008.500
- Biaya Fee Sera	34.760	-
- Beban Jasa Lawyer	-	5.000.000
Beban Operasional Lainnya		
- Beban Pungutan OJK	66.405.453	63.948.610
- Penagihan Kredit Macet	160.421.200	224.279.100
- Fee Pihak Ketiga/Akuntan	62.234.528	58.906.697
- Perijinan	32.142.805	14.134.050
- Penerimaan Calon Pegawai	7.834.000	13.981.000
- Lainnya	145.592	4.210.232
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	18.081.832.282	18.554.519.833

H. Pendapatan Non Operasional

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
- Fee Asuransi	110.768.813	222.644.618
- Fee Notaris	74.267.500	89.696.800
- Keuntungan Penjualan Aset Tetap	45.975.000	21.210.000
- Adm Royal Elektronik	39.050.000	48.150.000
- Fee dari Pihak Lain	1.868.190	-
- Keuntungan Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	-	205.976.877
- Fee dari Komunal	-	2.000.000
Jumlah Pendapatan Non Operasional	271.929.503	589.678.294

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN POS-POS LABA RUGI - (Lanjutan)

I. Beban Non Operasional

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
- Beban Sumbangan/Hadiah	66.062.998	66.419.966
- Aktivitas Karyawan	27.182.200	8.489.000
- Beban Kerohanian	26.000.000	29.407.000
- Denda/Sanksi	16.480.000	240.000
- Keanggotaan	6.000.000	6.000.000
Jumlah Beban Non Operasional	141.725.198	110.555.966

J. Taksiran Pajak Penghasilan

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Laba Sebelum Pajak	4.480.949.087	3.294.226.557
Koreksi Fiskal:		
<i>Koreksi Positif</i>		
- CKPN Penempatan Pada Bank Lain	158.857.868	111.699.702
- Pajak Lainnya	114.089.936	-
- Sumbangan	66.062.998	66.419.966
- Beban Non Operasional Lain	26.000.000	29.407.000
- Denda/Sanksi	16.480.000	-
- Pajak promosi	-	8.199.246
- Iuran Keanggotaan	6.000.000	6.000.000
Jumlah Koreksi Positif	387.490.802	221.725.914
<i>Koreksi Negatif</i>		
- Pendapatan Giro dan Tabungan	(69.850.392)	(33.214.014)
- Kelebihan Pendapatan CKPN - ABA	(157.084.979)	(62.839.760)
Jumlah Koreksi Negatif	(226.935.371)	(96.053.774)
Jumlah	160.555.431	125.672.140
Laba Kena Pajak	4.641.504.518	3.419.898.697
Penghasilan Bruto	30.450.100.579	31.155.741.568
PKP memperoleh Fasilitas	731.663.320	526.885.669
PKP tidak memperoleh Fasilitas	3.909.841.198	2.893.013.028
Pajak Penghasilan:		
- Tahun 2025: 22% x 50% x Rp. 731.663.620,-	80.482.965	-
- Tahun 2025: 22% x Rp. 3.909.841.198,-	860.165.064	-
- Tahun 2024: 22% x 50% x Rp. 526.885.669,-	-	57.957.424
- Tahun 2024: 22% x Rp. 2.893.013.028,-	-	636.462.866
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	940.648.029	694.420.290
Uang Muka Pajak (PPh 25)	(827.782.664)	(667.726.126)
Utang Pajak PPh Pasal 29 (Kurang Bayar)	112.865.365	26.694.164

K. Pajak Tangguhan

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, Bank tidak mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan. Hal ini disebabkan tidak terdapat perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan, sehingga tidak menimbulkan dampak pajak tangguhan pada tanggal pelaporan.

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN POS-POS LABA RUGI - (Lanjutan)

L. Rekening Administratif

Akun ini terdiri dari:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Komitmen:		
- Fasilitas Kredit pada Nasabah yang Belum Ditarik	-	-
- Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	-	2.000.000.000
Kontijensi:		
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian:		
- Bunga Kredit yang Diberikan	12.789.785.070	9.457.727.221
Liabilitas Kontijensi:		
- Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapusbuku	2.260.444.336	2.340.337.938
- Aset Produktif yang Dihapusbukukan	3.529.755.041	3.667.272.826
- Lainnya	102.333.962	-
- Agunan dalam Proses Penyelesaian	525.000.000	-
Jumlah Komitmen dan Kontijensi	19.207.318.410	17.465.337.985

6. TRANSAKSI PIHAK - PIHAK BERELASI

A. Informasi Kredit yang Diberikan kepada Pihak Terkait

No.	Nama	Baki Debet	Hubungan
1	Bambang Edy Yuwono	75.000.000	Direktur Utama
2	Soni Hari Triwasono	64.493.911	Direktur
3	Ahmad Syuja	45.481.749	Kepala Kantor Pusat Operasional
4	Ardian Junaldi SE	4.070.372	Kepala Cabang Gresik
5	Sri Lestari SE	50.016.302	Kepala Cabang Tuban
6	Sri Rahayu	50.000.000	Kabid SKAI
7	Suyono SS	27.802.009	PE Kepatuhan
Jumlah		316.864.343	

B. Informasi Simpanan Tabungan kepada Pihak Terkait

Nomor Rekening	Nama	Hubungan
1000194891	Dingot Sinaga	Komisaris Utama
1000404159	Muslim Thoyib	Komisaris
1000422289	Bambang Edy Yuwono	Direktur Utama
1000461004	Soni Hari Triwasono	Direktur
1000169691	Ahmad Syuja	Kepala Kantor Pusat Operasional
1000362911	Ardian Juanedi SE	Kepala Cabang Gresik
1000001091	Sri Lestari SE	Kepala Cabang Tuban
1000003471	Sri Rahayu	Kabid SKAI
1000207631	Suyono SS	PE Kepatuhan
2000485333	Lilis Desusi Siahaan	Istri Komisaris Utama
1000424915	Erny Darmawati	Istri Direktur Utama
1000422602	Ashifa Azzediena Geraldine	Anak Direktur Utama
1000458593	Selvira Anisa Anggraini	Anak Direktur
1000458607	Faiza Sadira Anisa Maharani	Anak Direktur
1000458615	Ghariza Najwa Anisa Maharani	Anak Direktur
1000458623	Rafi Azmi Putra Wasono	Anak Direktur

C. Informasi Simpanan Deposito kepada Pihak Terkait

No. Bilyet	Nama	Hubungan
0001991	PT Sentra Modal Harmoni	Group
0002280	PT Sentra Modal Harmoni	Group
0200018	PT Sentra Modal Harmoni	Group
0201100	Faiza Sadira Anisa Maharani	Anak Direktur
0201101	Ghariza Najwa Anisa Maharani	Anak Direktur

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. TRANSAKSI PIHAK - PIHAK BERELASI - (Lanjutan)

D. Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut adalah rincian remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 berdasarkan keputusan RUPS.

Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah orang	Jumlah (Rp)	Jumlah orang	Jumlah (Rp)
Tahun 2025				
1. Gaji	2	692.500.000	2	360.100.000
2. Tunjangan	2	362.534.360	2	145.477.940
3. Tantiem	2	17.500.000	2	7.500.000
4. Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
5. Remunerasi lainnya	0	-	0	-
6. Perumahan	2	28.600.000	1	3.630.000
7. Transportasi	2	184.200.000	2	109.600.000
8. Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	2	3.840.000
Total Remunerasi 2025		1.296.854.360		630.147.940

7. PENGUNGKAPAN LAINNYA

A. Kelangsungan Usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen BPR yang menggunakan Standar Keuangan Entitas Privat (SAK EP) membuat penilaian atas kemampuan BPR melanjutkan kelangsungan usaha. BPR mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi BPR tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis lain selain melakukan hal tersebut.

Dalam menilai apakah asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit (namun tidak terbatas pada) dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari adanya ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan BPR untuk melanjutkan kelangsungan usaha, maka BPR harus mengungkapkan alasan mengapa BPR tidak dipertimbangkan sebagai BPR yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

B. Informasi Penting dan Peristiwa setelah Tanggal Neraca

Pelaksanaan Penggabungan BPR Nusamba

Berdasarkan Peraturan OJK No 7 Tahun 2024 Pasal 130 menyebutkan bahwa BPR dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP (Pemegang Saham Pengendali) yang sama dalam 1 (satu) wilayah kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema penggabungan atau peleburan.

Dengan adanya peraturan tersebut, untuk seluruh BPR Nusamba yang berada di wilayah Jawa Timur akan dilakukan penggabungan, yang terdiri dari:

- PT BPR Nusamba Ngunut (Kabupaten Tulungagung)
- PT BPR Nusamba Brondong (Kabupaten Lamongan)
- PT BPR Nusamba Rambipuji (Kabupaten Jember)
- PT BPR Nusamba Genteng (Kabupaten Banyuwangi)

Penggabungan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan OJK Jember Nomor S-585/KO.1403/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Persetujuan Rencana Tindak Penggabungan BPR Grup PT Sentra Modal Harmoni.

Berdasarkan Surat OJK Direktorat Perizinan Perbankan Nomor S-184/PB.022/2025 tanggal 26 Agustus 2025, yang merujuk pada:

- Surat No 038/WLI/DIR/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 tentang Permohonan Persiapan Pelaksanaan Penggabungan BPR;
- Surat No 046/WLI/DIR/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Penyampaian Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Ijin Persiapan Pelaksanaan Penggabungan BPR; dan

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENGUNGKAPAN LAINNYA - (Lanjutan)

B. Informasi Penting dan Peristiwa setelah Tanggal Neraca - (Lanjutan)

- Adanya pengiriman kelengkapan persyaratan tersebut via *e-mail* yang dikirimkan oleh pihak BPR tanggal 19 Agustus 2025.

Berdasarkan Surat dari OJK No S-243/PB.02/2025 tanggal 24 September 2025, menyebutkan bahwa atas seluruh dokumen yang sudah di berikan oleh pihak BPR telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Peraturan OJK No 7 tahun 2025.

Atas adanya surat dari OJK tersebut, maka pihak BPR diminta untuk menindaklanjuti:

- 1) Mengumumkan ringkasan atas Rancangan Penggabungan yang mengacu pada Pasal 106 POJK BPR/BPRS
 - 2) Menyelesaikan keberatan yang diajukan kreditur (apabila ada) mengacu pada Pasal 107 POJK BPR/BPRS
 - 3) Menyelenggarakan RUPS masing-masing BPR Peserta Penggabungan, antara lain dalam rangka untuk:
 - a. Menyetujui Rancangan Penggabungan dan kemudian dituangkan dalam Akta Penggabungan (Akta Penggabungan tersebut wajib disusun paling lama 30 hari setelah pelaksanaan RUPS dan menjadi dasar pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar BPR); dan
 - b. Mengangkat calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang efektif menjabat setelah persetujuan Izin Penggabungan dari OJK ditindaklanjuti dengan keputusan instansi yang berwenang mengenai pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar BPR Hasil Penggabungan.
- Pencantuman nama dan nomenklatur jabatan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dalam Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar agar mengacu pada persetujuan OJK atas Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan.

Sebagai tindak lanjut atas Surat OJK Nomor S-243/PB.02/2025 poin 3(a) mengenai penyelenggaraan RUPS untuk menyetujui Rancangan Penggabungan:

- Persetujuan Rancangan Penggabungan telah diperoleh melalui RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2025, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 25 Februari 2025 Nomor 28;
- Keputusan tersebut ditegaskan kembali melalui Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar RUPS Bank tanggal 30 Juli 2025;
- Seluruh keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Penggabungan Nomor 32 tanggal 24 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat yang dibuat di bawah tangan tanggal 24 Desember 2025.

C. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bank telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selama tahun buku 2025 yang mencakup aspek lingkungan dan sosial sebagai berikut :

1. Aspek Lingkungan

Bank menerapkan pengelolaan lingkungan melalui penghematan energi listrik dengan memastikan penggunaan lampu, AC, dan peralatan elektronik hanya saat diperlukan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR. Selain itu, Bank menerapkan praktik keberlanjutan internal melalui penggunaan kertas bolak-balik untuk keperluan internal, pengurangan penggunaan air minum dalam kemasan sekali pakai dengan menggantinya menggunakan tumbler dan dispenser air, serta pelaksanaan pelaporan kepada regulator secara daring (online) sehingga tidak lagi menggunakan dokumen hardcopy. Dalam rangka mendukung keberlanjutan jangka panjang, Bank juga melaksanakan Program Literasi Keuangan Berkelanjutan kepada pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

2. Aspek Sosial

Pelaksanaan kegiatan pada aspek sosial dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembagian Takjil, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 sebagai bentuk kepedulian Bank kepada masyarakat sekitar wilayah operasional, dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp. 7.187.000,-
- b. Pemberian Bantuan kepada Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan, yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Juli 2025, bertujuan untuk memberikan motivasi belajar, menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan karyawan, serta membangun reputasi Bank sebagai entitas yang peduli dan bertanggung jawab secara sosial, dengan total dana sebesar Rp. 4.000.000,-

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENGUNGKAPAN LAINNYA - (Lanjutan)

C. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan - (Lanjutan)

- c. Program Jumat Berkah, berupa pembagian nasi bungkus kepada masyarakat dan lembaga keagamaan di sekitar wilayah operasional Bank, yang dilaksanakan secara berkala selama tahun 2025, dengan total dana sebesar Rp. 6.500.000,-
- d. Penyaluran Hewan Kurban, yang dilaksanakan pada bulan Juni 2025 melalui lembaga keagamaan sebagai wujud kepedulian sosial Bank kepada masyarakat sekitar, dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp. 27.000.000,-

D. Rincian Masalah Yang Timbul Selama Tahun Buku Yang Mempengaruhi Kegiatan Operasional BPR

Selama tahun buku 2025, terdapat beberapa permasalahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha Bank, yaitu:

1. Kenaikan Non-Performing Loan (NPL)
Posisi Non-Performing Loan (NPL) Bank pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp25,3 miliar dengan rasio 24,12%, meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2024 sebesar Rp20,9 miliar dengan rasio 19,21%. Kenaikan NPL tersebut terutama disebabkan oleh masuknya kredit bermasalah baru dari portofolio kredit eksisting, sehingga upaya penyelesaian kredit bermasalah yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menurunkan rasio NPL secara optimal. Upaya yang telah dan terus dilakukan Bank meliputi penagihan intensif, restrukturisasi kredit bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha, penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang dan pengambilalihan agunan (AYDA), serta kerja sama dengan pihak hukum secara selektif.
2. Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp120,13 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024 sebesar Rp122,87 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp2,74 miliar. Penurunan tersebut terutama terjadi pada produk tabungan yang mengalami penurunan saldo sebesar Rp2,70 miliar, sementara pertumbuhan deposito belum mampu mencapai target yang ditetapkan meskipun secara nominal mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya penghimpunan dana masyarakat di tengah persaingan industri perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank telah dan akan terus melakukan penguatan strategi penghimpunan dana melalui promosi berkelanjutan, edukasi keuangan kepada masyarakat, pendataan dan pembinaan UMKM, serta optimalisasi layanan mobil kas keliling.

E. Laporan Mengenai Tugas Pengawasan Yang Telah Dilaksanakan oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan memberikan nasihat kepada Direksi selama tahun buku 2025, yang meliputi:

1. Pengawasan Tata Kelola, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko
Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko secara berkelanjutan. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN/PPKA), penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan, penanganan kredit bermasalah (termasuk restrukturisasi kredit dan pengambilalihan agunan), serta evaluasi rasio-rasio keuangan utama BPR.
Selain itu, Dewan Komisaris secara konsisten memberikan arahan strategis kepada Direksi terkait upaya perbaikan kualitas aset produktif, penguatan pengendalian internal, peningkatan efektivitas fungsi manajemen risiko, serta penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas bisnis Bank.
2. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat secara rutin sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebesar 100%. Rapat Dewan Komisaris membahas antara lain evaluasi kinerja bulanan Direksi, realisasi dan penetapan Rencana Bisnis BPR, isu-isu strategis, hasil pemeriksaan Audit Internal, pelaksanaan manajemen risiko dan APU PPT, efisiensi dan pengendalian biaya operasional, serta langkah-langkah mitigasi risiko dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian lingkungan usaha.

F. Tanggal Penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen PT BPR Nusamba Brondong bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diselesaikan tanggal 12 Januari 2026.

PT BPR NUSAMBA BRONDONG
KUALITAS ASET PRODUKTIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	KREDIT	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	JUMLAH 2025
1. Aset Produktif			
- Lancar	54.046.282.406	40.241.471.006	94.287.753.412
- Dalam Perhatian Khusus	25.804.952.940		25.804.952.940
- Kurang Lancar	1.594.682.732		1.594.682.732
- Diragukan	2.803.479.472		2.803.479.472
- Macet	20.989.192.144		20.989.192.144
Jumlah	105.238.589.694	40.241.471.006	145.480.060.700
2. Aset Produktif yang Diklasifikasikan			
- Dalam Perhatian Khusus	-	-	-
- Kurang Lancar (50%)	797.341.366	-	797.341.366
- Diragukan (75%)	2.102.609.604	-	2.102.609.604
- Macet (100%)	20.989.192.144	-	20.989.192.144
Jumlah	23.889.143.114	-	23.889.143.114
3. Agunan Yang Diperhitungkan			
- Lancar	525.000.000	-	525.000.000
- Dalam Perhatian Khusus	-	-	-
- Kurang Lancar	-	-	-
- Diragukan	-	-	-
- Macet	-	-	-
Jumlah	525.000.000	-	-
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)			
(Setelah diperhitungkan agunan)			
- Lancar (0,5%)	659.425.567	131.125.874	790.551.441
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	716.899.320		716.899.320
- Kurang Lancar (10%)	202.811.443		202.811.443
- Diragukan(50%)	472.608.641		472.608.641
- Macet (100%)	6.416.940.026		6.416.940.026
Jumlah	8.468.684.997	131.125.874	8.599.810.871
Rasio-rasio :	<u>Aset Produktif yang Diklasifikasikan</u> Aset Produktif : 16,42% <u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</u> CKPN yang Wajib Dibentuk : 100% NPL Bruto : 25.387.354.348 Rasio NPL Bruto : 24,12% NPL Netto : 18.294.994.238 Rasio NPL Netto : 17,38%		
CKPN yang Dibentuk BPR			8.599.810.871
CKPN yang (Kurang) Lebih Bentuk			-

PT BPR NUSAMBA BRONDONG
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KOMPONEN	NOMINAL 2025	BOBOT RISIKO (%)	ATMR 2025
1.	Kas	632.965.100	0%	-
2.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	0%	-
3.	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet	1.286.037.181	0%	-
4.	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	0%	-
5.	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan	-	15%	-
6.	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan kepada bank lain	40.241.471.006	20%	8.048.294.201
7.	Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank bank lain atau Pemerintah Daerah	-	20%	-
	a. Kredit kepada bank lain	-	-	-
	b. Kredit kepada Pemerintah Daerah	-	-	-
	c. Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain	-	-	-
	d. Bagian kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah	-	-	-
8.	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit	-	20%	-
9.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	45.121.375.716	30%	13.536.412.715
10.	Kredit kepada BUMN/BUMD	-	50%	-
11.	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)	-	50%	-
12.	Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan	1.788.266.724	50%	894.133.362
13.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	-	50%	-
14.	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	27.969.135.095	70%	19.578.394.566
15.	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4.076.302.416	70%	2.853.411.691
16.	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	-	100%	-

PT BPR NUSAMBA BRONDONG
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KOMPONEN	NOMINAL 2025	BOBOT RISIKO (%)	ATMR 2025
17.	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	14.572.252.118	100%	14.572.252.118
a.	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	5.646.228.042	100%	5.646.228.042
b.	Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	8.926.024.075	100%	8.926.024.075
18.	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	2.327.859.213	100%	2.327.859.213
19.	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	100%	-
20.	Aset lain, selain angka 1 s.d. 19	3.610.339.089	100%	3.610.339.089
Jumlah ATMR sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPKA Umum		141.626.003.657		65.421.096.955

PT BPR NUSAMBA BRONDONG
PERMODALAN (CAR)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOMPONEN PERMODALAN		BOBOT (%)	JUMLAH KOMPONEN 2025	JUMLAH KOMPONEN BOBOT 2025
I	MODAL INTI			
1.1	Modal Inti Utama			
1.1.1	Modal Disetor	100%	9.019.000.000	9.019.000.000
1.1.2	Cadangan Tambahan Modal			
1.1.2.1	Agio (Disagio)	100%		-
1.1.2.2	Dana Setoran Modal Ekuitas	100%		-
1.1.2.3	Modal Sumbangan	100%		-
1.1.2.4	Tambahan Modal Disetor Lainnya	100%		
1.1.2.5	Cadangan Umum	100%	1.803.800.000	1.803.800.000
1.1.2.6	Cadangan Tujuan	100%		
1.1.2.7	Laba (Rugi) Tahun-tahun Lalu	100%	9.146.903.317	9.146.903.317
1.1.2.8	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	100%	3.540.301.058	3.540.301.058
1.1.2.9	Pajak Tangguhan -/-	100%		-
1.1.2.10	Goodwill -/-	100%		-
1.1.2.11	AYDA berupa tanah dan / atau bangunan			
1.1.2.11.1	Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak pengambil-alihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	15%	525.000.000	78.750.000
1.1.2.11.2	Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak pengambil-alihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	50%		-
1.1.2.11.3	Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	100%		-
1.1.2.12	AYDA berupa selain tanah dan / atau bangunan			
1.1.2.12.1	Melampaui jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pengambil-alihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	50%		-
1.1.2.12.2	Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	100%		-
1.1.2.13	Property Terbengkalai			
1.1.2.11.1	Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	15%		
1.1.2.11.2	Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	50%		
1.1.2.11.3	Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	100%		
Sub Total Cadangan Tambahan Modal				14.569.754.376
Sub Total Modal Inti Utama				23.588.754.376

PT BPR NUSAMBA BRONDONG
PERMODALAN (CAR)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOMPONEN PERMODALAN		BOBOT (%)	JUMLAH KOMPONEN 2025	JUMLAH KOMPONEN BOBOT 2025
I.2	Modal Inti Tambahan	100%		-
I.3	JUMLAH MODAL INTI (I.1 + I.2)			23.588.754.376
II	MODAL PELENGKAP			364.082.568
II.1	Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi 50% dari modal inti)	50%		-
II.2	Keuntungan revaluasi tetap	100%		364.082.568
II.3	PPKA Umum yang Wajib Dibentuk (paling tinggi sebesar 1,25% dari jumlah ATMR)			364.082.568
II.4	Jumlah Modal Pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti (II.1 + II.2 + II.3))			23.952.836.944
	Jumlah Modal (I + II)			7.850.531.635
III	MODAL MINIMUM (12% x ATMR)			16.102.305.309
IV	KELEBIHAN/KEKURANGAN MODAL			
V	RASIO KPMM (MODAL/ATMR)		36,61%	

BMPK:

Pihak Terkait (10% x Modal)	2.395.283.694
Pihak Tidak Terkait (20% x Modal)	4.790.567.389
Pihak Tidak Terkait 30% untuk satu kelompok peminjam	7.185.851.083

PT BPR NUSAMBA BRONDONG
LOAN TO DEPOSIT RATIO (LIKUIDITAS)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1. Simpanan		
a. Tabungan	54.533.590.021	57.234.072.792
b. Deposito Berjangka	62.655.750.000	62.341.250.000
2. Pinjaman Diterima Bukan dari Bank > 3 bulan	-	-
3. Deposito dan Pinjaman Diterima dari Bank > 3 bulan	-	-
4. Modal Pinjaman	-	-
5. Modal Inti	-	-
Jumlah Dana yang Diterima	117.189.340.021	119.575.322.792
6. Aset Produktif		
a. Kredit yang Diberikan	105.238.589.693	108.833.973.995
Jumlah Aset Produktif	105.238.589.693	108.833.973.995
LDR (Aset Produktif/Dana yang Diterima)	89,80%	91,02%

PT BPR NUSAMBA BRONDONG
LIKUIDITAS (CASH RATIO)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1. Alat Likuid		
a. Kas	632.965.100	587.928.200
b. Giro	650.842.264	206.919.551
c. Selisih Lebih Tabungan Antar Bank		
- Tabungan pada Bank Lain	24.560.628.739	21.737.982.959
- Tabungan Bank Lain pada Bank		
Jumlah Alat Likuid	25.844.436.103	22.532.830.710
2. Utang Lancar		
a. Kewajiban Segera	704.863.600	654.590.190
b. Simpanan:		
- Tabungan	54.533.590.021	57.234.072.792
- Deposito Berjangka	62.655.750.000	62.341.250.000
Jumlah Utang Lancar	117.894.203.621	120.229.912.982
Cash Ratio (Alat Likuid/Utang Lancar)	21,92%	18,74%

PT BPR NUSAMBA BRONDONG
RETURN ON ASSET (ROA)
BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BULAN	ASET	
	Tahun 2025	TAHUN 2024
Januari	142.844.330.963	143.104.551.868
Februari	139.423.552.529	147.303.770.246
Maret	136.558.576.868	140.314.714.678
April	136.640.324.857	141.878.033.567
Mei	137.552.921.444	143.462.744.861
Juni	136.811.210.371	141.982.816.180
Juli	136.061.489.812	139.235.865.740
Agustus	133.522.045.781	138.224.960.370
September	133.532.129.754	138.205.993.692
Oktober	136.936.002.296	138.875.665.436
November	138.185.782.291	140.181.446.423
Desember	142.632.217.996	145.006.012.050
Total Aset	1.650.700.584.962	1.697.776.575.111
Aset	137.558.382.080	141.481.381.259
Laba (Rugi) sebelum Pajak	4.480.949.087	3.294.226.557
Return on Asset (ROA)	3,26%	2,33%
Beban Operasional	25.827.426.294	27.750.959.045
Pendapatan Operasional	30.178.171.076	30.566.063.275
BOPO	85,58%	90,79%

PT BPR NUSAMBA BRONDONG
RETURN ON EQUITY (ROE)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
a. Laba sebelum Pajak	4.480.949.087	3.294.226.557
Jumlah Laba sebelum Pajak	4.480.949.087	3.294.226.557
b. Jumlah Modal	23.952.836.944	22.263.137.622
Jumlah Modal	23.952.836.944	22.263.137.622
RETURN ON EQUITY (ROE)	18,71%	14,80%

PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
NET INTEREST MARGIN (NIM)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN		TAHUN 2025	TAHUN 2024
1.	a. Pendapatan Bunga	26.554.939.449	26.858.431.003
	b. Biaya Bunga	(5.413.971.593)	(5.677.570.221)
	Pendapatan Bunga Bersih	21.140.967.856	21.180.860.783
2.	a. Kredit Yang Diberikan		
	Januari	108.097.871.749	118.436.237.461
	Februari	108.287.268.593	120.673.896.487
	Maret	109.766.468.320	121.723.916.063
	April	108.212.734.552	121.697.312.426
	Mei	106.529.408.297	122.293.877.792
	Juni	106.336.914.767	123.646.607.536
	Juli	108.447.418.600	122.297.822.294
	Agustus	107.443.249.954	121.469.168.107
	September	105.985.488.111	115.746.162.242
	Oktober	106.342.874.548	113.071.456.958
	November	105.946.523.513	110.316.520.793
	Desember	105.238.589.693	108.833.973.995
	b. Penempatan Pada Bank Lain		
	Januari	36.705.664.519	23.410.525.121
	Februari	33.305.538.551	25.902.251.185
	Maret	28.817.099.086	17.592.861.055
	April	30.283.006.966	19.502.196.933
	Mei	32.623.332.465	20.292.717.900
	Juni	32.033.525.013	17.541.505.140
	Juli	30.588.072.306	16.176.289.671
	Agustus	28.979.133.791	16.288.237.436
	September	30.281.185.483	22.863.567.512
	Oktober	33.576.601.140	26.818.827.136
	November	34.883.052.593	31.633.081.300
	Desember	40.241.471.006	37.974.902.510
	Rata-rata Aset Produktif	139.912.707.801	141.350.326.254
	NET INTEREST MARGIN (NIM)	15,11%	14,98%



PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
USULAN ADJUSTMENT & REKLASIFIKASI
PER 31 DESEMBER 2025

No.	No. Akun	Keterangan	Debit	Kredit	Setuju/ Tidak Setuju
A. PROPOSE ADJUSTMENT TAHUN 2025					
1	53403 16104	BY. PENY. INVENTARIS KANTOR AKUM PENY. INVENTARIS KANTOR <i>Koreksi kurang rata' bahan penyusutan atas inventaris. ATS Ang Gieset 100A yang seharusnya sudah disesuaikan di Bulan Desember</i>	88.021	88.021	Setuju Setuju
2	21104 56001	PPH PSL 25 TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN <i>Jurnal Pengakuan Utang PPh 25 Desember 2025</i>	123.424.809	123.424.809	Setuju Setuju
3	56001 21910	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 29 <i>Jurnal Pengakuan Utang PPh 29 Tahun 2025</i>	112.865.365	112.865.365	Setuju Setuju
Jumlah			236.378.195	236.378.195	

Brondong, 12 Januari 2026

Disetujui oleh,
PT BPR Nusamba Brondong

Bambang Edy Yuwono, SE.
Direktur Utama

Seni Hari Triwasono, S.Pd., MH.
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Dibuat oleh,
Pemeriksa

Dr. Muhaimin, CA., CPA., CACP., CFI.
Rekan - Pimpinan Cabang

Fiany Pradita Shanda, S.AK., ACPA.
Ketua Tim

MANAGEMENT LETTER

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

PT BPR NUSAMBA BRONDONG

Jl. Raya Brondong No. 77, Kec. Brondong
Kab. Lamongan, Jawa Timur – 62263

Bandung, 12 Januari 2026

Nomor: ML-0005/KAPJSR-Bdg/I/2026

Kepada Yth,

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPR Nusamba Brondong
Jl. Raya Brondong No. 77, Kec. Brondong
Kab. Lamongan, Jawa Timur – 62263**

Dengan Hormat,

Kami telah menyelesaikan audit atas laporan keuangan PT BPR Nusamba Brondong untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai bagian dari audit tersebut, kami telah mempelajari serta melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern Entitas sejauh yang kami pandang perlu menurut Standar Auditing. Perlu kami jelaskan bahwa studi dan penilaian ini bukan ditujukan untuk membentuk saran-saran menyeluruh dan bukan untuk mengungkapkan seluruh kelemahan sistem pengendalian intern Entitas.

Uraian, komentar, dan saran-saran terlampir yang kami catat selama audit, dimaksudkan untuk membantu memperbaiki sistem pengendalian intern dan meningkatkan kinerja Entitas. Kami juga memuat tanggapan dari manajemen Entitas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik seluruh staf dan karyawan PT BPR Nusamba Brondong.

KAP JOJO SUNARJO & REKAN

Dr. Muhaimin, M.Ak., CA., CPA., CACP., CFI

Register Akuntan Publik No. AP. 1877

Register Kantor Akuntan Publik No. NIU-KAP: KEP-439/KM.1/2013

Bandung Branch Office :

Jl. Cipunagara No. 14, Cihapit, Kec. Bandung Wetan

Kota Bandung, Jawa Barat 40114

Email: info@kapjsrbdg.co.id - Telepon: (022) 63196079

Nomor : ML-0005/KAPJSR-Bdg/II/2026
Lampiran : -
Perihal : *Management Letter*

**Kepada Yth.
Direksi & Dewan Komisaris
PT BPR Nusamba Brondong,**

Berdasarkan prosedur audit yang kami laksanakan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025, kami menemukan isu material terkait Manajemen Risiko Kredit yang memerlukan perhatian segera dan perbaikan sistematis.

Berikut adalah tiga temuan utama kami:

1. Tingginya Rasio NPL akibat Belum Optimalnya Strategi Recovery Kredit

Kondisi

Per 31 Desember 2025, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Bruto Bank tercatat sebesar 24,12% (NPL Netto 17,38%), yang berada di atas ambang batas sehat regulator sebesar 5%. Secara nominal, total kredit bermasalah mencapai Rp 25.387.354.348.

Berdasarkan hasil analisis mutasi kualitas kredit (*migration analysis*) atas Profil Kredit Tahun 2025, teridentifikasi ketidakseimbangan yang signifikan antara penurunan dan perbaikan kualitas kredit, dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit yang mengalami penurunan kualitas menjadi *Non-Performing Loan* (*downgrade*): Rp 7.740.739.419
- Kredit yang berhasil mengalami perbaikan kualitas dari kualitas *Non-Performing Loan* ke kualitas *Performing Loan* (*upgrade*): Rp 44.920.911
- Kredit yang berhasil dilakukan lelang : Rp 416.683.070
- Kredit yang berhasil dilakukan pelunasan : Rp 930.297.799
- Kredit yang berhasil dilakukan pelunasan dengan penjualan jaminan : Rp 758.430.845
- Angsuran Kredit untuk Kredit *Non-Performing Loan* : Rp 572.838.631
- Kredit Hapus buku (*write off*) : Rp 10.941.708
- Kredit yang berhasil dilakukan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) : Rp 525.000.000

Sehingga kenaikan NPL posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.481.626.454

Dengan demikian, tingkat keberhasilan perbaikan kualitas kredit (*cure rate*) tercatat relatif rendah, yaitu dengan rincian sebagai berikut, kredit NPL yang kembali menjadi *Performing Loan* sebesar 0,58%, Kredit Lelang sebesar 5,38%, Kredit Lunas sebesar 12,02%, dan kredit lunas dari penjualan jaminan sebesar 9,80%, angsuran kredit sebesar 7,40%, Kredit Hapus buku sebesar 0,14%, Kredit AYDA sebesar 6,78% ,dari total kredit yang menjadi *Non-Performing Loan*.

Dengan demikian, tingkat keberhasilan perbaikan kualitas kredit (*cure rate*) tercatat relatif rendah, yaitu sekitar 42,10% dari total kredit yang memburuk.

Kriteria

- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola mewajibkan Bank memiliki sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif, termasuk dalam pengelolaan kredit bermasalah.
- POJK No. 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR mensyaratkan Bank melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah secara optimal dan berkesinambungan.

Sebab

- Fungsi penagihan (*collection*) dan penyelamatan kredit (*remedial*) belum berjalan secara optimal, yang tercermin dari rendahnya tingkat perbaikan kualitas kredit.
- Fokus manajemen yang cukup besar pada ekspansi kredit baru (dropping Tahun 2025 sebesar Rp 59,5 miliar) belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan monitoring dan pengelolaan portofolio kredit yang telah berjalan.

Akibat

- Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang mencapai Rp 8.468.684.997, sehingga memberikan tekanan terhadap permodalan Bank.
- Penurunan profitabilitas, mengingat pendapatan bunga dari kredit bermasalah hanya dapat diakui secara *cash basis*, bukan secara akrual.

Rekomendasi

- Manajemen disarankan untuk melakukan peninjauan dan penguatan strategi penagihan serta penyelamatan kredit, termasuk pembentukan tim khusus (*task force*) untuk penanganan debitur bermasalah dengan eksposur terbesar.
- Perlu dipertimbangkan penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi fungsi penagihan yang tidak hanya berfokus pada realisasi setoran angsuran, tetapi juga pada keberhasilan perbaikan kualitas (*upgrade*) kolektibilitas kredit.
- Melakukan langkah penyelesaian kredit bermasalah secara lebih tegas dan terukur, termasuk eksekusi agunan atau penghapusbukuan (*write-off*) atas kredit macet yang telah dicadangkan secara penuh, guna memperbaiki kualitas aset dan rasio NPL.

2. Kelemahan dalam Analisis Kredit Baru (*Early Payment Default*) pada Kredit Non-Restrukturisasi

Kondisi

Berdasarkan reviu atas kredit yang dicairkan pada Tahun 2025 dengan status Non-Restrukturisasi (kredit baru murni), ditemukan sejumlah debitur yang mengalami penurunan kualitas kredit hingga kolektibilitas 4 dan 5 dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak pencairan.

Beberapa debitur berdasarkan Profil Kredit per 31 Desember 2025 antara lain:

- a) Debitur Matalim (No. 14497312): Cair 24 Januari 2025, plafon Rp 28.000.000, posisi Desember 2025 Kol 4 (Diragukan) dengan tunggakan bunga Rp4.441.923.

Kriteria

- POJK No. 1 Tahun 2024 Pasal 10 mewajibkan Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan kemampuan serta itikad debitur dalam memenuhi kewajibannya sebelum pencairan kredit.
- Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR (PKPP) mensyaratkan verifikasi menyeluruh atas aspek *character*, *capacity*, dan *cash flow* debitur.

Sebab

- Proses analisis kredit awal belum sepenuhnya didukung oleh penilaian arus kas debitur yang memadai dan berkelanjutan.
- Pengawasan pasca pencairan, termasuk pelaksanaan kunjungan *On The Spot* (OTS), belum dilakukan secara konsisten untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana kredit.

Akibat

- Terbentuknya kredit bermasalah pada tahap awal masa kredit (*early life credit*), yang memerlukan pembentukan CKPN dalam persentase tinggi (50%–100%) pada tahun pertama.
- Meningkatnya risiko penyalahgunaan dana kredit (*side streaming*) yang sulit terdeteksi sejak dini.

Rekomendasi

- Manajemen disarankan untuk menugaskan fungsi pengawasan internal (SKAI) melakukan reviu mendalam atas proses inisiasi dan persetujuan kredit pada debitur dengan penurunan kualitas ekstrem sejak awal masa kredit, sebagai dasar perbaikan proses dan pengendalian internal.
- Melakukan evaluasi terhadap penerapan kewenangan keputusan kredit serta meningkatkan pembinaan kompetensi analis dan pejabat pemutus kredit.
- Memperketat prosedur verifikasi, termasuk *trade checking* dan penelusuran SLIK OJK, khususnya untuk pengajuan kredit dengan plafon di atas Rp 20 juta.

3. Ketidaktersediaan *Chart of Accounts* (CoA) untuk Pajak Tangguhan dan Penghasilan Komprehensif Lain pada *Core Banking System* (CBS)

Kondisi

Pada Laporan Keuangan Tahun 2025, Bank telah menyajikan pos “Pajak Tangguhan” baik pada Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Laba Rugi, serta pos “Penghasilan Komprehensif Lainnya”, dengan saldo nihil (Rp 0). Penyajian tersebut secara manual telah sesuai dengan format dan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Namun demikian, berdasarkan penelaahan atas *Core Banking System* (CBS), diketahui bahwa kode akun (*Chart of Accounts/CoA*) untuk pencatatan Pajak Tangguhan dan Penghasilan Komprehensif Lain belum tersedia atau belum dibentuk di dalam sistem. Saat ini, Bank menyatakan belum terdapat perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan serta belum terdapat transaksi yang termasuk dalam *Other Comprehensive Income* (OCI). Meskipun demikian, ketiadaan akun tersebut di dalam sistem berpotensi menimbulkan kendala pencatatan apabila transaksi terkait muncul di masa mendatang.

Kriteria

- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP):
 - Bab 29 – Pajak Penghasilan, yang mengatur pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan atas konsekuensi pajak masa depan dari perbedaan temporer.
 - Bab 5 – Penyajian Laporan Keuangan, yang mensyaratkan penyajian total penghasilan komprehensif, yang mencakup laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- SEOJK No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR, yang menetapkan format standar laporan keuangan, termasuk penyajian Pajak Tangguhan dan Penghasilan Komprehensif Lain.

Sebab

- Koordinasi antara fungsi Akuntansi dan fungsi IT/Vendor CBS terkait penyesuaian dan pemetaan ulang *Chart of Accounts* pasca penerapan SAK EP belum dilakukan secara menyeluruh.
- Pertimbangan manajemen bahwa saldo akun terkait masih nihil, sehingga penambahan CoA tersebut belum diprioritaskan.

Akibat

- Risiko operasional di masa mendatang, apabila timbul transaksi yang memerlukan pengakuan pajak tangguhan (misalnya akibat perbedaan temporer fiskal dan komersial) atau penghasilan komprehensif lain (misalnya keuntungan/kerugian aktuarial atau revaluasi aset), Bank belum dapat mencatat transaksi tersebut secara otomatis melalui sistem.
- Ketergantungan pada jurnal manual, yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan (*human error*) serta menyulitkan penelusuran jejak audit (*audit trail*), karena pencatatan dilakukan di luar sistem inti.

Rekomendasi

a) Penambahan CoA pada CBS

Manajemen disarankan untuk menginstruksikan Bagian IT agar berkoordinasi dengan vendor CBS dalam menambahkan kode akun (CoA), minimal untuk:

- Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*),
- Liabilitas Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*),
- Pendapatan/Beban Pajak Tangguhan, dan
- Penghasilan Komprehensif Lain (*Other Comprehensive Income*).

b) Pemetaan ke Laporan Keuangan Sistem

Memastikan akun-akun tersebut telah dipetakan secara tepat ke dalam format Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang dihasilkan sistem, meskipun pada saat ini masih bersaldo nihil.

c) Simulasi dan Pengujian Sistem

Disarankan untuk melakukan simulasi pencatatan transaksi (*user acceptance test*) guna memastikan bahwa apabila di kemudian hari terdapat transaksi terkait pajak tangguhan atau penghasilan komprehensif lain, sistem telah siap menampung dan menyajikannya secara akurat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
01	Jojo Sunarjo & Rekan

**PERNYATAAN
PENGURUS PT BPR NUSAMBA BRONDONG**

Tentang
Tanggung Jawab Laporan Tahunan PT BPR Nusamba Brondong Tahun 2025

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT BPR Nusamba Brondong Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

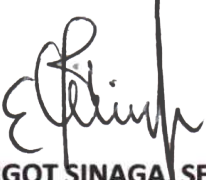
LAMONGAN, 31 Januari 2026
PT BPR NUSAMBA BRONDONG
Direksi,



BAMBANG EDY YUWONO, SE
Direktur Utama

SONI HARI TRIWASONO, S.PD. M.H
Direktur

Dewan Komisaris,


DINGOT SINAGA, SE. MM
Komisaris Utama


MUSLIM THOYIB, SE
Komisaris

Form E.01.00
Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Alamat	Jl. Raya Brondong No. 77 Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, kode Pos 62263
Nomor Telepon	0322-661688
Penjelasan Umum	Manajemen BPR telah melakukan Tata Kelola yang secara umum Baik
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
Keterangan		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Rekomendasi kepada Direksi		
Keterangan		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
--------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentaase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Dewan Komisaris				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentaase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentaase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	692.500.000	2	360.100.000
Tunjangan	2	362.534.360	2	145.477.940
Tantiem	2	17.500.000	2	7.500.000
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		1.072.534.360		513.077.940
Jenis Fasilitas Lain				
Fasilitas Lain	0	0	0	0
Perumahan	2	28.600.000	1	3.630.000
Transportasi	2	184.200.000	2	109.600.000
Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	2	3.840.000
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		224.320.000		117.070.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.296.854.360		630.147.940

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,39
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,66
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,78
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,02
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,65

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2025 di PT. BPR Nusamba Brondong adalah sebagai berikut.

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
13-01-2025	2	Rapat Dewan Komisaris
13-01-2025	9	Rapat Triwulan IV Tahun 2024
13-01-2025	4	Rapat Pengawasan Dekom dengan SKAI dan PE Kepatuhan
15-04-2025	2	Rapat Dewan Komisaris
15-04-2025	9	Rapat Triwulan I Tahun 2025
15-04-2025	4	Rapat Pengawasan Dekom dengan SKAI dan PE Kepatuhan untuk Triwulan I tahun 2025
14-07-2025	2	Rapat Dewan Komisaris
14-07-2025	9	Rapat Triwulan II Tahun 2025
14-07-2025	4	Rapat Pengawasan Dekom dengan SKAI dan PE Kepatuhan untuk Triwulan II Tahun 2025
13-10-2025	2	Rapat Dewan Komisaris
13-10-2025	9	Rapat Triwulan III Tahun 2025
13-10-2025	4	Rapat Pengawasan Dekom dengan SKAI dan PE Kepatuhan

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	

Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris

Form E.08.00

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Tidak Ada Penyimpangan Internal (Internal Fraud) di Tahun 2025

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	1	1

Permasalahn Hukum yang dihadapi sampai tahun laporan telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
07-03-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN TAKJIL MASYARAKAT SETEMPAT	1.000.000
18-03-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN TAKJIL MASYARAKAT SETEMPAT	850.000
21-03-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN TAKJIL MASYARAKAT SETEMPAT	2.529.000
28-03-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN TAKJIL MASYARAKAT SETEMPAT	1.404.000
28-03-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN TAKJIL MASYARAKAT SETEMPAT	1.404.000
16-05-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN NASI BUNGKUSMASYARAKAT SETEMPAT	1.000.000
23-05-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN NASI BUNGKUSMASYARAKAT SETEMPAT	1.000.000
11-07-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN NASI BUNGKUS - JUMAT BERKAHMASYARAKAT SETEMPAT	1.500.000
18-07-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN NASI BUNGKUSMASYARAKAT SETEMPAT	1.500.000
13-06-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBAGIAN NASI BUNGKUSMASYARAKAT SETEMPAT	1.500.000
04-06-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	PEMBELIAN 1 EKOR SAPI QURBANMASYARAKAT SETEMPAT	27.000.000
25-03-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	SANTUNAN FAKIR MISKIN & ANAK YATIM PIATU LANGGAR KIDUL	1.000.000
27-03-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	SANTUNAN ANAK YATIM DAN DHUAFA MUSHOLA BAABUNNAJAHANAK YATIM PIATU DAN DHUAFA - WARGA SETEMPAT	2.000.000
24-07-2025	01	KEGIATAN SOSIAL	SANTUNAN YATIM PIATU - SENDANGDUWURANAK YATIM PIATU - WARGA SETEMPAT	1.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong

Posisi Laporan : Desember 2025

LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA

TAHUN 2025

BPR NUSAMBA BRONDONG

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR NUSAMBA BRONDONG
TAHUN 2025**



**JL. RAYA BRONDONG NO. 77 KEL. BRONDONG KEC.
BRONDONG
KAB LAMONGAN - JAWA TIMUR
TELEPON: 0322661688**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR NUSAMBA BRONDONG
Alamat	Jl. Deandels No. 77 Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan - Jawa Timur
Nomor Telepon	(0322) 661688

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Nusamba Brondong pada semester II tahun 2025 masih belum bisa membawa perkembangan yang positif dalam meningkatkan kinerja BPR di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang masih belum pulih.

BPR Nusamba Brondong memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Nusamba Brondong dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Lamongan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Nusamba Brondong didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Nusamba Brondong.

BPR Nusamba Brondong telah beroperasi lebih dari 35 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu Menjadi Bank yang Terpercaya dan Membangun Masa Depan.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Nusamba Brondong selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Nusamba Brondong terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang

signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Bambang Edy Yuwono S.E.
	Jabatan	Direktur Utama
	NIK	3505171905680004
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.	
2.	Nama	Soni Hari Triwasono S. Pd., M.H.
	Jabatan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	NIK	3572010911760003
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.	

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Nusamba Brondong.
- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti
- f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- g. Inovasi proses kredit secara digital telah diimplementasikan sejak 01 Juli 2024.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Dingot Sinaga S.E., M.M.
	Jabatan	Komisaris Utama
	NIK	3578140707630001
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.	
2.	Nama	Muslim Thoyib S.E.
	Jabatan	Komisaris
	NIK	3510090706660002
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi	

dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Nusamba Brondong.
- Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Bambang Edy Yuwono S.E.
	NIK	3505171905680004
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Soni Hari Triwasono S. Pd., M.H.
	NIK	3572010911760003

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
--	----------------------------	------

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Dingot Sinaga S.E., M.M.
	NIK	3578140707630001
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Muslim Thoyib S.E.
	NIK	3510090706660002
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Bambang Edy Yuwono S.E.
	NIK	3505171905680004
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Soni Hari Triwasono S. Pd., M.H.
	NIK	3572010911760003
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Dingot Sinaga S.E., M.M.
	NIK	3578140707630001

	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Muslim Thoyib S.E.
	NIK	3510090706660002
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada kelompok usaha BPR tidak ada

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Bambang Edy Yuwono S.E.
	NIK	3505171905680004
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Soni Hari Triwasono S. Pd., M.H.
	NIK	3572010911760003
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Dingot Sinaga S.E., M.M.
	NIK	3578140707630001
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Muslim Thoyib S.E.
	NIK	3510090706660002
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.
 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tidak ada.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Bambang Edy Yuwono S.E.
	NIK	3505171905680004
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Soni Hari Triwasono S. Pd., M.H.
	NIK	3572010911760003
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Dingot Sinaga S.E., M.M.
	NIK	3578140707630001

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Muslim Thoyib S.E.
	NIK	3510090706660002
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.
 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Bambang Edy Yuwono S.E.
	NIK	3505171905680004
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Soni Hari Triwasono S. Pd., M.H.
	NIK	3572010911760003

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Dingot Sinaga S.E., M.M.
	NIK	3578140707630001
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Muslim Thoyib S.E.
	NIK	3510090706660002
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.
 Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp692.500.000

Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp360.100.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp362.534.360
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp145.477.940

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp17.500.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp7.500.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp28.600.000
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp3.630.000

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp184.200.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp109.600.000

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
--	----------------

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp11.520.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp3.840.000

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS tanggal 5 Maret 2025

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	5,39 : 1
-------------	-----------------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,66 : 1
-------------	-----------------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,78 : 1
-------------	-----------------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,02 : 1
-------------	-----------------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,65 : 1
-------------	----------

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2025 di PT. BPR Nusamba Brondong adalah seperti tersebut diatas.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	13 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris	
2.	Tanggal Rapat	13 Januari 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Triwulan IV Tahun 2024	
3.	Tanggal Rapat	13 Januari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Pengawasan Dekom dengan SKAI dan PE Kepatuhan	
4.	Tanggal Rapat	15 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris	
5.	Tanggal Rapat	15 April 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Triwulan I Tahun 2025	
6.	Tanggal Rapat	15 April 2025

	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Pengawasan Dekom dengan SKAI dan PE Kepatuhan untuk Triwulan I tahun 2025	
7.	Tanggal Rapat	14 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris	
8.	Tanggal Rapat	14 Juli 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Triwulan II Tahun 2025	
9.	Tanggal Rapat	14 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Pengawasan Dekom dengan SKAI dan PE Kepatuhan untuk Triwulan II Tahun 2025	
10.	Tanggal Rapat	13 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris	
11.	Tanggal Rapat	13 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Triwulan III Tahun 2025	
12.	Tanggal Rapat	13 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Pengawasan Dekom dengan SKAI dan PE Kepatuhan	

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 12 (dua puluh tujuh) kali dalam setahun di

sepanjang tahun 2025.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Dingot Sinaga S.E., M.M.
	NIK	3578140707630001
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	12 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Muslim Thoyib S.E.
	NIK	3510090706660002
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	12 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

nihil

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	1 kasus

Ada 1 permasalahan Hukum Perdata yaitu Gugatan Sederhana an. Yesiska Juli Rahmwati

yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Dan 1 permasalahan Hukum Pidana, yang masih dalam proses, dimana BPR sebagai saksi atas penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh nasabah BPR.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	07 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN TAKJIL
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN TAKJIL
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp850.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN TAKJIL
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp2.529.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	28 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN TAKJIL
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp1.404.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	28 Maret 2025

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN TAKJIL
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp1.404.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	16 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN NASI BUNGKUS
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	23 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN NASI BUNGKUS
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	11 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN NASI BUNGKUS - JUMAT BERKAH
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	18 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN NASI BUNGKUS
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	13 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBAGIAN NASI BUNGKUS

	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	04 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMBELIAN 1 EKOR SAPI QURBAN
	Penjelasan Kegiatan	MASYARAKAT SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp27.000.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	25 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SNTUNAN FAKIR MISKIN DAN ANAK YATIM PIATU LANGGAR KIDUL - BRONDONG
	Penjelasan Kegiatan	FAKIR MISKIN LANGGAR KIDUL - BRONDONG
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	27 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SANTUNAN ANAK YATIM DAN DHUAFA MUSHOLA BAABUNNAJAH
	Penjelasan Kegiatan	ANAK YATIM PIATU DAN DHUAFA - WARGA SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	24 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SANTUNAN YATIM PIATU - SENDANGDUWUR
	Penjelasan Kegiatan	ANAK YATIM PIATU - WARGA SETEMPAT
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000

PT. BPR Nusamba Brondong aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR NUSAMBA BRONDONG untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Lamongan, 09 Januari 2026

BPR NUSAMBA BRONDONG

Disetujui oleh,



Bambang Edy Yuwono S. E.
Direktur Utama

Disetujui oleh

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dingot Sinaga".

Dingot Sinaga, S.E., M.M.
Komisaris Utama





LAPORAN

PENGENDALIAN INTERNAL INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN BANK

TAHUN 2025

BPR NUSAMBA BRONDONG



LAPORAN HASIL PENGUJIAN ATAS
POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BPR NUSAMBA BRONDONG
Posisi 31 Desember 2025

Nama BPR : BPR NUSAMBA BRONDONG
 Alamat : JL. RAYA BRONDONG NO. 77 KEL. BRONDONG KEC. BRONDONG
 KAB LAMONGAN - JAWA TIMUR
 Nomor Telepon : 0322661688
 Posisi Keuangan : 31 Desember 2025
 Modal Inti : Rp23.588.754.376
 Total Aset : Rp142.632.217.996

1. Pengujian Atas Pos-pos Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

1.1. Pengujian Atas Pos-pos Aset pada Laporan Posisi Keuangan

Tabel 1. Aset pada Laporan Posisi Keuangan

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Kas dalam Rupiah	587.928.200	632.965.100	45.036.900	7,66%
Penempatan pada Bank Lain	37.974.902.510	40.241.471.005	2.266.568.495	5,97%
-/- CKPN/PPKA Penempatan pada Bank Lain	129.352.985	131.125.874	1.772.889	1,37%
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	108.833.973.995	105.238.589.693	-3.595.384.302	-3,30%
-/- Provisi Belum Diamortisasi	1.511.956.095	1.181.882.997	-330.073.098	-21,83%
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	60.697.988	162.312.236	101.614.248	167,41%
-/- CKPN/PPKA Kredit yang Diberikan	6.270.138.916	8.468.684.997	2.198.546.081	35,06%
Agunan yang diambil alih (AYDA)	0	525.000.000	525.000.000	100,00%
Aset Tetap dan Inventaris	5.777.068.786	6.112.576.286	335.507.500	5,81%
-/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	3.587.982.279	3.784.629.052	196.646.773	5,48%
Aset Lainnya	3.223.754.818	3.610.339.088	386.584.270	11,99%
TOTAL ASET	145.006.012.050	142.632.306.016	-2.373.706.034	-1,64%

1. Kas dalam Rupiah

Kas dalam Rupiah di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp632.965.100, tumbuh sebesar Rp45.036.900 atau 7,66%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp587.928.200 pada 31 Desember 2024.

2. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.241.471.005, tumbuh sebesar Rp2.266.568.495 atau 5,97%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp37.974.902.510 pada 31 Desember 2024.

3. -/- CKPN/PPKA Penempatan pada Bank Lain

-/- CKPN/ PPKA Penempatan pada Bank Lain di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp131.125.874, tumbuh sebesar Rp1.772.889 atau 1,37%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp129.352.985 pada 31 Desember 2024.

4. Kredit yang Diberikan (Baki Debet)

Kredit yang Diberikan (Baki Debet) di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp105.238.589.693, turun sebesar - Rp3.595.384.302 atau -3,30%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp108.833.973.995 pada 31 Desember 2024.

5. -/- Provisi Belum Diamortisasi

-/- Provisi Belum Diamortisasi di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.181.882.997, turun sebesar -Rp330.073.098 atau -21,83%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp1.511.956.095 pada 31 Desember 2024.

Pada Tahun 2024 sesuai SEOJK No. 21/ SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR, diutus mengenai penetapan pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat bagi BPR, dimana BPR belum bisa menyajikan kembali saldo awal dengan menggunakan saldo akhir 31 Desember 2023 maupun saldo akhir 31 Desember 2024, kondisi tidak praktis yang terdapat pada BPR dikarenakan belum adanya perhitungan otomatis yang disajikan oleh Core Banking sehingga menyusahkan BPR untuk melakukan penghitungan kembali.

6. -/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi

-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp162.312.236, tumbuh sebesar Rp101.614.248 atau 167,41%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp60.697.988 pada 31 Desember 2024.

Karena pada Tahun 2025 terjadi kenaikan untuk kredit restruk yang menunggak, sehingga pendapatan bunga yang diatngguhkan semakin meningkat secara drastis

7. -/- CKPN/PPKA Kredit yang Diberikan

-/- CKPN/PPKA Kredit yang Diberikan di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.468.684.997, tumbuh sebesar Rp2.198.546.081 atau 35,06%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp6.270.138.916 pada 31 Desember 2024.

Kenaikan pembentukan CKPN pada Tahun 2025, salah satunya karena dipengaruhi oleh kualitas Kredit yang memburuk, dari Rp. 20.905.729 (ribu) menjadi Rp. 25.387.354 (ribu).

8. Agunan yang diambil alih (AYDA)

Agunan yang diambil alih (AYDA) di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp525.000.000, tumbuh sebesar Rp525.000.000 atau 100,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp0 pada 31 Desember 2024.
 Pada akhir Desember 2025, ada salah satu Kredit yang dilakukan Lelang AYDA sebesar Rp. 525.000 (ribu).

9. Aset Tetap dan Inventaris

Aset Tetap dan Inventaris di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.112.576.286, tumbuh sebesar Rp335.507.500 atau 5,81%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp5.777.068.786 pada 31 Desember 2024.

10. -/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

-/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.784.629.052, tumbuh sebesar Rp196.646.773 atau 5,48%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp3.587.982.279 pada 31 Desember 2024.

11. Aset Lainnya

Aset Lainnya di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.610.339.088, tumbuh sebesar Rp386.584.270 atau 11,99%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp3.223.754.818 pada 31 Desember 2024.

12. TOTAL ASET

TOTAL ASET di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp142.632.306.016, turun sebesar - Rp2.373.706.034 atau -1,64%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp145.006.012.050 pada 31 Desember 2024.

1.2. Pengujian Atas Pos-pos Liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2. Liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Liabilitas Segera	495.921.781	468.047.856	-27.873.925	-5,62%
Tabungan	57.234.072.792	54.533.590.021	-2.700.482.771	-4,72%
Deposito	62.341.250.000	62.655.750.000	314.500.000	0,50%
-/- Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi	1.643.586.000	1.711.990.000	68.404.000	4,16%
Simpanan dari Bank Lain	3.290.000.000	2.940.000.000	-350.000.000	-10,64%
Liabilitas Lainnya	131.974.245	123.950.379	-8.023.866	-6,08%
TOTAL LIABILITAS	121.876.325.982	119.122.213.621	-2.754.112.361	-2,26%

1. Liabilitas Segera

Liabilitas Segera di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp468.047.856, turun sebesar -Rp27.873.925 atau -5,62%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp495.921.781 pada 31 Desember 2024.

2. Tabungan

Tabungan di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp54.533.590.021, turun sebesar -Rp2.700.482.771 atau -4,72%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp57.234.072.792 pada 31 Desember 2024.

3. Deposito

Deposito di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp62.655.750.000, tumbuh sebesar Rp314.500.000 atau 0,50%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp62.341.250.000 pada 31 Desember 2024.

4. -/- Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi

-/- Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.711.990.000, tumbuh sebesar Rp68.404.000 atau 4,16%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp1.643.586.000 pada 31 Desember 2024.

5. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.940.000.000, turun sebesar -Rp350.000.000 atau -10,64%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp3.290.000.000 pada 31 Desember 2024.

6. Liabilitas Lainnya

Liabilitas Lainnya di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp123.950.379, turun sebesar -Rp8.023.866 atau -6,08%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp131.974.245 pada 31 Desember 2024.

7. TOTAL LIABILITAS

TOTAL LIABILITAS di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp119.122.213.621, turun sebesar -Rp2.754.112.361 atau -2,26%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp121.876.325.982 pada 31 Desember 2024.

1.3. Pengujian Atas Pos-pos Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan

Tabel 3. Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0,00%
Modal yang Belum Disetor -/-	10.981.000.000	10.981.000.000	0	0,00%

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Cadangan Umum	1.803.800.000	1.803.800.000	0	0,00%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.599.806.267	3.529.829.633	930.023.366	35,77%
TOTAL EKUITAS	23.129.685.068	23.499.532.949	369.847.881	1,60%

1. Modal Dasar

Modal Dasar di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.000.000.000, tumbuh sebesar Rp0 atau 0,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp20.000.000.000 pada 31 Desember 2024.

2. Modal yang Belum Disetor -/-

Modal yang Belum Disetor -/- di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.981.000.000, tumbuh sebesar Rp0 atau 0,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp10.981.000.000 pada 31 Desember 2024.

3. Cadangan Umum

Cadangan Umum di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.803.800.000, tumbuh sebesar Rp0 atau 0,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp1.803.800.000 pada 31 Desember 2024.

4. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba (Rugi) Tahun Berjalan di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.529.829.633, tumbuh sebesar Rp930.023.366 atau 35,77%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp2.599.806.267 pada 31 Desember 2024.

Pertumbuhan Laba Rugi Tahun 2025 dipengaruhi oleh menurunnya total biaya pada Tahun 2025 Rp. 22.073.388.825 dibanding tahun 2024 sebesar Rp. 25.827.338.274, walaupun total pendapatan di tahun 2025 juga terkondisi menurun dari Rp. 24.888.493.054 dari 25.827.338.274

5. TOTAL EKUITAS

TOTAL EKUITAS di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp23.499.532.949, tumbuh sebesar Rp369.847.881 atau 1,60%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp23.129.685.068 pada 31 Desember 2024.

2. Pengujian Atas Pos-pos Laporan Laba Rugi

Tabel 4. Laporan Laba Rugi

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Pendapatan Bunga Kontraktual Penempatan Pada Bank Lain	492.548.165	1.044.018.576	551.470.411	111,96%
Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit yang Diberikan	26.365.882.838	25.510.920.873	-854.961.965	-3,24%
Pendapatan Provisi Kredit	1.631.797.983	1.644.382.568	12.584.585	0,77%

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Pendapatan Lainnya	2.075.834.289	1.978.849.058	-96.985.231	-4,67%
Total Pendapatan Operasional	30.566.063.275	30.178.171.075	-387.892.200	-1,27%
Beban Bunga Kontraktual	5.630.728.584	5.395.596.595	-235.131.989	-4,18%
Beban Pemasaran	488.675.643	505.076.624	16.400.981	3,36%
Beban Administrasi dan Umum	18.554.519.833	18.201.017.004	-353.502.829	-1,91%
Beban Lainnya	379.459.689	329.183.578	-50.276.111	-13,25%
Total Beban Operasional	22.073.388.825	25.827.338.274	3.753.949.449	17,01%
Laba (Rugi) Operasional	2.815.104.229	4.350.832.801	1.535.728.572	54,55%
Total Pendapatan Non Operasional	479.122.328	271.929.503	-207.192.825	-43,24%
Total Beban Non Operasional	110.555.966	141.725.198	31.169.232	28,19%
Laba (Rugi) Non Operasional	479.122.328	130.204.305	-348.918.023	-72,82%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3.294.226.557	4.480.949.087	1.186.722.530	36,02%
Taksiran Pajak Penghasilan	694.420.290	951.207.473	256.787.183	36,98%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Setelah Pajak)	2.599.806.267	3.529.829.633	930.023.366	35,77%

1. Pendapatan Bunga Kontraktual Penempatan Pada Bank Lain

Pendapatan Bunga Kontraktual Penempatan Pada Bank Lain di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.044.018.576, tumbuh sebesar Rp551.470.411 atau 111,96%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp492.548.165 pada 31 Desember 2024. Adanya kenaikan Bunga kontraktual penempatan pada Bank Lain karena adanya kenaikan simpanan pada bank lain baik yang berupa tabungan dan juga deposito

2. Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit yang Diberikan

Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit yang Diberikan di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.510.920.873, turun sebesar -Rp2.979.308.113 atau -10,46%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp28.490.228.986 pada 31 Desember 2024.

3. Pendapatan Provisi Kredit

Pendapatan Provisi Kredit di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.644.382.568, tumbuh sebesar Rp12.584.585 atau 0,77%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp1.631.797.983 pada 31 Desember 2024.

4. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.978.849.058, turun sebesar -Rp96.985.231 atau -4,67%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp2.075.834.289 pada 31 Desember 2024.

5. Total Pendapatan Operasional

Total Pendapatan Operasional di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.827.338.274, tumbuh sebesar Rp938.845.220 atau 3,77%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp24.888.493.054 pada 31 Desember 2024.

6. Beban Bunga Kontraktual

Beban Bunga Kontraktual di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.395.596.595, turun sebesar -Rp235.131.989 atau -4,18%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp5.630.728.584 pada 31 Desember 2024.

7. Beban Pemasaran

Beban Pemasaran di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp505.076.624, tumbuh sebesar Rp16.400.981 atau 3,36%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp488.675.643 pada 31 Desember 2024.

8. Beban Administrasi dan Umum

Beban Administrasi dan Umum di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.201.017.004, turun sebesar -Rp353.502.829 atau -1,91%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp18.554.519.833 pada 31 Desember 2024.

9. Beban Lainnya

Beban Lainnya di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp316.297.550, turun sebesar -Rp84.723.131 atau -21,13%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp401.020.681 pada 31 Desember 2024.

10. Total Beban Operasional

Total Beban Operasional di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.827.338.274, tumbuh sebesar Rp3.753.949.449 atau 17,01%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp22.073.388.825 pada 31 Desember 2024.

11. Laba (Rugi) Operasional

Laba (Rugi) Operasional di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.350.832.801, tumbuh sebesar Rp1.535.728.572 atau 54,55%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp2.815.104.229 pada 31 Desember 2024.

Adanya kenaikan Laba dikarenakan adanya efisiensi biaya di Tahun 2025, sehingga terkondisi pada Laba (Rugi) Operasional

12. Total Pendapatan Non Operasional

Total Pendapatan Non Operasional di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp271.929.503, turun sebesar -Rp207.192.825 atau -43,24%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp479.122.328 pada 31 Desember 2024.

Pendapatan Non Operasional dipengaruhi oleh menurunnya Fee Asuransi, Fee Notaris dan juga dari Fee Komunal, yang dipengaruhi oleh menurunnya KYD

13. Total Beban Non Operasional

Total Beban Non Operasional di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp141.725.198, tumbuh sebesar Rp31.169.232 atau 28,19%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp110.555.966 pada 31 Desember 2024. Adanya pertumbuhan beban non operasional dipengaruhi oleh Aktivitas Karyawan dan juga denda/saksi yang cukup signifikan.

14. Laba (Rugi) Non Operasional

Laba (Rugi) Non Operasional di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp130.204.305, turun sebesar - Rp348.918.023 atau -72,82%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp479.122.328 pada 31 Desember 2024. Adanya penurunan Laba (Rugi) Non Operasional yang cukup signifikan dikarenakan adanya pendapatan dari AYDA dan juga Fee Asuransi yang menurun drastis.

15. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.480.949.087, tumbuh sebesar Rp1.186.722.530 atau 36,02%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp3.294.226.557 pada 31 Desember 2024. Total pendapatan Tahun 2025 turun Rp. 705.641 (ribu), sedangkan total biaya juga turun sebesar Rp. 1.920.499 (ribu), karena adanya efisiensi biaya sehingga memberikan efek pada laba rugi tahun 2025

16. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp951.207.473, tumbuh sebesar Rp256.787.183 atau 36,98%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp694.420.290 pada 31 Desember 2024. Karena dipengaruhi oleh kenaikan laba rugi pada tahun 2025

17. Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Setelah Pajak)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Setelah Pajak) di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.529.829.633, tumbuh sebesar Rp930.023.366 atau 35,77%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp2.599.806.267 pada 31 Desember 2024. Karena adanya efisiensi biaya pada Tahun 2025 sehingga terjadi kenaikan laba di Tahun 2025

3. Pengujian Atas Pos-pos Laporan Rekening Administratif

Tabel 5. Laporan Rekening Administratif

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Tagihan Komitmen	2.000.000.000	0	-2.000.000.000	-100,00%
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	9.457.727.221	12.789.785.070	3.332.057.849	35,23%
Aset Produktif yang dihapusbuku	3.667.272.825	3.529.755.041	-137.517.784	-3,75%
Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	525.000.000	525.000.000	100,00%

1. Tagihan Komitmen

Tagihan Komitmen di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, turun sebesar -Rp2.000.000.000 atau -100,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp2.000.000.000 pada 31 Desember 2024.
 Pada Tahun 2025 tidak ada Tagihan Komitmen

2. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian

Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.789.785.070, tumbuh sebesar Rp3.332.057.849 atau 35,23%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp9.457.727.221 pada 31 Desember 2024.
 Karena dipengaruhi oleh pendapatan DELTA dari pemberlakuan SAKEP

3. Aset Produktif yang dihapusbuku

Aset Produktif yang dihapusbuku di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.529.755.041, turun sebesar - Rp137.517.784 atau -3,75%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp3.667.272.825 pada 31 Desember 2024.

4. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit

Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp525.000.000, tumbuh sebesar Rp525.000.000 atau 100,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp0 pada 31 Desember 2024.
 Pada bulan Desember 2025, telah dilakukan Lelang AYDA denan baki debit Rp. 525.000 (ribu)

4. Pengujian Atas Pos-pos Data Fluktuasi Rasio-rasio Keuangan

Tabel 6. Data Fluktuasi Rasio-rasio Keuangan

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (%)	Des 2025 (%)	Mutasi (%)	YoY
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) (KPM)	34,33%	36,61%	2,28%	6,64%
Non Performing Loan (NPL)	13,79%	17,38%	3,59%	26,03%

Keterangan	Des 2024 (%)	Des 2025 (%)	Mutasi (%)	YoY
Neto				
Non Performing Loan (NPL) Gross	19,21%	24,12%	4,91%	25,56%
Return on Assets (ROA)	2,33%	3,26%	0,93%	39,91%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	90,79%	85,58%	-5,21%	-5,74%
Net Interest Margin (NIM)	14,98%	15,11%	0,13%	0,87%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	91,02%	89,80%	-1,22%	-1,34%
Cash Ratio (CR)	18,74%	21,92%	3,18%	16,97%

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 36,61%, tumbuh sebesar 2,28% atau 6,64%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 34,33% pada 31 Desember 2024.

2. Non Performing Loan (NPL) Neto

Non Performing Loan (NPL) Neto di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 17,38%, tumbuh sebesar 3,59% atau 26,03%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 13,79% pada 31 Desember 2024.

Karena adanya kenaikan NPL Netto secara nominal sebesar Rp. 3.291.841.997 dan dipengaruhi oleh menurunnya KYD secara year to year sebesar Rp. 5.551.919.749

3. Non Performing Loan (NPL) Gross

Non Performing Loan (NPL) Gross di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 24,12%, tumbuh sebesar 4,91% atau 25,56%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 19,21% pada 31 Desember 2024.

Karena dipengaruhi pemburukan kualitas NPL Gross sebesar Rp. 4.481.626.036 dan juga dipengaruhi memburuknya KYD dengan penurunan sebesar Rp. 5.551.919.749

4. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 3,26%, tumbuh sebesar 0,93% atau 39,91%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 2,33% pada 31 Desember 2024.

Karena adanya penurunan Aset sebesar Rp. 2.373.794.054

5. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 85,58%, turun sebesar -5,21% atau -5,74%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 90,79% pada 31 Desember 2024.

6. Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 15,11%, tumbuh sebesar 0,13% atau 0,87%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 14,98% pada 31 Desember 2024.

7. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 89,80%, turun sebesar -1,22% atau -1,34%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 91,02% pada 31 Desember 2024.

8. Cash Ratio (CR)

Cash Ratio (CR) di BPR NUSAMBA BRONDONG posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 21,92%, tumbuh sebesar 3,18% atau 16,97%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 18,74% pada 31 Desember 2024.

Analisa dan Kesimpulan Akhir Hasil Pengujian Atas Pos-pos Laporan Keuangan

PT. BPR Nusamba Brondong mengalami tekanan pada kinerja keuangannya di periode ini, yang tercermin dari beberapa indikator utama. Rasio Non- Performing Loan (NPL) mencatatkan peningkatan seiring dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit terkait pandemi COVID-19. Kondisi ini mengindikasikan adanya sejumlah debitur yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka pasca berakhirnya relaksasi kebijakan tersebut. Sebagai dampak dari meningkatnya NPL, bank perlu mengalokasikan dana lebih besar untuk Penyisihan Penghapusan Kredit Aktiva (PPKA) guna mengantisipasi potensi kerugian kredit. Peningkatan beban pencadangan ini berkontribusi pada tekanan terhadap profitabilitas bank.

Di sisi pendapatan, bank mengalami penurunan pada pendapatan bunga yang turut mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut - kenaikan NPL, peningkatan beban PPKA, dan penurunan pendapatan bunga - mengakibatkan penurunan signifikan pada laba bank. Meski demikian, penurunan ini masih dapat dikategorikan wajar mengingat kondisi dan tantangan yang dihadapi.

Secara umum pengujian atas pos-pos laporan keuangan menunjukkan kondisi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Lamongan, 09 Januari 2026

BPR NUSAMBA BRONDONG

Disiapkan oleh,

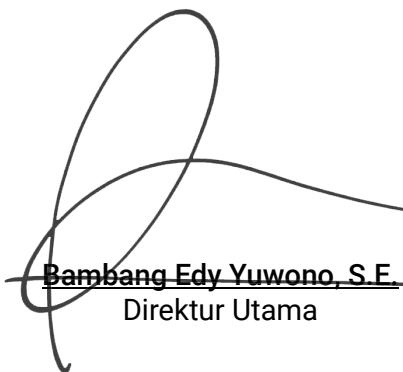


Suyono, S.S.
PE Kepatuhan

Disetujui oleh,



**bank
nusamba**
bpr nusamba brondong



Bambang Edy Yuwono, S.E.
Direktur Utama



Soni Hari Triwasono, S.Pd., M.H.
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN BANK

Posisi Keuangan : 31 Desember 2025
Nama BPR : BPR NUSAMBA BRONDONG
Alamat : JL. RAYA BRONDONG NO. 77 KEL. BRONDONG KEC. BRONDONG
KAB LAMONGAN - JAWA TIMUR
Nomor Telepon : 0322661688
Modal Inti : Rp23.588.754.376
Total Aset : Rp142.632.217.996

BPR Nusamba Brondong melaksanakan sistem pengendalian internal dalam proses Pelaporan Keuangan Bank untuk meningkatkan integritas pelaporan keuangan Bank sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No. 15 Tahun 2024. Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan BPR Nusamba Brondong bertujuan untuk : (1) memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; (2). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; (3) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan (4) Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan (PIPKu) dilaksanakan agar Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan semakin berintegritas. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab Direksi. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi serta melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan pasal 8 ayat (3) POJK No. 15 Tahun 2024.

Dasar Penetapan

Bank mengimplementasikan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
2. POJK No. 9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

I. Pendahuluan

BPR Nusamba Brondong melaksanakan penilaian sendiri terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank menggunakan Kerangka Kerja COSO dengan 5 (lima) Komponen Pengendalian Internal sesuai informasi sebagai berikut:

1. Metodologi

COSO *framework* adalah kerangka kerja yang dapat membantu BPR/ S menghubungkan pengendalian internal dengan proses bisnis. Caranya yaitu dengan melaksanakan pengendalian internal pada aktivitas sehari-hari. Jika digunakan secara efektif, COSO mampu menjamin pemenuhan standar etika dan keamanan bagi para pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Kerangka

Penilaian sendiri terhadap 5 (lima) komponen pengendalian COSO yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Aktivitas Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan.

2.1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pengendalian lingkungan mencakup integritas dan nilai-nilai etika serta nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian internal di seluruh jenjang organisasi.

2.2. Penilaian Risiko

Bank mengidentifikasi, menilai atau mengukur risiko-risiko untuk menyakini kecukupan pengendalian internal bahwa risiko dikelola sesuai dengan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank.

2.3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk memitigasi risiko dalam rangka penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas.

2.4. Informasi dan Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan agar terdapat pendistribusian informasi secara cepat, akurat dan tepat waktu guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Unit Kerja terkait hingga Pegawai

2.5. Pemantauan

Pemantauan merupakan evaluasi yang sedang berlangsung (*on going monitoring*) di Unit Kerja, evaluasi secara terpisah yang dilakukan oleh Audit Internal maupun kombinasi dari keduanya untuk memastikan apakah masing-masing dari 5 (lima) komponen pengendalian internal telah berjalan dengan baik.

II. Profil BPR

No	Informasi	Deskripsi / Keterangan
1	Dasar Hukum Pendirian BPR dan Ijin Operasional dari Regulator	PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Brondong (selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta Notaris Abdul Latief, S.H., No. 111. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-10272 HT.01.01-TH.89, tanggal 8 November 1989. Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, salah satunya dengan akta Notaris Ny. Fitri Budiani, S.H., M.Kn. No.35 tanggal 19 Desember 2024, mengenai persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar, Maksud, dan Tujuan, dan Persetujuan Perubahan Pasal 12 Ayat (1) Anggaran Dasar, Tugas, dan Wewenang Direksi Perseroan. Sesuai perubahan akta tersebut, terdapat perubahan nomenklatur yang semula "PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Brondong disingkat PT BPR Nusamba Brondong" menjadi "PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Brondong disingkat PT BPR Nusamba Brondong". Terakhir akta mengalami perubahan dengan akta Notaris Ny. Fitri Budiani, S.H., M.Kn. No. 05 tanggal 15 Juli 2025 tentang persetujuan pengangkatan kembali seorang anggota Direksi Perseroan.
2	Pemegang Saham	1. Sentra Modal Harmoni (90,19%) - Pemegang Saham Pengendali (PSP) 2. Fajar Mas Murni (9,81%) - Non PSP
3	Dewan Komisaris	1. Dingot Sinaga S.E., M.M. (Komisaris Utama) 2. Muslim Thoyib, S.E. (Komisaris)
4	Direksi	1. Bambang Edy Yuwono, S.E. (Direktur Utama) 2. Soni Hari Triwasono, S.Pd., M.H. (Direktur YMF Kepatuhan)
5	Jumlah Pegawai	1. Kantor Pusat : 40 orang 2. Cabang : 24 orang 3. Kantor Kas : 48 orang
6	Jaringan Kantor	1. Kantor Pusat (1 Kantor) 2. Kantor Cabang (2 Kantor) 3. Kantor Pelayanan Kas (9 Kantor)

III. Hasil Penilaian Sendiri *Self Assessment* Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan

No	Informasi	Deskripsi / Keterangan
----	-----------	------------------------

1	Periode Self Assessment	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
2	Total Nilai	64
3	Jumlah Indikator	37
4	Rata-rata Nilai	1.73
5	Peringkat Self Assessment	2
6	Predikat Self Assessment	Peringkat 2 (Cukup Memadai)

Analisa dan Penjelasan

Kualitas 5 (lima) Komponen COSO pengendalian internal yaitu (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi & Komunikasi; (5) Pemantauan, secara umum cukup memadai dan membutuhkan perbaikan cukup signifikan agar dapat memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal pada level yang dapat diterima.

IV. Analisa dan Mitigasi Risiko

Untuk **memperkuat pengendalian internal** dalam Pelaporan Keuangan Bank maka BPR Nusamba Brondong konsisten untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengendalian lingkungan yang mencakup integritas dan nilai-nilai etika serta nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian internal di seluruh jenjang organisasi. Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif diharapkan memberikan teladan (*role model*) dalam menjalankan pengendalian internal
2. Implementasi pengendalian internal yang efektif yang dilaksanakan mulai lini terdepan pada saat *posting* atau pencatatan transaksi, penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta POJK yang mengatur tentang pencatatan transaksi.
3. Melaksanakan sistem *approval* transaksi secara berjenjang dan konsisten menjalankan prosedur untuk memastikan bahwa transaksi keuangan telah dijalankan dan disetujui oleh pihak yang berwenang
4. Menjalankan prosedur untuk mencegah atau mendeteksi secara tepat waktu transaksi tidak sah (*unauthorized transactions*) yang dapat menimbulkan dampak material dalam Laporan Keuangan Bank.
5. Melakukan sistem cek dan *re-check* serta verifikasi dalam pencatatan dan pemeliharaan catatan atas transaksi keuangan sehingga merefleksikan transaksi keuangan yang wajar dan akurat;
6. Memperkuat fungsi deteksi dengan melakukan pengujian terhadap akun-akun dalam laporan keuangan.
7. Menghindarkan diri dari larangan bagi setiap orang, termasuk direksi, dewan komisaris, dan pegawai bank, antara lain untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan Bank, menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan Bank, serta mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan Bank.

V. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Peringkat Pengendalian Internal BPR Nusamba Brondong berada pada peringkat 2 (Cukup Memadai). Selanjutnya BPR Nusamba Brondong hendak memperkuat pengendalian internal agar berada pada Peringkat 1 (Sangat Memadai) dengan melakukan perbaikan pada komponen 5 (lima) COSO dengan tindak lanjut:

1. Direksi dan Dewan Komisaris konsisten untuk meningkatkan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
2. Memastikan konsistensi pelaksanaan prosedur pencatatan transaksi keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat dipersiapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;
3. Meningkatkan peran bagian Manajemen Risiko untuk membantu Direksi mengawasi penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank agar Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan merepresentasikan secara tepat kondisi Bank.

Penutup

Demikianlah Laporan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan BPR Nusamba Brondong disusun sebagai pemenuhan atas POJK No. 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank pasal 8 ayat 2 dan 3 yang secara substantif menyatakan bahwa Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank wajib paling sedikit memuat:

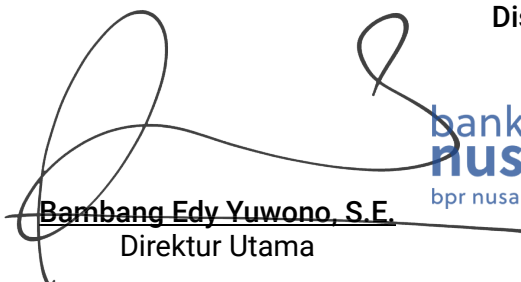
1. pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan
2. hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

Dengan adanya pengujian atas pos-pos dalam laporan keuangan dan pelaksanaan *self assessment* 5 (lima) Komponen COSO Pengendalian Internal dalam proses penyusunan Laporan Keuangan memberikan keyakinan bagi Direksi bahwa dari hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank pada BPR Nusamba Brondong telah berjalan pada tingkat cukup memadai (Peringkat 2) dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR Nusamba Brondong.

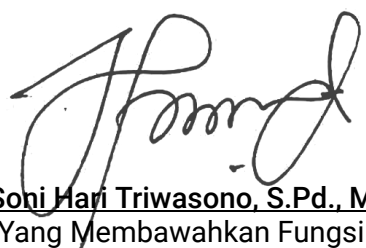
Lamongan, 09 Januari 2026

BPR NUSAMBA BRONDONG

Disetujui oleh,



Bambang Edy Yuwono, S.E.
Direktur Utama



Soni Hari Triwasono, S.Pd., M.H.
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Lampiran 1. Self Assessment

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENGENDALIAN INTERNAL PELAPORAN KEUANGAN

Nama BPR : BPR NUSAMBA BRONDONG
 Alamat : JL. RAYA BRONDONG NO. 77 KEL. BRONDONG KEC. BRONDONG
 KAB LAMONGAN - JAWA TIMUR
 Nomor Telepon : 0322661688
 Periode : 01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025
 Modal Inti : Rp23.588.754.376
 Total Aset : Rp142.632.217.996

Komponen 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika			
1	K1.LPP01.01 Komitmen terhadap Integritas Manajemen BPR/ S menjadi role model (teladan) dengan menerapkan integritas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian Bank.	Nilai 1 (Memadai)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Manajemen BPR/ S menjadi role model (teladan) dengan menerapkan integritas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian Bank, BPR tergolong nilai 1 (memadai).
2	K1.LPP01.02 Sosialisasi Meningkatkan Kepatuhan BPR/ S melaksanakan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan dan tidak melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank.	Nilai 1 (Memadai)	BPR memiliki indikator BPR/ S melaksanakan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan dan tidak melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank, indikator BPR/ S melaksanakan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan dan tidak melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank, yang dinilai nilai 1 (memadai).

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
3	K1.LP.P01.03 Pengenaan sanksi atas pelanggaran Direksi / Pimpinan Unit Kerja memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar peraturan perusahaan dan kode etik dan/ atau aturan perilaku lainnya termasuk tindakan pelanggaran yang mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dan dokumen Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank.	Nilai 1 (Memadai)	Penilaian terhadap indikator Direksi / Pimpinan Unit Kerja memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar peraturan perusahaan dan kode etik dan/ atau aturan perilaku lainnya termasuk tindakan pelanggaran yang mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dan dokumen Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank, yang dimiliki BPR adalah nilai 1 (memadai).
4	K1.LP.P01.04 Pemegang Saham yang Berintegritas Pemegang saham mendukung proses pelaporan keuangan Bank yang berkualitas dan andal serta tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/ atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.	Nilai 1 (Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pemegang saham mendukung proses pelaporan keuangan Bank yang berkualitas dan andal serta tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/ atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank, dengan penilaian nilai 1 (memadai).
5	K1.LP.P01.05 Pihak Terafiliasi Pihak Terafiliasi mengetahui bahwa dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan/ atau Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan Bank. Dan Pihak Terafiliasi mematuhi dan tidak melakukan intervensi dimaksud.	Nilai 1 (Memadai)	Indikator Pihak Terafiliasi mengetahui bahwa dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan/ atau Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan Bank. Dan Pihak Terafiliasi mematuhi dan tidak melakukan intervensi dimaksud, pada BPR saat ini dinilai nilai 1 (memadai).
B. Tanggung Jawab Pengawasan			
6	K1.LP.P02.01 Pengawasan Direksi Direksi bertanggung jawab memastikan kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ketentuan serta penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.	Nilai 1 (Memadai)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi bertanggung jawab memastikan kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ketentuan serta penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, BPR tergolong nilai 1 (memadai).
7	K1.LP.P02.02 Pengawasan Dewan Komisaris Dewan Komisaris BPR/ S melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris BPR/ S melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, dengan pencapaian nilai 2 (cukup memadai).
C. Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab			

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
8	K1.LP.P03.01 Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab BPR/ S memiliki dan menetapkan struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas pada pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank di masing- masing individu pegawai.	Nilai 1 (Memadai)	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR/S memiliki dan menetapkan struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas pada pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank di masing- masing individu pegawai, dengan pencapaian nilai 1 (memadai).
9	K1.LP.P03.02 Kecukupan SDM Jumlah Direksi, Pejabat dan Pegawai sudah memadai dalam menegakkan Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan kompleksitas usaha BPR/S dan memenuhi struktur dalam penerapan Tata Kelola BPR/ BPRS sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/S.	Nilai 1 (Memadai)	Implementasi indikator Jumlah Direksi, Pejabat dan Pegawai sudah memadai dalam menegakkan Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan kompleksitas usaha BPR/S dan memenuhi struktur dalam penerapan Tata Kelola BPR/ BPRS sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/ S, di BPR menunjukkan kondisi nilai 1 (memadai).
D. Komitmen Terhadap Kompetensi			
10	K1.LP.P04.01 Komitmen Terhadap Kompetensi Manajemen BPR/S memastikan bahwa penugasan Pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian internal dan kapasitas sesuai dengan tuntutan jabatan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR telah mengimplementasikan indikator Manajemen BPR/ S memastikan bahwa penugasan Pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian internal dan kapasitas sesuai dengan tuntutan jabatan, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
11	K1.LP.P04.02 Komitmen Terhadap Kompetensi BPR/ BPRS menyelenggarakan pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengendalian internal Pelaporan Keuangan Bank bagi Pegawai terkait.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR/ BPRS menyelenggarakan pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengendalian internal Pelaporan Keuangan Bank bagi Pegawai terkait, berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
E. Menegakkan Akuntabilitas			
12	K1.LP.P05.01 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengendalian Internal Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal dalam pelaksanaan transaksi dan proses pelaporan keuangan Bank	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal dalam pelaksanaan transaksi dan proses pelaporan keuangan Bank, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
13	K1.LP.P05.02 Komitmen Terhadap Kompetensi Wewenang pengendalian internal yang diberikan kepada pegawai telah tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan BPR/S.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Wewenang pengendalian internal yang diberikan kepada pegawai telah tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan BPR/S, yang dimiliki BPR dinilai nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		18	
Banyaknya Indikator		13	
Rata-rata Nilai		1.38	
Predikat Komponen		Nilai 1 (Memadai)	

Komponen 2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Menentukan Tujuan yang Cocok			
1	K2.PR.P06.01 Tujuan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan BPR/ BPRS telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang bertujuan untuk a. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan d. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.	Nilai 1 (Memadai)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR/ BPRS telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang bertujuan untuk a. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan d. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan, BPR tergolong nilai 1 (memadai).
B. Mengidentifikasi dan Menganalisa Risiko			
2	K2.PR.P07.01 Identifikasi Risiko BPR/ S telah mengidentifikasi dan menganalisa risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan (antara lain salah saji, kecurangan atau manipulasi laporan, window dressing, penggelembungan pencatatan dll)	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR/S telah mengidentifikasi dan menganalisa risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan (antara lain salah saji, kecurangan atau manipulasi laporan, window dressing, penggelembungan pencatatan dll), dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
C. Menilai Risiko Fraud			
3	K2.PR.P08.01 Penilaian Risiko Fraud dalam Pelaporan Keuangan BPR/ S telah melakukan penilaian yang terhadap risiko fraud (kecurangan) atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan BPR.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR/S telah melakukan penilaian yang terhadap risiko fraud (kecurangan) atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan BPR, pada BPR berada dalam kondisi nilai 2 (cukup memadai).
4	K2.PR.P08.02 Pengujian yang dilakukan Audit Internal Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam memastikan tidak terdapat fraud (kecurangan) dalam pelaporan keuangan Bank	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Penilaian terhadap indikator Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam memastikan tidak terdapat fraud (kecurangan) dalam pelaporan keuangan Bank, yang dimiliki BPR adalah nilai 2 (cukup memadai).
D. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan			

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
5	K2.PR.P09.01 Identifikasi dan Analisis Perubahan Signifikan BPR/ BPRS telah mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan yang dapat menimbulkan atau mengubah risiko antara lain misalnya perubahan sistem informasi, perubahan regulasi, terjadinya penggabungan usaha (merger) / akuisisi / konsolidasi, perubahan dalam sistem akuntansi yang berdampak pada integritas pelaporan keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR/ BPRS telah mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan yang dapat menimbulkan atau mengubah risiko antara lain misalnya perubahan sistem informasi, perubahan regulasi, terjadinya penggabungan usaha (merger) / akuisisi / konsolidasi, perubahan dalam sistem akuntansi yang berdampak pada integritas pelaporan keuangan Bank, berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		9	
Banyaknya Indikator		5	
Rata-rata Nilai		1.8	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	

Komponen 3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian			
1	K3.APP10.01 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian BPR/S melaksanakan kegiatan pengendalian yang melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan telah dipatuhi secara konsisten.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR/ S melaksanakan kegiatan pengendalian yang melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan telah dipatuhi secara konsisten, BPR tergolong nilai 2 (cukup memadai).
2	K3.APP10.02 Penjelasan kepada Direksi secara Berkala tentang Pengendalian Pelaporan Keuangan Direksi meminta penjelasan secara berkala tentang Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan dari Kepala Unit Kerja / PE terkait untuk dapat segera mendeteksi permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian atau penyimpangan lainnya.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Indikator Direksi meminta penjelasan secara berkala tentang Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan dari Kepala Unit Kerja / PE terkait untuk dapat segera mendeteksi permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian atau penyimpangan lainnya, pada BPR indikator Direksi meminta penjelasan secara berkala tentang Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan dari Kepala Unit Kerja / PE terkait untuk dapat segera mendeteksi permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian atau penyimpangan lainnya, dinilai nilai 2 (cukup memadai).
3	K3.APP10.03 Peran UKK / PE yang Bertanggung jawab terhadap Pencegahan Kecurangan Pelaporan Keuangan Unit kerja khusus / Pejabat Eksekutif (yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti fraud) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, melaksanakan analisis data keuangan dan melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan luaran (output) Laporan Keuangan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Unit kerja khusus / Pejabat Eksekutif (yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti fraud) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, melaksanakan analisis data keuangan dan melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan luaran (output) Laporan Keuangan, berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
B. Memilih dan mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi			

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
4	K3.APP11.01 Verifikasi Transaksi BPR/ S melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta prosedur otorisasi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR/ S melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta prosedur otorisasi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pencapaian nilai 2 (cukup memadai).
5	K3.APP11.02 Pengendalian Teknologi BPR/ S melakukan langkah- langkah pengendalian teknologi informasi agar sistem dan data terjaga integritas dan kerahasiaannya.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR/ S melakukan langkah- langkah pengendalian teknologi informasi agar sistem dan data terjaga integritas dan kerahasiaannya, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
6	K3.APP11.03 Audit Internal Memastikan Efektivitas Internal Kontrol Pengamanan Data Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal memastikan bahwa pengendalian terhadap pengamanan pusat data, pengembangan dan pemeliharaan sistem telah berjalan efektif.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR memiliki indikator Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal memastikan bahwa pengendalian terhadap pengamanan pusat data, pengembangan dan pemeliharaan sistem telah berjalan efektif, indikator Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal memastikan bahwa pengendalian terhadap pengamanan pusat data, pengembangan dan pemeliharaan sistem telah berjalan efektif, yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).
C. Merinci ke dalam Kebijakan dan Prosedur			
7	K3.APP12.01 Pemisahan Fungsi BPR/ S telah mengatur pemisahan fungsi (segregation of duties) sesuai dengan kewenangan atas sistem dan aplikasi yang dimiliki dalam rangka mencegah/ mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/ informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	BPR memiliki indikator BPR/ S telah mengatur pemisahan fungsi (segregation of duties) sesuai dengan kewenangan atas sistem dan aplikasi yang dimiliki dalam rangka mencegah/ mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/ informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan, indikator BPR/ S telah mengatur pemisahan fungsi (segregation of duties) sesuai dengan kewenangan atas sistem dan aplikasi yang dimiliki dalam rangka mencegah/ mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/ informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).
8	K3.APP12.02 Mekanisme Jenjang Otorisasi BPR/ S telah memiliki mekanisme jenjang otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting untuk menjaga integritas pelaporan keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Implementasi indikator BPR/ S telah memiliki mekanisme jenjang otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting untuk menjaga integritas pelaporan keuangan Bank, di BPR menunjukkan kondisi nilai 2 (cukup memadai).

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
9	K3.APP12.03 Ketersediaan Job Description Pengendalian Internal Pimpinan dan Pegawai BPR/ S telah memiliki uraian jabatan (job description) yang memuat fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal di masing-masing jabatan / posisi.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pimpinan dan Pegawai BPR/ S telah memiliki uraian jabatan (job description) yang memuat fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal di masing- masing jabatan / posisi, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		18	
Banyaknya Indikator		9	
Rata-rata Nilai		2	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	

Komponen 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Gunakan Informasi yang Relevan			
1	K4.IK.P13.01 Ketersediaan Sistem Informasi Keuangan BPR/ BPRS memiliki sistem informasi yang mampu menyediakan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Informasi keuangan merupakan setiap informasi berupa angka dan rasio keuangan. Sedangkan Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR/BPRS memiliki sistem informasi yang mampu menyediakan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Informasi keuangan merupakan setiap informasi berupa angka dan rasio keuangan. Sedangkan Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh Bank, dengan pencapaian nilai 2 (cukup memadai).
2	K4.IK.P13.02 Pengembangan Sistem Informasi yang menerapkan Sistem Pengendalian Internal BPR/ S dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi dengan menerapkan pengendalian internal agar kegunaan dan keandalan informasi keuangan dan/ laporan keuangan terjaga integritasnya.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR/ S dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi dengan menerapkan pengendalian internal agar kegunaan dan keandalan informasi keuangan dan/ laporan keuangan terjaga integritasnya, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
B. Komunikasi Internal yang Efektif			
3	K4.IK.P14.01 Memiliki Sistem Komunikasi yang Efektif BPR/S memiliki sistem komunikasi yang efektif di setiap tingkatan organisasi untuk memastikan Manajemen dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR/ S memiliki sistem komunikasi yang efektif di setiap tingkatan organisasi untuk memastikan Manajemen dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
4	K4.IK.P14.02 Penyelenggaraan dan Akses Komunikasi Internal BPR/ S menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar Informasi Keuangan dan / atau Laporan Keuangan dapat dijangkau atau diakses oleh pegawai yang berkepentingan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Penilaian terhadap indikator BPR/ S menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar Informasi Keuangan dan / atau Laporan Keuangan dapat dijangkau atau diakses oleh pegawai yang berkepentingan, yang dimiliki BPR adalah nilai 2 (cukup memadai).
C. Komunikasi Eksternal yang Efektif			

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
5	K4.IK.P15.01 Saluran Komunikasi yang Terbuka BPR/ BPRS membuka saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan OJK, BPKP, Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik, Konsultan yang memberikan masukan yang signifikan terhadap peningkatan integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR/ BPRS membuka saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan OJK, BPKP, Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik, Konsultan yang memberikan masukan yang signifikan terhadap peningkatan integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		10	
Banyaknya Indikator		5	
Rata-rata Nilai		2	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	

Komponen 5. Pemantauan (*Monitoring*)

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Melakukan Evaluasi yang sedang berjalan dan/atau Terpisah			
1	K5.PM.P16.01 Evaluasi Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank BPR/ BPRS melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan teknologi informasi	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR/ BPRS melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan teknologi informasi, pada BPR dinilai nilai 2 (cukup memadai).
2	K5.PM.P16.02 Integrasi Sistem Pengendalian Internal BPR/BPRS mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan bisnis agar mampu menyediakan laporan rutin termasuk Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara akurat dan benar.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Penilaian terhadap indikator BPR/ BPRS mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan bisnis agar mampu menyediakan laporan rutin termasuk Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara akurat dan benar, yang dimiliki BPR adalah nilai 2 (cukup memadai).
B. Mengevaluasi dan Mengkomunikasikan Kekurangan (defisiensi)			
3	K5.PM.P17.01 Evaluasi Kekurangan Pengendalian Internal BPR/ S melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul dalam penyusunan Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR/ S melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul dalam penyusunan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, BPR tergolong nilai 2 (cukup memadai).
4	K5.PM.P17.02 Pelaporan Kekurangan Pengendalian Internal Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang diidentifikasi Unit kerja, Unit Kerja Khusus / PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, Audit Internal maupun Satuan Kerja lainnya segera dilaporkan ke Direksi. Sedangkan kelemahan pengendalian internal yang bersifat material dilaporkan ke Dewan Komisaris.	Nilai 2 (Cukup Memadai)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang diidentifikasi Unit kerja, Unit Kerja Khusus / PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, Audit Internal maupun Satuan Kerja lainnya segera dilaporkan ke Direksi. Sedangkan kelemahan pengendalian internal yang bersifat material dilaporkan ke Dewan Komisaris, BPR tergolong nilai 2 (cukup memadai).

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
5	K5.PM.P17.03 Pelaporan ke OJK Jika Terdapat Kelemahan yang membahayakan Kondisi Bank Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/ atau pihak lain telah memahami bahwa dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Nilai 1 (Memadai)	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/ atau pihak lain telah memahami bahwa dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian nilai 1 (memadai).
Total Nilai Komponen		9	
Banyaknya Indikator		5	
Rata-rata Nilai		1.8	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	

Analisa dan Kesimpulan

No	Komponen	Nilai
1	Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>)	Nilai 1 (Memadai)
2	Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)	Nilai 2 (Cukup Memadai)
3	Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>)	Nilai 2 (Cukup Memadai)
4	Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>)	Nilai 2 (Cukup Memadai)
5	Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	Nilai 2 (Cukup Memadai)
Total Nilai Seluruh Indikator Komponen		64
Banyaknya Indikator Komponen		37
Rata-rata Nilai		1.73
Peringkat Self Assessment		2
Predikat Self Assessment		Peringkat 2 (Cukup Memadai)

Analisa dan Kesimpulan

Kualitas 5 (lima) Komponen COSO pengendalian internal yaitu (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi & Komunikasi; (5) Pemantauan, secara umum cukup memadai dan membutuhkan perbaikan cukup signifikan agar dapat memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal pada level yang dapat diterima.

Lamongan, 09 Januari 2026

BPR NUSAMBA BRONDONG

Disetujui oleh,



bank
nusamba
bpr nusamba brondong

Bambang Edy Yuwono, S.E.
 Direktur Utama

Soni Hari Triwasono, S.Pd., M.H.
 Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan





LAPORAN REALISASI AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAM

BPR NUSAMBA BRONDONG



LAPORAN REALISASI
AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2025



PT. BPR NUSAMBA BRONDONG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN.....	3
BAB I STRATEGI KEBERLANJUTAN.....	5
BAB II IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN	
A. ASPEK EKONOMI.....	6
B. ASPEK LINGKUNGAN HIDUP.....	6
C. ASPEK SOSIAL.....	6
BAB III PROFIL PERUSAHAAN	
A. VISI, MISI, DAN NILAI KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN.....	7
B. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN.....	7
C. SKALA USAHA.....	8
D. PRODUK, LAYANAN, DAN KEGIATAN USAHA.....	8
E. KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI.....	9
F. INFORMASI LAIN.....	9
BAB IV PENJELASAN DIREKSI.....	10
BAB V TATA KELOLA KEBERLANJUTAN	
A. PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN BERKELANJUTAN.....	11
B. PENGEMBANGAN KOMPETENSI.....	11
C. PROSEDUR IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN.....	12
D. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	15
E. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	16
BAB VI KINERJA DAN PENERAPAN KEBERLANJUTAN	
A. KEBIJAKAN MERESPON TANTANGAN.....	17
B. KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN.....	17

C. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN.....	18
D. KINERJA EKONOMI.....	18
E. KINERJA SOSIAL.....	19
F. KINERJA LINGKUNGAN HIDUP.....	19
G. TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN.....	20

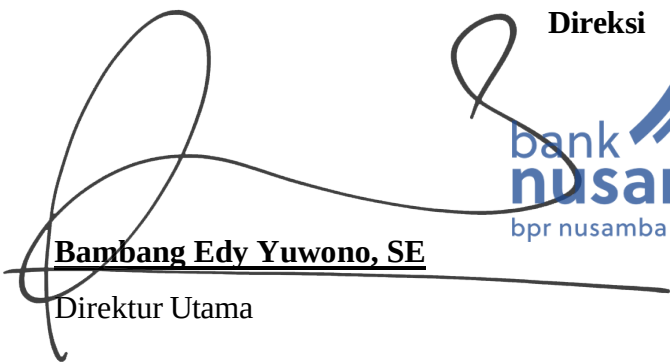
LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN REALISASI AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2025
PT. BPR NUSAMBA BRONDONG

Kami selaku Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Realisasi Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 PT. BPR Nusamba Brondong telah disampaikan secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan sesuai dengan POJK No 51/POJK.03/2017.

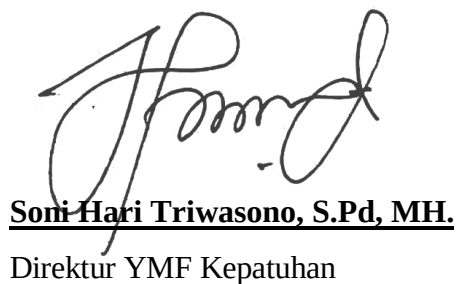
Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya.

Brondong, 10 Maret 2026
PT. BPR Nusamba Brondong

Direksi



Bambang Edy Yuwono, SE
Direktur Utama



Somi Hari Triwasono, S.Pd, MH.
Direktur YMF Kepatuhan

Dewan Komisaris



Dingot Sinaga, SE, MM
Komisaris Utama



Muslim Thoyib, SE
Komisaris

BAB I

STRATEGI KEBERLANJUTAN

PT. BPR Nusamba Brondong sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ingin berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. BPR sebagai lembaga perantara (intermediary institution) melalui dana yang dihimpun dalam bentuk DPK (Tabungan dan Deposito) dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka PT. BPR Nusamba Brondong berkewajiban dalam membiayai debitur secara selektif dengan menghindarkan diri pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan juga yang kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi BPR dalam membangun Keuangan Berkelanjutan berpedoman pada 3 prinsip, yaitu People (Sosial), Planet (Lingkungan), dan Profit (Ekonomi) yang dapat memberikan dampak positif pada Masyarakat melalui layanan produk dan jasa keuangan BPR.

Secara garis besar strategi penerapan keuangan berkelanjutan PT. BPR Nusamba Brondong dalam jangka lima tahun dibagi menjadi 4 tahapan:

1. 2024 – 2025 : Perancangan dan penerapan keuangan berkelanjutan pada internal BPR
2. 2026 : Merancang desain keuangan berkelanjutan pada bisnis penghijauan
3. 2027 : Penerapan keuangan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat
4. 2028 : Memaksimalkan potensi dan investasi pada bisnis penghijauan

Pada fase pertama ini, PT. BPR Nusamba Brondong merancang dan menentukan desain yang akan digunakan untuk menuju Sustainable Banking, serta kelengkapan kebijakan yang mendukung untuk menerapkan Sustainable Banking. Kemudian secara bersamaan mulai menerapkan keuangan berkelanjutan pada internal BPR yang dimulai dari hal-hal sederhana dan mendasar. Fase ini dilakukan oleh BPR dimulai dari tahun 2024 dengan menciptakan ekosistem organisasi dan inisiatif budaya.

PT. BPR Nusamba Brondong mempunyai strategi sebagai berikut:

1. Melakukan penghematan energi, air, dan kertas.
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan.

BAB II

IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN

A. ASPEK EKONOMI

(dalam ribuan rupiah)

No	Indikator	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Total Aset	142.632.218	145.006.012	(2,373,794)	-1.64%
2	Modal Inti	23.952.837	22.263.138	1,689,699	7.59%
3	Total Biaya	25.827.426	27.750.959	(1,923,533)	-6.93%
4	Dana Pihak Ketiga	117.189.340	119.575.323	(2,385,983)	-2.00%
5	Pendapatan Operasional	30.178.171	30.566.063	(387,892)	-1.27%
6	Biaya Operasional	20.413.455	22.073.389	(1,659,934)	-7.52%
7	Laba / Rugi tahun berjalan	4.480.949	3.294.227	1,186,722	36.02%

B. ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

(dalam rupiah)

No	Keterangan	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Listrik dan Air	265.532.860	267.428.426	-1.895.566	-0,71%
2	Percetakan	983.300	2.008.500	-26.992.734	-51,04%
3	Alat Tulis Kantor	138.884.768	163.021.818	-430.000	-14,82%

C. ASPEK SOSIAL

(dalam rupiah)

No	Keterangan (CSR)	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Keagamaan	26.000.000	29.407.000	-3.407.000	-11,59%
2	Kemanusiaan	66.062.998	66.419.966	-11.591.000	-0,54%
	Total	92.062.998	95.826.966	-3.763.968	-3,93%

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

A. VISI, MISI, DAN NILAI KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

1. Visi Keuangan Berkelanjutan

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

2. Misi Keuangan Berkelanjutan

a.Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

b.Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan.

c.Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup.

3. Nilai Keuangan Berkelanjutan Perusahaan

Sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai, tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu : Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui strategi utama yaitu menjalankan organisasi yang berbasis kinerja serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan hidup.

B. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

Nama : PT. BPR Nusamba Brondong

Bidang Usaha : Bank Perekonomian Rakyat

Alamat Kantor Pusat : Jl. Deandels No. 77 Brondong – Lamongan – Jawa Timur

Nomor Telepon : 0322 661688

Alamat Website : www.nusambabondong.co.id

Jaringan Kantor : 1 Kantor Pusat, 2 Kantor Cabang dan 9 Kantor Kas

C. SKALA USAHA

A. Kinerja Keuangan

(Dalam Ribuan)

No	Indikator	2025	2024
1	Total Aset	142.632.218	145.006.012
2	Modal Inti	23.952.837	22.263.138
3	Total Biaya	25.827.426	27.750.959
4	Dana Pihak Ketiga	117.189.340	119.575.323
5	Pendapatan Operasional	30.178.171	30.566.063
6	Biaya Operasional	20.413.455	22.073.389
7	Laba / Rugi tahun berjalan	4.480.949	3.294.227

B. Rasio Keuangan

No.	Rasio	2025 (TW IV)	2024 (TW IV)
1	KPMM	36,61%	34,33%
2	NPL Bruto	17,38%	13,79%
3	NPL Netto	24,12%	19,21%
4	ROA	3,26%	2,33%
5	Rasio BOPO	85,58%	90,79%
6	NIM	15,11%	14,98%
7	LDR	89,80%	91,02%

D. PRODUK, LAYANAN, DAN KEGIATAN USAHA

Dalam Penghimpunan dana (Tabungan dan Deposito) dapat disajikan rekapitulasi aktifitas penghimpunan dana melalui tabungan dari pihak ketiga dengan produk-produk berikut ini:

No	Jenis Produk	Jumlah Nasabah	Jumlah Nominal
1	Tabungan	8.573	54.533.590.021
	1.1. Tabungan Masyarakat	1.230	15.779.610.946
	1.2. Tabungan Harmoni Plus	6.431	37.301.105.935
	1.3. Tabungan Sempel	912	1.452.873.140
2	Deposito	477	62.655.750.000
	2.1. Deposito Masyarakat	379	26.410.750.000
	2.2. Deposito YDSM	2	8.000.000.000
	2.3. Deposito Terkait	5	2.000.000.000
	2.4. Deposito Super Plus	91	25.845.000.000

Dalam penyaluran dana (Kredit) telah dilakukan dengan produk kegiatan dan akad yang diprogramkan sebagai berikut:

(dalam satuan rupiah)

No	Akad	Jumlah Debitur	Jumlah Rupiah
1	Kredit yang Diberikan	3.428	105.238.589.694
	Jumlah	3.428	105.238.589.694

E. KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

PT. BPR Nusamba Brondong merupakan anggota dari Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (PERBARINDO).

BAB IV

PENJELASAN DIREKSI

Pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh BPR masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan dan perlu ditingkatkan. Keterlibatan dari berbagai sumber daya baik dari sisi peningkatan kemampuan pegawai, ketersediaan sumber pendanaan, otoritas yang berwenang, serta masyarakat pengguna produk juga akan sangat membantu efektivitas dari pelaksanaan program keuangan berkelanjutan ini.

Sesuai dengan kewajiban dan rencana yang dimiliki, BPR telah merumuskan program keuangan berkelanjutan untuk jangka pendek pada sesuai dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Program jangka pendek perusahaan telah dilakukan dengan penerapan prinsip hijau sederhana yakni dalam bentuk pemanfaatan *tumbler* sebagai bentuk pengurangan sampah plastik dari botol minum kemasan, efisiensi penggunaan kertas, listrik, dan juga air. Selain itu, BPR juga akan mengembangkan produk dengan konsep digitalisasi lainnya dalam hal untuk mendukung efisiensi proses dan pengalaman pengguna.

BPR juga tetap berkomitmen untuk mendukung mengurangi dampak negatif perubahan iklim dengan menerapkan penerapan prinsip go-green dalam kegiatan operasional BPR dengan memperhatikan aspek lingkungan dan skala bisnis usaha. Meskipun dalam bentuk sederhana dapat dilaksanakan dengan baik sehingga BPR dapat mengoptimalkan sinergi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

BAB V

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

A. PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pelaksanaan kegiatan berkelanjutan membutuhkan dana yang bersumber dari internal perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab aktivitas / program kerja dengan melibatkan setiap organ dalam struktur organisasi.

1. Divisi Bisnis menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan divisi terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Divisi Operasional mengelola pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
3. Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Risiko Kredit dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
4. Divisi Dana dengan menerbitkan atau mengembangkan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan serta mengelola pelaksanaan program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi tugasnya (pengembangan produk).
5. Divisi Teknologi Informasi melakukan penyesuaian sistem teknologi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan.
6. Divisi Sumber Daya Manusia melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
7. Divisi Umum melaksanakan efisiensi kegiatan operasional dan mengelola program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya.

B. PROSEDUR IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.
2. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan nasabah.
 - Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan

kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.

- Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumber daya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.
3. Pengembangan dan penyesuaian Produk dana dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan.
- Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka PT. BPR Nusamba Brondong akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan Mobil Kas Keliling yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun.
 - Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
 - PT. BPR Nusamba Brondong memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability), dan sistem keamanan (security). Penerapan sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, PT. BPR Nusamba Brondong akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat

terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.

- Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan. Survei merupakan salah satu sarana bagi PT. BPR Nusamba Brondong dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negative akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja.
- PT. BPR Nusamba Brondong akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.

4. Penyaluran Kredit berbasis lingkungan

- Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
- Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan.
- Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau.

5. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktifitas operasional BPR

Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan

teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

6. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan
 - Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktifitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi seorang Direksi demi menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.
 - Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan melibatkan divisi-divisi yang berpotensi terkena risiko.
 - Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

C. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Peran dan Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan usaha merupakan bagian yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang dan mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk mempengaruhi jalannya operasional atau terkena dampak dari perusahaan seperti pemegang saham, regulator, pegawai, mitra bisnis, komunitas/asosiasi, konsumen/pelanggan, masyarakat, dan lain- lain. Secara strategis, pemangku kepentingan turut mengembangkan dan mempengaruhi kinerja BPR. Oleh karena itu, senantiasa berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.

PT. BPR Nusamba Brondong selalu memastikan terselenggaranya hubungan yang baik dengan Pemangku Kepentingan dan memandang keterbukaan Informasi dan penyampaian informasi yang komprehensif merupakan bagian dari hak pemangku kepentingan.

D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Diperlukan persiapan dan penyesuaian, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di tahun 2025 antara lain:

1. Minimnya referensi terkait penyusunan pedoman kebijakan keuangan berkelanjutan.
2. Tahun 2025 merupakan pembuatan dan pelaksanaan program keuangan berkelanjutan sehingga masih membutuhkan pemahaman yang lebih matang.
3. Meskipun sudah pernah dilakukan sosialisasi mengenai Aksi Keuangan Berkelanjutan dan diterbitkan surat imbauan untuk pelaksanaan aksi keuangan berkelanjutan namun pemahaman dan partisipasi karyawan masih dinilai minim.

BAB VI

KINERJA DAN PENERAPAN KEBERLANJUTAN

A. KEBIJAKAN MERESPON TANTANGAN

Kebijakan untuk merespon penerapan keuangan berkelanjutan, PT. BPR Nusamba Brondong telah menyusun, menerapkan dan mengkaji ulang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang memuat strategi jangka panjang untuk menerapkan keuangan berkelanjutan pada tahun 2024 sampai dengan 2028. Strategi tersebut memuat sebagai berikut:

1. Efisiensi dalam operasional sehari-hari seperti penghematan penggunaan kertas, konsumsi air, listrik baik di kantor pusat maupun kantor cabang dan kas.
2. Meminimalisir penggunaan air minum kemasan dengan memanfaatkan botol minum isi ulang (*tumbler*).
3. Melaksanakan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan kepada karyawan dan masyarakat.
4. Melaksanakan pengembangan produk keuangan berkelanjutan.
5. Transparansi kepada semua pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan yang berlaku.
6. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR).

PT. BPR Nusamba Brondong berupaya mengembangkan berbagai perangkat pendukung operasional guna mengurangi kuantitas penggunaan kertas dan mengefisiensikan penggunaan energi listrik dan air. BPR juga melaksanakan program CSR dengan mendahulukan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kami juga berupaya untuk menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap karyawan melalui Pelatihan terkait manajemen risiko dilakukan secara rutin.

B. KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

Pembangunan budaya aksi keuangan berkelanjutan dilakukan secara terus menerus diantaranya:

1. Menanamkan Visi, Misi dan Nilai Keberlanjutan Perusahaan kepada setiap pegawai.

2. Menyusun SOP Keuangan Berkelanjutan dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan PT. BPR Nusamba Brondong.

C. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025, terdapat prioritas dan uraian kegiatan RAKB sebagaimana pada table di bawah ini:

No	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Penyusunan SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan	Triwulan II 2025	SDM	Kepatuhan
2	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup	Triwulan II 2025	SDM	Kepatuhan
3	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	Triwulan II 2025	SDM	Bagian SDM dan Kepatuhan
4	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Triwulan II 2025	SDM	Direksi

D. KINERJA EKONOMI

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini PT. BPR Nusamba Brondong memiliki rencana dalam mengembangkan dan menyediakan produk-produk berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lamongan, Gresik, Tuban dan sekitarnya juga masyarakat pada umumnya dengan target pasar utama adalah pengusaha UMKM. Rencana tersebut ditargetkan pada periode tahun 2026 sebagaimana Rencana Lima Tahun Aksi Keuangan Berkelanjutan. Dengan demikian, pada Realisasi Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2025 masih belum dapat menyajikan Laporan Kinerja Ekonomi berkaitan dengan hal tersebut.

E. KINERJA SOSIAL

Pelaksanaan Program Sosial yang searah dengan program keuangan berkelanjutan, antara lain:

No	Bidang	Bulan	Program Kegiatan Sosial
1	Kesejahteraan Masyarakat	Setiap bulan	Pembagian Sembako dan nasi bungkus ke Masyarakat Sekitar
2	CSR Panti Asuhn ataupun ke pondok	Setiap 4 bulan sekali	Pemberian sumbangan ke Panti Asuhan
3	Kegiatan Keagamaan	Juni	Pembelian hewan qurban untuk karyawan

F. KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

Dampak langsung yang ditimbulkan dari kegiatan usaha PT. BPR Nusamba Brondong terhadap lingkungan hidup terbilang sangat kecil. Demikian juga dengan dampak tidak langsung yang ditimbulkan relative terbatas. Namun demikian, BPR memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menekan dampak operasional terhadap lingkungan hidup dan turut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Kami berupaya melakukan efisiensi penggunaan sumber energi listrik dan air serta penggunaan percetakan yang berlebihan.

No	Keterangan	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Listrik dan Air	265.532.860	267.428.426	(1,895,566)	-0.71%
2	Percetakan	983.300	2.008.500	(1,025,200)	-51.04%
3	Alat Tulis Kantor	138.884.768	163.021.818	(24,137,050)	-14.81%
	TOTAL	405,400,928	432,458,744	(27,057,816)	-6.26%

Berdasarkan data pada tabel diatas realisasi efisiensi penggunaan Air dan Kertas pada tahun 2025 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, Pada tahun 2025 terdapat kenaikan biaya di biaya Listrik dan air, begitu juga di biaya percetakan dan alat tulis kantor terdapat penurunan. Namun demikian BPR Nusamba Brondong masih perlu melakukan usaha-usaha untuk kinerja lingkungan hidup, tentunya akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada penerapan aksi keuangan berkelanjutan di periode berikutnya.

G. TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan pada PT. BPR Nusamba Brondong belum dilaksanakan secara maksimal pada tahun 2025 karena sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 PT. BPR Nusamba Brondong, untuk pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan ditargetkan dalam rencana lima tahun yaitu sampai pada periode tahun 2028. Pada Tahun 2025 Aksi Keuangan Berkelanjutan berfokus pada penetapan prosedur, penerapan keuangan berkelanjutan pada internal BPR, dan perencanaan Keuangan Berkelanjutan

